



wonosobo
the soul of java

INDIKATOR STATISTIK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 2018



Dinas Komunikasi Dan Informatika
Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 8
diskominfo.wonosobokab.go.id
(0286) 321341

Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No. Publikasi :
Ukuran Buku : Halaman
Jumlah Halaman : 199
Tim Penyusun : - DISKOMINFO Kabupaten Wonosobo
- BAPPEDA Kabupaten Wonosobo
- BPS Kabupaten Wonosobo
Gambar : DISKOMINFO Kabupaten Wonosobo
Diterbitkan Oleh : DISKOMINFO Kabupaten Wonosobo

“Data boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.”

SAMBUTAN KEPALA DISKOMINFO

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, publikasi Indikator Statistik Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Buku ini kiranya dapat memberikan informasi berbagai macam data Statistik yang dapat digunakan untuk dasar penentuan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Dari buku ini disamping dapat dijadikan referensi data statistik, juga dapat dijadikan ukuran kuantitas, yang diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan masa kini serta untuk mencapai sasaran di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk berbagai kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

EKO SURYANTORO, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631026 199103 1 004

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Diskominfo	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
I Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penyajian	3
II Pemerintahan	7
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	7
2.2. Keanggotaan DPRD Kabupaten Wonosobo	10
2.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	14
2.4. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	17
III Pendidikan	27
3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	28
3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	31
3.3. Angka Partisipasi Murni (APM).....	33
3.4. Kemampuan Membaca dan Menulis.....	36
3.5. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	38
IV Kesehatan	42
4.1. Anak Lahir Hidup.....	42
4.2. Angka Kematian Bayi	43
4.3. Angka Kematian Ibu	44
4.4. Gizi Buruk.....	46
4.5. Angka Kesakitan.....	47
4.6. Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar	54
4.7. Sumber Daya Kesehatan	61
V Penduduk.....	64
5.1. Jumlah Penduduk.....	64
5.2. Tingkat Kepadatan penduduk.....	68
5.3. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	72
5.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	74
5.5. Aspek Keluarga Berencana	79

	5.6. Aspek Keluarga Sejahtera	81
VI	Ketenagakerjaan	87
	6.1. Konsep dan Definisi	88
	6.2. Indikator Ketenagakerjaan	90
VII	Transportasi dan Telekomunikasi	103
	7.1. Transportasi	103
	7.1.1. Jaringan Jalan.....	103
	7.1.2. Jembatan	107
	7.1.3. Terminal.....	109
	7.1.4. Prasarana Pendukung Transportasi Lainnya	110
	7.2. Telekomunikasi	111
	7.2.1. Telepon Rumah.....	112
	7.2.2. Menara Telekomunikasi	112
VIII	Agama dan Sosial	115
	8.1. Penduduk Menurut Agama	115
	8.2. Tempat Ibadah.....	115
	8.3. Jamaah Haji.....	116
	8.4. Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.....	117
	8.5. Napi yang Menghuni Rutan Wonosobo.....	119
IX	Kemiskinan.....	122
	9.1. Konsep Penduduk Miskin.....	123
	9.2. Sumber Data	123
	9.3. Kemiskinan Makro <i>versus</i> Kemiskinan Mikro	124
	9.4. Konsep Garis Kemiskinan (GK).....	124
	9.5. Teknik Penghitungan GKM	125
	9.6. Persentase Penduduk Miskin.....	128
	9.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan	129
	9.8. Indeks Keparahan Kemiskinan.....	129
	9.9. Perkembangan Tingkat kemiskinan Kab. Wonosobo, Tahun 2010 - 2017.....	130
	9.10. Perubahan Garis Kemiskinan 2010-2018.....	132
	9.11. Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	133
X	Indeks Pembangunan Manusia	136
	10.1. Konsep	136
	10.2. Perubahan Metodologi IPM	137
	10.3. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia	140
	10.4. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2017.....	144
XI	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo	147

11.1. Nilai Nominal PDRB.....	152
11.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	152
11.1.2 Agregat PDRB Atas Dasar Harga Konstan	153
11.2. Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi.....	154
11.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	156
11.4. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi).....	157
11.5. PDRB Perkapita	161
XII Inflasi	163
12.1. Pengantar.....	163
12.2. Pemilihan Komoditi.....	164
12.3. Formulasi Penghitungan Inflasi	165
12.3.1. Formulasi Perhitungan IPK	165
12.3.2. Formulasi Perhitungan Inflasi/Deflasi	165
12.3.3. Perhitungan Andil (<i>Share</i>) Inflasi/Deflasi	167
12.4. Perkembangan IHK dan Inflasi.....	167
XIII Produk Domestik Regional Bruto	172
13.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	172
13.2. Agregat PDRB Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran	173
13.3. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	175
13.4. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	177
13.5. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	178
13.6. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	180
13.7. Perkembangan Perubahan Inventori.....	182
13.8. Perkembangan Ekspor – Impor Barang dan Jasa.....	183
XIV Statistik Akomodasi.....	188
14.1. Pariwisata.....	188
14.2. Hotel.....	189
XV Keuangan Daerah	196
15.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	196
15.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	198

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo	7
Tabel 2.2.	Jumlah Anggota Partai	11
Tabel 2.3.	Produk dan Kegiatan DPRD Kabupaten Wonosobo 2013 – 2017	13
Tabel 2.4.	Banyaknya Produk DPRD Kabupaten Wonosobo Menurut Jumlah Surat Keputusan dan Peraturan Daerah yang Ditetapkan	14
Tabel 2.5.	Syarat Dukungan dari Pemilih	20
Tabel 2.6.	Persyaratan Dukungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	23
Tabel 2.7.	Persyaratan Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	24
Tabel 5.1.	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2017	65
Tabel 5.2.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan, 2017 ...	71
Tabel 5.3.	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan, Tahun 2013 – 2017	73
Tabel 5.4.	Persentase Komposisi Umur Penduduk dan Dependency Ratio (DR) di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2012 – 2017	77
Tabel 6.1.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu yang Lalu	91
Tabel 6.2.	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Satu Minggu Lalu di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017	92
Tabel 6.3.	Persentase TPAK, TKK, dan TPT di Kabupaten Wonsobo Tahun 2012 – 2017	94
Tabel 6.4.	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	98
Tabel 6.5.	Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	99
Tabel 6.6.	Persentase Penduduk Laki-laki + Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2017	99
Tabel 6.7.	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2012 – 2017	100
Tabel 6.8.	Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2012 – 2017	101
Tabel 6.9.	Persentase Penduduk Laki-laki + Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2012 – 2017	101
Tabel 7.1.	Panjang Jalan per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017	104
Tabel 7.2.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017	105
Tabel 7.3.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2014 – 2017	106

Tabel 7.4.	Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo, 2015 – 2017	108
Tabel 7.5.	Jumlah Terminal Berdasarkan Tipe Terminal di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2014 – 2016	110
Tabel 7.6.	Jumlah Rambu Jalan di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2016	110
Tabel 7.7.	Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonosobo	113
Tabel 8.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Agama, Tahun 2013 – 2016	115
Tabel 8.2.	Banyaknya Tempat Ibadah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017 ...	116
Tabel 9.1.	Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terendah di Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2018	131
Tabel 9.2.	Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2018	132
Tabel 10.1.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2012 – 2017	144
Tabel 11.1.	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	150
Tabel 11.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2013 – 2017	152
Tabel 11.3.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2013 – 2017	153
Tabel 11.4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar harga Berlaku (persen), 2013 – 2017	155
Tabel 11.5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen), 2013 – 2017	157
Tabel 11.6.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2013 – 2017	159
Tabel 11.7.	Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen) 2013 – 2017	160
Tabel 11.8.	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2013 – 2017	161
Tabel 12.1.	Inflasi Akumulatif Wonosobo dan Jawa Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran Sampai Oktober 2018 (persen)	168
Tabel 12.2.	Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2016 – 2018	169
Tabel 13.1.	Trade Balance dan Rasio Perdagangan Luar Kabupaten Wonosobo	174
Tabel 13.2.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013 – 2017	177
Tabel 13.3.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Tahun 2013 – 2017	178
Tabel 13.4.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2013 – 2017	179
Tabel 13.5.	Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2013 – 2017	181
Tabel 13.6.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2013 – 2017	183
Tabel 13.7.	Perkembangan dan Struktur Export Barang dan Jasa Tahun 2013 – 2017 ...	184

Tabel 13.8. Perkembangan dan Struktur Import Barang dan Jasa Luar Daerah Tahun 2013 – 2017	184
Tabel 13.9. Net Ekspor Antar Daerah Tahun 2013 – 2017	185
Tabel 14.1. Jumlah Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2016	190
Tabel 15.1. Realisasi APBD di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2017	197
Tabel 15.2. PADS Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo.....	8
Gambar 2.2. Data PNS Berdasar Jenis Kelamin	15
Gambar 2.3. Data PNS Berdasar Golongan	16
Gambar 2.4. Data PNS Berdasar Eselon	16
Gambar 2.5. Data PNS Berdasar Tingkat Pendidikan	17
Gambar 3.1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017.....	29
Gambar 3.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017	29
Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017.	30
Gambar 3.4. Grafik Angkat Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2017 – 2015.....	33
Gambar 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017.....	34
Gambar 3.6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Wonosobo 2013 – 2017.....	34
Gambar 3.7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017.....	37
Gambar 3.8. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017	38
Gambar 3.9. Grafik Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2012 – 2016.....	40
Gambar 4.1. Lima Besar Penyebab Kematian Bayi	44
Gambar 4.2. Kasus Kematian Ibu Tahun 2017 Berdasarkan Penyebab Kematian.....	45
Gambar 4.3. Kasus Kematian Ibu Tahun 2017 Berdasarkan Periode Kematian	46
Gambar 4.4. Kasus HIV/AIDS Menurut Golongan Umur, 2017	49
Gambar 4.5. Kepesertaan KB pada PUS Tahun 2017	59
Gambar 5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Wonosobo Tahun 2013 – 2017	68
Gambar 5.2. Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2017	69
Gambar 5.3. Perkembangan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2017	70
Gambar 5.4. Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 - 2017	74
Gambar 5.5. Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo, 2017	76
Gambar 5.7. Perkembangan DR di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2017.....	78
Gambar 5.8. Jumlah & Persentase PUS Menurut Kelompok Umur	79
Gambar 5.9. Peserta KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi	80

Gambar 5.10. PUS Bukan Peserta KB.....	81
Gambar 5.11. Jumlah Kepala Keluarga dengan Tahapan Keluarga Sejahtera.....	81
Gambar 5.12. Jumlah & Persentase Tingkat Keluarga Sejahtera	82
Gambar 5.13. Jumlah & Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Per Kecamatan	82
Gambar 5.14. Jumlah & Persentase Keluarga Sejahtera Per Kecamatan.....	82
Gambar 5.15. Persentase Kepemilikan JKN.....	83
Gambar 5.16. Persentase Kepemilikan JKN Menurut Jenis.....	84
Gambar 5.17. Persentase Kepemilikan JKN Menurut Kecamatan	84
Gambar 5.18. Persentase kepemilikan JKN Menurut Jenis & Kecamatan	85
Gambar 6.1. Perkembangan TPAK Kabupaten Wonosobo	95
Gambar 6.2. Perkembangan TKK Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2017	96
Gambar 6.3. Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2017	97
Gambar 7.1. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017.....	105
Gambar 7.2. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Tahun 2014 -2017.....	107
Gambar 7.3. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo, 2015 – 2017	109
Gambar 7.4. Jumlah Rambu-Rambu yang Terpasang di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2017	111
Gambar 7.5. Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2016	112
Gambar 8.1. Jumlah Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2013 – 2017	117
Gambar 8.2. Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2017...	118
Gambar 8.3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Wonosobo	119
Gambar 8.4. Jumlah Narapidana yang Menghuni Rumah Tahanan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2016.....	120
Gambar 9.1. Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2018.	131
Gambar 9.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobom, 2010 – 2018.....	133
Gambar 11.1. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010	151
Gambar 12.1. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2018 (persen)	167
Gambar 12.2. IHK Bulanan Kabupaten Wonosobo,2017 – 2018.....	170
Gambar 13.1. Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2013 ke 2017	174
Gambar 13.2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2013 Ke 2017	175

Gambar 14.1. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng yang Berasal dari Jawa Tengah, Luar Jawa Tengah, dan Mancanegara, 2014 dan 2016.....	189
Gambar 14.2. TPK Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2012 – 2016.....	191
Gambar 14.3. RLM Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017	193
Gambar 14.4. Rata-Rata Lama Menginap pada Akomodasi Hotel Menurut Bulan di Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2017.....	194
Gambar 14.5. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017.....	194

BAB 1

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buku Statistik Daerah (Stada) Tahun 2018 salah satu Dokumen yang mendukung Perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Agar dapat menentukan strategi dan kebijaksanaan, yang tepat sasaran dalam pembangunan diperlukan strategi. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Buku Statistik Daerah (Stada) ini merupakan salah satu hasil kegiatan Statistik Sektoral. Statistik adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, bahwa tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2. Tujuan

Dalam Publikasi Buku Stada ini ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi social ekonomi masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara umum Wonosobo melalui berbagi indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama dan sosial lain, serta perumahan dan lingkungan hidup. Selain itu juga dapat diperoleh berbagai indikator lain seperti Pendidikan APK, APM , Kesehatan, IPM, Kemiskinan, Inflasi, Akomodasi, Keuangan Daerah, Transportasi dan Lain sebagainya.

1.3. Sumber Data

Sumber data dari Kompilasi data Instansi vertical dan Organisasi Perangkat Daerah, Buku Wonosobo Dalam Angka Tahun 2018, data Sistem Informasi Pembangunan Daerah serta perhitungan dari berbagai survey Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi ini selain uraian singkat dan tabel juga disajikan konsep serta definisi dan juga cara penghitungannya, hal ini untuk memudahkan pengguna buku ini untuk memahami isinya.

Publikasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- I Pendahuluan
- II Pemerintahan
Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2014-2019, Produk dan kegiatan DPRD. Data PNS di kabupaten Wonosobo
- III Pendidikan
Penduduk Usia Sekolah, Keadaan Sarana Pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Kemampuan Membaca dan Menulis, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.
- IV Kesehatan
Anak Lahir Hidup, Angka Penyebab Kesakitan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Cara Berobat, Status Kesehatan.

- V Perumahan dan Lingkungan Hidup
Berbagai Unsur Rumah/Tempat Tinggal, Fasilitas Perumahan.
- VI Penduduk
Jumlah Penduduk, Tingkat Kepadatan penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*), Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.
- VII Ketenagakerjaan
Konsep dan Definisi, Indikator Ketenagakerjaan.
- VIII Transportasi dan Komunikasi
Transportasi, Komunikasi
- IX Agama dan Sosial
Penduduk Menurut Agama, Tempat Ibadah, Jamaah haji, Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas, Napi yang Menghuni Rutan Wonosobo.
- X Kemiskinan
Konsep Penduduk Miskin, Sumber Data, Kemiskinan Makro *versus* Kemiskinan Mikro, Konsep Garis Kemiskinan (GK), Teknik Penghitungan GKM, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Perkembangan Tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2012-2017, Perubahan Garis Kemiskinan 2012-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
- XI Indeks Pembangunan Manusia
Konsep, Komponen IPM, Cara penghitungan IPM, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, Paritas Daya Beli, Perkembangan IPM kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2016
- XII PDRB Kabupaten
Nilai Nominal PDRB, Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi), PDRB per Kapita
- XIII Inflasi
Pengantar, Pemilihan Komoditi, Formulasi Penghitungan Inflasi,

- XIV PDRB Pengeluaran
- (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga,
 - (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga,
 - (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah,
 - (4) pembentukan modal tetap domestik bruto,
 - (5) perubahan inventori, dan
 - (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
- XV Statistik Akomodasi
Pariwisata, Hotel
- XVI Keuangan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pendapatan Asli Daerah.

BAB 2

Pemerintahan

BAB II

PEMERINTAHAN

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 98,468 ha. Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan, dengan pembagian seperti tabel berikut :

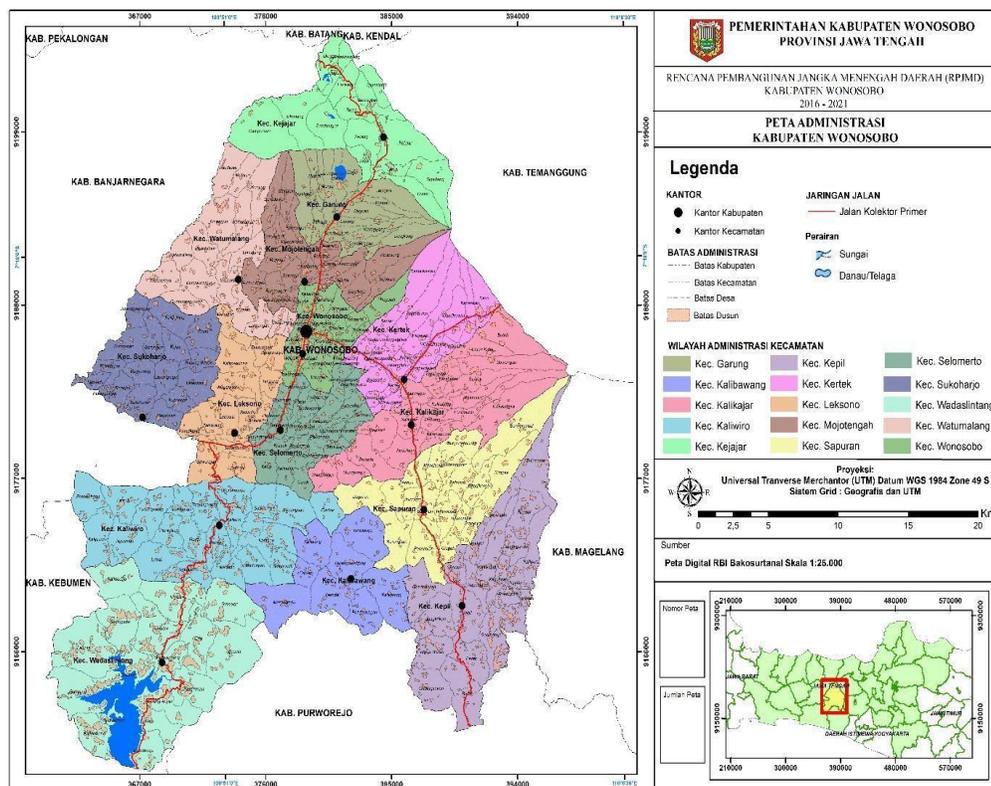
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
			Luas Wilayah (%)			
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	20
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
	Jumlah	98.468	100,00	236	29	265

Batas administrasi wilayah wonosobo adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

Batas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo terletak 7°.11' dan 7°.36' lintang selatan, 109°.43' dan 110°.04' bujur timur, pada ketinggian 200 – 2.250 meter dpl. Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Dilalui

jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

b. **Klimatologi**

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata rata suhu udara di Wonosobo antara 14,3 – 26,5 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713 - 4255 mm/tahun. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Wonosobo sangat baik untuk pertanian sehingga sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian.

c. **Kondisi Topografi, Geologi dan Geomorfologi**

Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 6 wilayah kemiringan, yaitu:

- Wilayah dengan kemiringan antara 0,00-2,00 % seluas 1052,263 ha atau 1,04 % dari seluruh luas wilayah, banyak dijumpai di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek;
- Wilayah dengan kemiringan antara 2,00-5,00 % seluas 22969,5 ha atau 22,89 % dari luas seluruh wilayah, banyak terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang;
- Wilayah dengan kemiringan antara 5,00-8,00 % seluas 8143,769 ha atau 8,11 % dari luas wilayah total, tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang;

- Wilayah dengan kemiringan antara 8,00-15,00 % seluas 55434,85 ha atau 55,2 % dari seluruh luas wilayah tersebar secara merata di semua kecamatan;
- Wilayah dengan kemiringan antara 15,00-25,00 % seluas 11101,6 ha atau 11,06 % dari seluruh luas wilayah terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo;
- Wilayah dengan kemiringan antara 25,00-40,00 % seluas 1479,631 ha atau 1,47 % dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar, Garung dan Kalikajar; dan
- Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40,00 % seluas 142,362 ha atau 0,14 % dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar.

2.2. Keanggotaan DPRD Kabupaten Wonosobo

Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo periode 2014 – 2019 berjumlah 45 (empat puluh lima) anggota. Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berasal dari 10 Partai politik peserta pemilu Tahun 2014. Berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Suara Sah Parpol dan Prosentase dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada 12 Mei 2014, maka urutan perolehan suara Parpol memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Wonosobo adalah : 1) Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara 89.708 atau setara dengan 19,39% (8 kursi), 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara 89.564 atau setara dengan 19,36% (9 kursi), 3) Partai Golongan Karya memperoleh suara 43.515 atau setara dengan 9,40% (4 kursi), 4) Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya memperoleh suara 40.023 atau setara dengan 8,65% (4 kursi), 5) Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 39.426 atau setara dengan 8,52% (4 kursi), 6) Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh suara 36.256 atau setara dengan 7,84% (4 kursi), 7) Partai Nasional Demokrat memperoleh suara 35.442 atau setara dengan 7,66% (4 kursi), 8) Partai Amanat Nasional memperoleh suara 34.193 atau setara dengan 7,39% (3 kursi), 9) Partai Demokrat memperoleh suara 32.313

atau setara dengan 6,98% (4 kursi), dan 10) Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara 19.556 atau setara dengan 4,23% (1 kursi).

Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Wonosobo periode 2014 – 2019 meliputi:

- PDI Perjuangan : 9 Kursi
- PKB : 8 Kursi
- Partai Golkar : 4 Kursi
- Partai Gerindra : 4 Kursi
- PPP : 4 Kursi
- Partai Demokrat : 4 Kursi
- Partai Nasdem : 4 Kursi
- PAN : 3 Kursi
- Partai Hanura : 4 Kursi
- PKS : 1 Kursi

Tabel 2.2. Jumlah Anggota Partai

Nama Partai	Laki-Laki	Perempuan
PDI Perjuangan	9	
PKB	8	
Partai Golkar	3	1
Partai Gerindra	4	
PPP	4	
Partai Demokrat	2	2
Partai Nasdem	4	
PAN	3	
Partai Hanura	4	
PKS	2	

Sumber : Setwan

Keterlibatan /peran perempuan d sebagai wakil rakyat dikabupaten Wonosobo masih sangat kecil, dari 45 orang anggota DPR hanya ada 3 orang dari perempuan atau 0,066%.

Keanggotaan DPRD Kabupaten Wonosobo diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/47 tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2014 di Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Heru Budyanto, SH, MH atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesai, disaksikan oleh Bupati Wonosobo (Drs.H.A.Kholiq Arif, M.Si.) mewakili Gubernur Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2014 2019 terdiri dari 8 (delapan) Fraksi, yaitu :

1. Fraksi Partai Nasional Demorat disingkat FPNasdem;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disingkat FPKB;
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disingkat FPDJ Perjuangan;
4. Fraksi Partai Golongan Karya disingkat FPG;
5. Fraksi Partai Gerindra PAN;
6. Fraksi Partai Demokrat disingkat FPD;
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disingkat FPPP;
8. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat disingkat FPHanura.

Tugas Fraksi dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;
2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;

3. Menentukan dan menetapkan bakal calon Pimpinan DPRD dan diusulkan dalam rapat paripurna.

Tabel 2.3. Produk dan Kegiatan DPRD Kabupaten Wonosobo 2013 – 2017

No	Jenis Produk/Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rapat/Sidang	270	228	353	216	249
	Pleno	27	41	36	42	46
	Fraksi	25	14	12	19	17
	Panitia	41	24	26	32	45
	Komisi A	42	32	66	27	36
	Komisi B	48	39	75	36	38
	Komisi C	45	42	68	30	31
	Komisi D	42	36	70	30	36
	Komisi E	-	-	-	-	-
2	Perda/Keputusan, dll	36	47	36	50	56
	Perda	5	10	5	13	17
	Keputusan DPRD	6	16	14	18	15
	Keputusan Pimpinan DPRD	25	21	17	19	24
	Pernyataan/Pendapat	-	-	-	-	-
	Resolusi	-	-	-	-	-
	Kesimpulan Pendapat	-	-	-	-	-
	Memorandum	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-
3	Peninjauan	135	13	26	21	14
	Komisi A	37	4	6	5	2
	Komisi B	28	2	9	7	3
	Komisi C	38	3	4	5	2
	Komisi D	32	4	7	4	7
	Komisi E	-	-	-	-	-

Sumber : Setwan

Tabel 2.4. Banyaknya Produk DPRD Kabupaten Wonosobo Menurut Jumlah Surat Keputusan dan Peraturan Daerah yang Ditetapkan, 2015 – 2017

Tahun	Surat Keputusan	Perda yang ditetapkan
2015	31	5
2016	37	13
2017	39	17

Sumber : Setwan

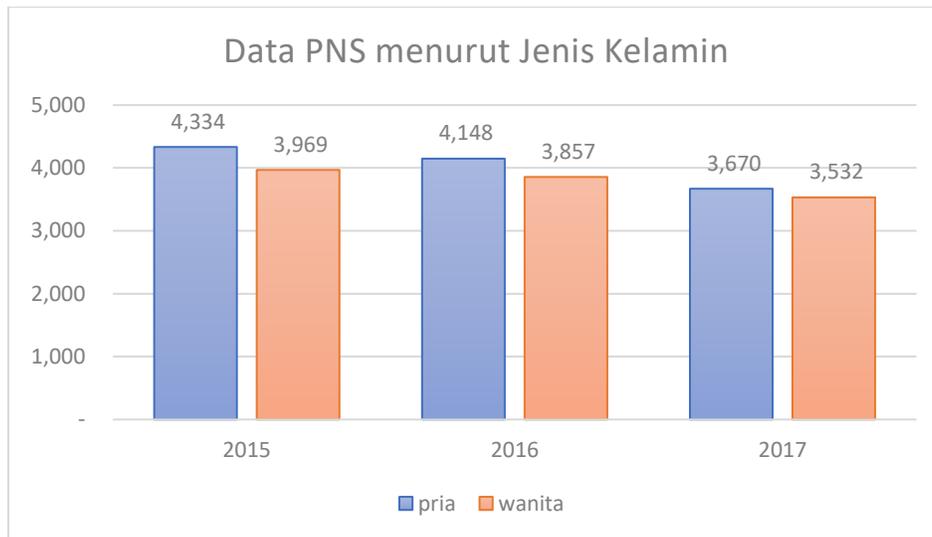
2.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasar pasal 1 UU No 5 tahun 2014, yakni:

- **Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai **Pegawai ASN** secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- **Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN)** adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Sedangkan pada Pasal 7 UU No 5 Tahun 2014 diterangkan bahwa:

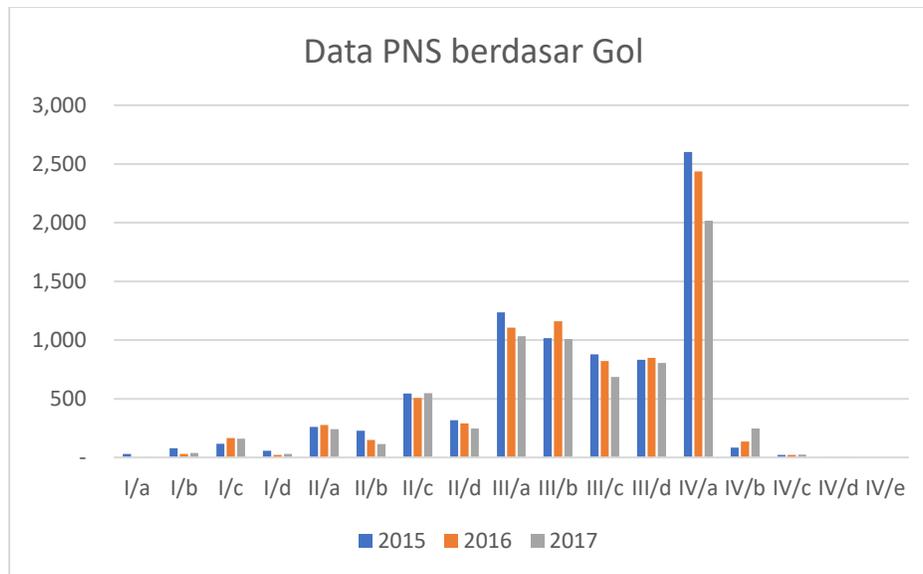
1. **PNS merupakan Pegawai ASN** yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. **PPPK merupakan Pegawai ASN** yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.



Sumber : BKD 2017

Gambar 2.2. Data PNS berdasar Jenis Kelamin

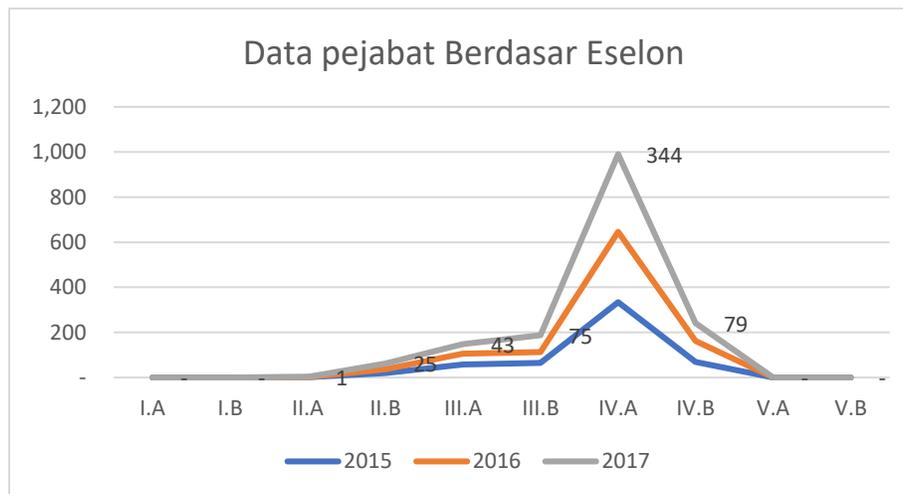
Dari grafik diatas menunjukkan PNS kabupaten Wonosobo antara pria dan wanita pada tiap tahunnya lebih banyak PNS pria. Di tahun 2017 PNS kabupaten Wonosobo mengalami penurunan karena Guru SMA dan SMK statusnya menjadi PNS Provinsi Jawa Tengah. Data dari kepegawaian pada Tahun 2015-2017 jumlah PNS terbanyak di golongan IVA.



Sumber : BKD 2017

Gambar 2.3. Data PNS berdasar Golongan

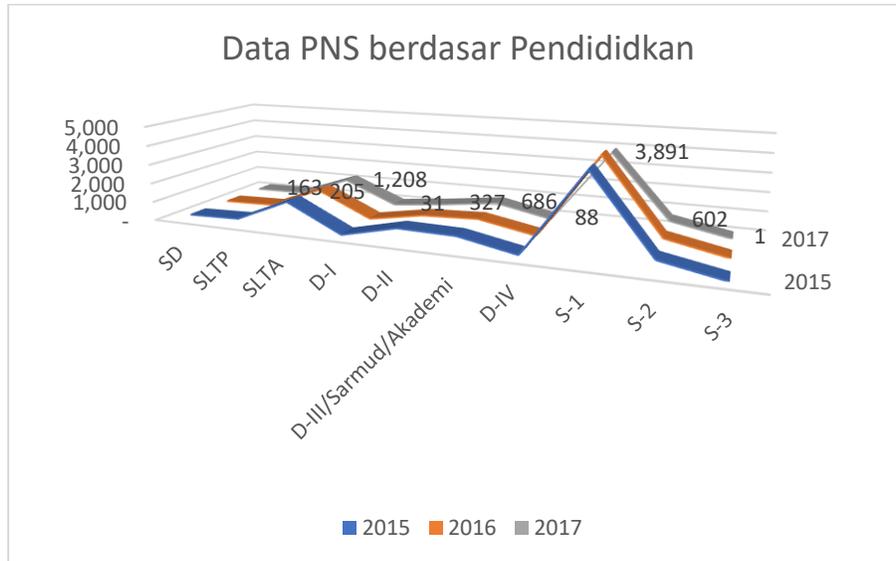
Pada tahun 2015-2017 jumlah jabatan terbanyak di eselon IVa , untuk jabatan terendah di eselon IVb sedangkan jabatan tertinggi eselon IIA di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.



Sumber : BKD 2017

Gambar 2.4. Data PNS berdasar Eselon

Sedangkan untuk tingkat pendidikan tingkat pendidikan terbanyak PNS kabupaten Wonosobo selama 2015-2017 adalah S1 (Strata).



Sumber : BKD 2017

Gambar 2.5. Data PNS berdasar Tingkat Pendidikan

2.4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu Tahun 2004 merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum tahun 2004, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPR dan DPRD. Semenjak Tahun 2004 penyelenggaraan Pemilu terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan, serentak dalam satu waktu.

I. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi Pemilu pertama dimana pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan, serentak dalam satu waktu, itu berarti dalam Pemilu ini akan melahirkan calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden untuk jabatan lima tahun mendatang secara bersamaan.

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden (Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018);
 - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan KPU;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
 - d. Pembentukan badan penyelenggara;
 - e. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - f. Penataan dan penetapan daerah pemilihan;
 - g. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - h. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - i. Kampanye anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - j. Laporan dan audit dana kampanye;
 - k. Masa tenang;
 - l. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - n. Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih;
 - o. Peresmian keanggotaan
 - p. Pengucapan sumpah/janji.

2. Peserta Pemilu

a. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah partai politik peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan:

- berstatus badan hukum; sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik,
- memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat;
- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan;
- mengajukan nama, lambang dan tanda gambar parpol kepada KPU;
- menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan yang telah memenuhi Persyaratan dan mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Tabel 2.5. Syarat Dukungan dari Pemilih

Provinsi Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Dukungan (Paling Sedikit)
sampai dengan 1.000.000	1.000 pemilih
lebih dari 1.000.000 - 5.000.000	2.000 pemilih
lebih dari 5.000.000 - 10.000.000	3.000 pemilih
lebih dari 10.000.000 - 15.000.000	4.000 pemilih
lebih dari 15.000.000	5.000 pemilih

Dukungan dimaksud tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Persyaratan dimaksud dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi KTP setiap pendukung.

- **Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

Pemilu presiden dan wakil presiden adalah Pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelumnya.

REKAPITULASI SUARA SAH DAN TIDAK SAH SERTA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2004, 2009, 2014
KABUPATEN WONOSOBO

URAIAN	KECAMATAN															JUMLAH AKHIR	
	WADASLINTANG	KEPIL	SAPURAN	KALIWIRO	LEKSONO	SELOMERTO	KALIKAJAR	KERTEK	WONOSOBO	WATUMALANG	MOJOTENGAH	GARUNG	KEJAJAR	SUKOHARJO	KALIBAWANG		
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN TAHUN 2004																	
1	Jumlah Pemilih	35.850	40.216	36.679	33.054	27.939	32.147	42.374	52.455	55.957	35.157	38.404	32.555	28.099	21.745	16.362	528.993
2	Suara sah	26.409	29.402	25.691	23.174	20.344	23.215	25.856	36.503	38.968	27.156	25.751	21.888	21.329	16.926	8.821	371.433
3	Suara Tidak sah	4.526	4.905	5.897	3.800	3.353	4.043	11.459	10.857	10.799	4.738	7.584	8.125	5.379	2.345	4.857	92.667
4	% Suara Tidak Sah	14,63%	14,30%	18,67%	14,09%	14,15%	14,83%	30,71%	22,92%	21,70%	14,86%	22,75%	27,07%	20,14%	12,17%	35,51%	19,97%
5	Kehadiran Pemilih	30.935	34.307	31.588	26.974	23.697	27.258	37.315	47.360	49.767	31.894	33.335	30.013	26.708	19.271	13.678	464.100
6	% Kehadiran Pemilih	86,29%	85,31%	86,12%	81,61%	84,82%	84,79%	88,06%	90,29%	88,94%	90,72%	86,80%	92,19%	95,05%	88,62%	83,60%	87,73%
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN TAHUN 2009																	
1	Jumlah Pemilih	45.800	45.439	41.829	40.181	31.929	37.525	49.359	59.425	60.138	39.597	41.240	36.006	30.856	24.749	19.476	603.549
2	Suara sah	25.937	27.313	30.995	24.428	21.903	25.439	40.956	31.373	42.488	27.638	25.165	22.325	29.259	17.624	12.275	405.118
3	Suara Tidak sah	3.231	5.119	3.513	2.731	2.507	2.713	7.000	2.969	5.560	4.235	4.376	4.155	4.278	2.006	1.640	56.033
4	% Suara Tidak Sah	11,08%	15,78%	10,18%	10,06%	10,27%	9,64%	14,60%	8,65%	11,57%	13,29%	14,81%	15,69%	12,76%	10,22%	11,79%	12,15%
5	Kehadiran Pemilih	29.168	32.432	34.508	27.159	24.410	28.152	47.956	34.342	48.048	31.873	29.541	26.480	33.537	19.630	13.915	461.151
6	% Kehadiran Pemilih	63,69%	77,53%	75,94%	67,59%	76,45%	75,02%	80,70%	69,58%	79,90%	80,49%	82,04%	85,82%	81,32%	79,32%	71,45%	76,41%
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN TAHUN 2014																	
1	Jumlah Pemilih	49.745	49.456	44.523	43.132	34.465	39.919	53.009	64.118	64.967	42.288	45.867	39.690	32.619	27.034	21.277	652.109
2	Suara sah	28.847	34.935	31.742	27.104	24.063	27.981	36.608	49.024	47.158	30.490	35.298	29.954	24.811	19.803	14.908	462.726
3	Suara Tidak sah	2.042	1.488	2.396	1.505	1.434	1.530	2.659	3.313	4.094	2.310	2.078	2.286	1.828	1.298	575	30.836
4	% Suara Tidak Sah	6,61%	4,09%	7,02%	5,26%	5,62%	5,18%	6,77%	6,33%	7,99%	7,04%	5,56%	7,09%	6,86%	6,15%	3,71%	6,25%
5	Kehadiran Pemilih	30.889	36.423	34.138	28.609	25.497	29.511	39.267	52.337	51.252	32.800	37.376	32.240	26.639	21.101	15.483	493.562
6	% Kehadiran Pemilih	62,09%	73,65%	76,67%	66,33%	73,98%	73,93%	74,08%	81,63%	78,89%	77,56%	81,49%	81,23%	81,67%	78,05%	72,77%	75,69%

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP I TAHUN 2004																	
1	Jumlah Pemilih	37.980	41.104	36.839	33.991	28.688	33.332	43.133	54.083	56.265	36.234	38.593	32.764	28.529	21.985	16.975	540.495
2	Suara sah	29.219	33.110	30.050	27.451	23.589	26.527	36.453	46.301	46.988	31.168	31.630	28.407	25.093	18.655	13.330	447.971
3	Suara Tidak sah	721	655	1.031	449	338	504	1.101	1.522	1.235	613	955	1.301	1.283	316	402	12.426
4	% Suara Tidak Sah	2,41%	1,94%	3,32%	1,61%	1,41%	1,86%	2,93%	3,18%	2,56%	1,93%	2,93%	4,38%	4,86%	1,67%	2,93%	2,70%
5	Kehadiran Pemilih	29.940	33.765	31.081	27.900	23.927	27.031	37.554	47.823	48.223	31.781	32.585	29.708	26.376	18.971	13.732	460.397
6	% Kehadiran Pemilih	78,83%	82,15%	84,37%	82,08%	83,40%	81,10%	87,07%	88,43%	85,71%	87,71%	84,43%	90,67%	92,45%	86,29%	80,90%	85,18%
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP II TAHUN 2004																	
1	Jumlah Pemilih	37.068	41.410	36.802	36.019	28.434	32.369	43.550	53.939	54.926	36.367	38.915	33.255	28.821	21.994	16.916	540.785
2	Suara sah	28.336	30.509	28.428	26.495	22.573	25.548	33.911	43.247	44.454	30.581	29.321	25.771	21.518	18.284	12.822	421.798
3	Suara Tidak sah	555	1.574	1.825	774	662	1.069	2.608	2.941	2.423	813	2.361	2.780	3.601	419	415	24.820
4	% Suara Tidak Sah	1,92%	4,91%	6,03%	2,84%	2,85%	4,02%	7,14%	6,37%	5,17%	2,59%	7,45%	9,74%	14,34%	2,24%	3,14%	5,56%
5	Kehadiran Pemilih	28.891	32.083	30.253	27.269	23.235	26.617	36.519	46.188	46.877	31.394	31.682	28.551	25.119	18.703	13.237	446.618
6	% Kehadiran Pemilih	77,94%	77,48%	82,20%	75,71%	81,72%	82,23%	83,86%	85,63%	85,35%	86,33%	81,41%	85,85%	87,16%	85,04%	78,25%	82,59%
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009																	
1	Jumlah Pemilih	45.331	46.458	42.287	40.448	32.507	37.984	49.313	59.907	61.317	39.992	42.382	36.783	31.297	25.324	19.800	611.130
2	Suara sah	27.987	30.173	28.641	26.294	22.664	26.629	33.366	44.588	46.966	29.013	30.794	26.343	22.292	18.546	12.840	427.136
3	Suara Tidak sah	2.193	3.124	3.031	1.977	1.744	1.610	3.840	4.059	2.749	2.532	2.792	2.961	3.561	1.404	1.175	38.752
4	% Suara Tidak Sah	7,27%	9,38%	9,57%	6,99%	7,15%	5,70%	10,32%	8,34%	5,53%	8,03%	8,31%	10,10%	13,77%	7,04%	8,38%	8,32%
5	Kehadiran Pemilih	30.180	33.297	31.672	28.271	24.408	28.239	37.206	48.647	49.715	31.545	33.586	29.304	25.853	19.950	14.015	465.888
6	% Kehadiran Pemilih	66,58%	71,67%	74,90%	69,89%	75,09%	74,34%	75,45%	81,20%	81,08%	78,88%	79,25%	79,67%	82,61%	78,78%	70,78%	76,23%
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014																	
1	Jumlah Pemilih	50.063	50.151	45.287	43.597	34.910	39.796	53.615	64.834	66.314	42.725	46.863	39.814	32.859	27.445	21.566	659.839
2	Suara sah	29.384	33.470	31.143	27.935	24.646	28.563	36.865	49.410	50.354	30.659	34.343	29.258	23.979	20.877	14.709	465.595
3	Suara Tidak sah	310	487	1.315	416	481	426	1.163	1.105	1.162	655	1.048	950	870	341	278	11.007
4	% Suara Tidak Sah	1,04%	1,43%	4,05%	1,47%	1,91%	1,47%	3,06%	2,19%	2,26%	2,09%	2,96%	3,14%	3,50%	1,61%	1,85%	2,31%
5	Kehadiran Pemilih	29.694	33.957	32.458	28.351	25.127	28.989	38.028	50.515	51.516	31.314	35.391	30.208	24.849	21.218	14.987	476.602
6	% Kehadiran Pemilih	59,31%	67,71%	71,67%	65,03%	71,98%	72,84%	70,93%	77,91%	77,68%	73,29%	75,52%	75,87%	75,62%	77,31%	69,49%	72,23%

3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

a) Pasangan Calon perseorangan

Persyaratan dukungan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur

Tabel 2.6. Persyaratan Dukungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Dukungan (Paling Sedikit)
sampai dengan 2.000.000	10 %
lebih dari 2.000.000 - 6.000.000	8,5 %
lebih dari 6.000.000 - 12.000.000	7,5 %
lebih dari 12.000.000	6,5 %

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan.

- b) Persyaratan dukungan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 2.7. Persyaratan Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Provinsi Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Dukungan (Paling Sedikit)
sampai dengan 250.000	10 %
lebih dari 250.000 – 500.000	8,5 %
lebih dari 500.000 - 1.000.000	7,5 %
lebih dari 1.000.000	6,5 %

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008

1	Jumlah Pemilih	45.419	45.657	40.991	38.874	31.581	37.951	48.508	59.381	60.450	39.631	41.364	35.964	30.970	24.835	19.084	600.660
2	Suara sah	26.416	27.977	23.511	23.129	20.022	21.993	27.714	36.131	34.392	25.991	25.156	19.658	18.284	17.391	11.910	359.675
3	Suara Tidak sah	1.234	2.345	5.544	2.145	2.219	3.347	5.626	7.778	9.534	3.163	5.722	6.113	5.695	1.435	1.019	62.919
4	% Suara Tidak Sah	4,46%	7,73%	19,08%	8,49%	9,98%	13,21%	16,87%	17,71%	21,70%	10,85%	18,53%	23,72%	23,75%	7,62%	7,88%	14,89%
5	Kehadiran Pemilih	27.650	30.322	29.055	25.274	22.241	25.340	33.340	43.909	43.926	29.154	30.878	25.771	23.979	18.826	12.929	422.594
6	% Kehadiran Pemilih	60,88%	66,41%	70,88%	65,02%	70,43%	66,77%	68,73%	73,94%	72,67%	73,56%	74,65%	71,66%	77,43%	75,80%	67,75%	70,35%

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

1	Jumlah Pemilih	47.855	49.339	46.218	42.631	35.108	40.640	53.796	65.696	65.893	43.025	46.863	41.533	33.535	27.475	21.764	661.371
2	Suara sah	26.771	31.867	28.351	26.382	23.373	26.951	34.883	46.024	44.264	28.763	31.731	28.301	22.496	19.187	14.317	433.661
3	Suara Tidak sah	975	1.539	3.728	1.726	1.438	1.855	4.111	4.578	4.095	2.029	2.748	2.898	2.378	1.268	1.088	36.454
4	% Suara Tidak Sah	3,51%	4,61%	11,62%	6,14%	5,80%	6,44%	10,54%	9,05%	8,47%	6,59%	7,97%	9,29%	9,56%	6,20%	7,06%	7,75%
5	Kehadiran Pemilih	27.746	33.406	32.079	28.108	24.811	28.806	38.994	50.602	48.359	30.792	34.479	31.199	24.874	20.455	15.405	470.115
6	% Kehadiran Pemilih	57,98%	67,71%	69,41%	65,93%	70,67%	70,88%	72,48%	77,02%	73,39%	71,57%	73,57%	75,12%	74,17%	74,45%	70,78%	71,08%

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2005

1	Jumlah Pemilih	40.935	43.208	38.653	34.830	29.619	34.954	45.349	55.103	58.305	37.897	39.135	33.773	29.089	22.931	17.951	561.732
2	Suara sah	28.410	31.198	28.261	26.811	22.926	25.597	32.812	43.121	44.208	30.088	30.765	26.182	23.225	18.493	13.126	425.223
3	Suara Tidak sah	602	1.275	1.916	628	549	922	2.334	2.486	1.866	797	1.279	1.944	2.323	396	359	19.676
4	% Suara Tidak Sah	2,08%	3,93%	6,35%	2,29%	2,34%	3,48%	6,64%	5,45%	4,05%	2,58%	3,99%	6,91%	9,09%	2,10%	2,66%	4,42%
5	Kehadiran Pemilih	29.012	32.473	30.177	27.439	23.475	26.519	35.146	45.607	46.074	30.885	32.044	28.126	25.548	18.889	13.485	444.899
6	% Kehadiran Pemilih	70,87%	75,16%	78,07%	78,78%	79,26%	75,87%	77,50%	82,77%	79,02%	81,50%	81,88%	83,28%	87,83%	82,37%	75,12%	79,20%

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2010

1	Jumlah Pemilih	47.969	47.298	43.169	41.032	32.976	38.907	50.504	60.851	63.220	40.818	42.463	37.664	31.903	25.894	20.328	624.996
2	Suara sah	27.323	30.150	27.493	25.074	21.360	24.934	31.757	40.352	43.000	27.810	31.765	26.357	24.105	17.509	13.387	412.376
3	Suara Tidak sah	1.517	2.182	3.829	1.922	1.953	2.472	4.237	6.196	4.790	2.760	2.128	2.546	1.958	1.955	701	41.146
4	% Suara Tidak Sah	5,26%	6,75%	12,22%	7,12%	8,38%	9,02%	11,77%	13,31%	10,02%	9,03%	6,28%	8,81%	7,51%	10,04%	4,98%	9,07%
5	Kehadiran Pemilih	28.840	32.332	31.322	26.996	23.313	27.406	35.994	46.548	47.790	30.570	33.893	28.903	26.063	19.464	14.088	453.522
6	% Kehadiran Pemilih	60,12%	68,36%	72,56%	65,79%	70,70%	70,44%	71,27%	76,50%	75,59%	74,89%	79,82%	76,74%	81,69%	75,17%	69,30%	72,56%

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2015

1	Jumlah Pemilih	48.157	49.839	46.785	43.889	35.273	41.002	54.726	65.495	67.106	43.128	46.998	40.794	33.572	27.641	21.903	666.308
2	Suara sah	29.704	34.749	32.308	26.960	23.741	27.951	37.797	48.955	45.567	29.552	35.491	30.384	24.371	19.824	15.065	462.419
3	Suara Tidak sah	643	928	1.645	1.100	1.219	1.204	1.827	2.437	4.128	1.679	1.538	1.364	1.749	892	358	22.711
4	% Suara Tidak Sah	2,12%	2,60%	4,84%	3,92%	4,88%	4,13%	4,61%	4,74%	8,31%	5,38%	4,15%	4,30%	6,70%	4,31%	2,32%	4,68%
5	Kehadiran Pemilih	30.347	35.677	33.953	28.060	24.960	29.155	39.624	51.392	49.695	31.231	37.029	31.748	26.120	20.716	15.423	485.130
6	% Kehadiran Pemilih	63,02%	71,58%	72,57%	63,93%	70,76%	71,11%	72,40%	78,47%	74,05%	72,41%	78,79%	77,83%	77,80%	74,95%	70,42%	72,81%

BAB 3

Pendidikan

BAB III

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan ditindaklanjuti dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebagai upaya untuk memenuhi hak dasar tersebut, pemerintah telah menginstruksikan agar setiap warga dapat menempuh pendidikan serendah-rendahnya sampai dengan jenjang pendidikan dasar. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1, Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, dijelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Komitmen pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi layanan dasar khususnya pendidikan tertuang dalam salah satu misi RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata”**. Berdasarkan misi tersebut, beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi.

3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung APK adalah :

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah diSD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$$

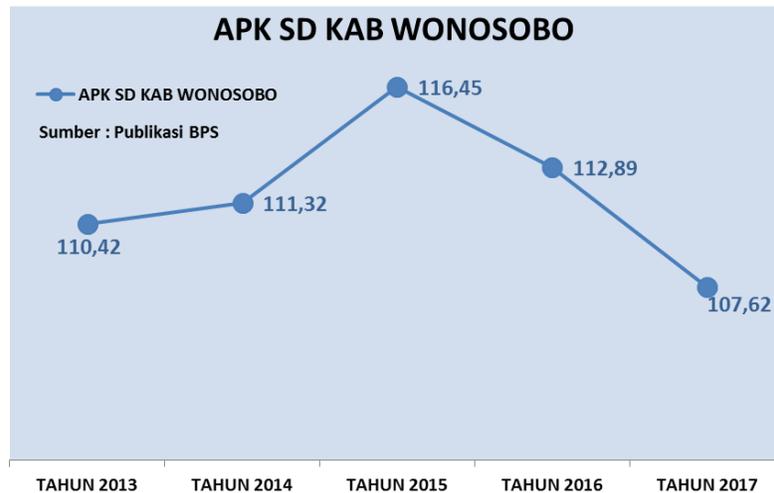
$$\text{APK SLTP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SLTA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah diSLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

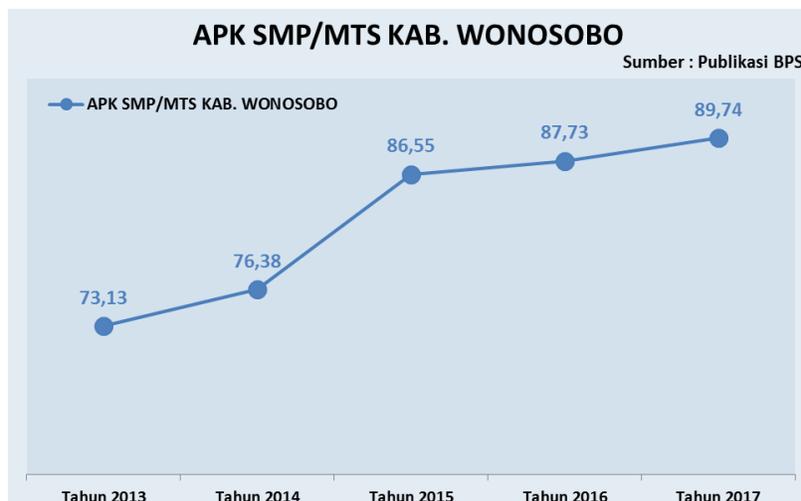
Secara umum, tingkat partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Wonosobo mengalami fluktuasi (naik turun) dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Nilai APK SD pada tahun 2013 sebesar 110,42 dan pada tahun 2017 sebesar 107,62. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Capain nilai APK SD/ MI di Kabupaten Wonosobo yang lebih dari 100 persen disebabkan oleh adanya populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk

sekolah di usia yang lebih muda atau secara sederhana disebabkan masih adanya siswa yang mendaftar kurang dari atau lebih dari usia formal masuk Sekolah Dasar yaitu 7 tahun sehingga ketika duduk di bangku SD tidak dimulai tepat dari usia 7 dan lulus tepat di usia 12 tahun, karena ketika waktu masuk TK masih terlalu dini sehingga ketika lulus TK usianya belum mencapai 7 tahun dan sebaliknya.



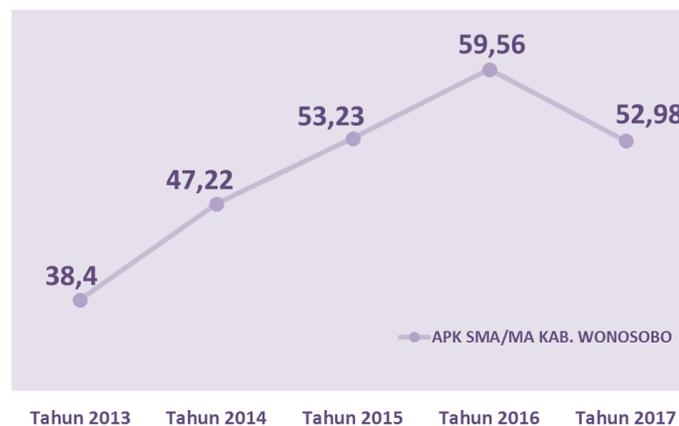
Gambar 3.1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017



Gambar 3.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Wonosobo, 2013 -2017

Sedangkan nilai APK untuk jenjang SMP/ MTs dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2013 nilainya baru 73,13 naik menjadi 89,74 pada tahun 2017. Peningkatan capaian nilai APK SMP/ Mts di Kabupaten Wonosobo antara lain dipengaruhi oleh adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendorong terwujudnya Program Nasional Wajardikdas, meningkatnya kondisi social ekonomi masyarakat, kemudahan aksesibilitas menuju ke pusat pelayanan pendidikan dan motivasi siswa dan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang Pendidikan dasar.

Wajib belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah (Undang - undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat. Wajib belajar ini sasarannya adalah setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain yaitu dengan pendirian sekolah SD dan SMP Satu Atap di beberapa daerah dengan maksud untuk mendekatkan pusat layanan Pendidikan dasar di tengah-tengah masyarakat.



Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA di Kabupaten Wonosobo, 2013 - 2017

3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama penduduk usia muda. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7 – 12 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 7 – 12 tahun yang masih sekolah baik di SD maupun SLTP.

$$APS_{(7-12)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun}} \times 100$$

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 13–15 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 13–15 tahun yang masih sekolah baik di SD, SLTP maupun SLTA.

$$APS_{(13-15)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun}} \times 100$$

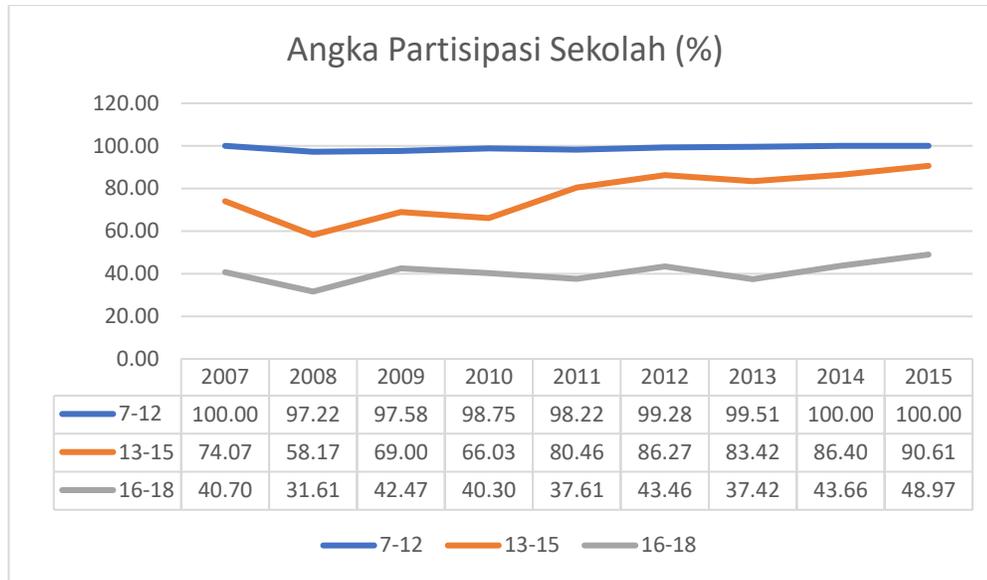
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16–18 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 16–18 tahun yang masih sekolah baik di SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi.

$$APS_{(16-18)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun}} \times 100$$

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut

terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Pengkajian partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo pada setiap jenjang pendidikan (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah), diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas Sumber Daya Manusia yang potensial di masa datang. Dalam hal ini, salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah GER (*Gross Enrollment Ratio*), berdasarkan data Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Definisi GER adalah penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Peningkatan penduduk yang bersekolah selama tahun 2007-2015 merupakan keberhasilan Kabupaten Wonosobo dalam upaya memperluas pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Wonosobo yang cenderung semakin meningkat. Perbandingan antara kelompok usia penduduk tingkat pendidikan tampak bahwa APS anak usia tingkat pendidikan SD (7-12 tahun) lebih tinggi dibandingkan APS usia SLTP (13-15 tahun). Pada tahun 2015 APS usia 7-12 tahun mencapai 100,00 persen dan APS usia SLTP sebesar 90,61 persen. APS usia penduduk tingkat pendidikan SLTP yang lebih rendah dibanding APS usia SD dapat dipahami karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Wonosobo yang berbukit–bukit dan sulit ditempuh dan juga jarak rumah ke sekolah tingkat SLTP yang jauh, sehingga belum meliputi seluruh anak usia 13-15 tahun yang ada.



Gambar 3.4. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2007 – 2015

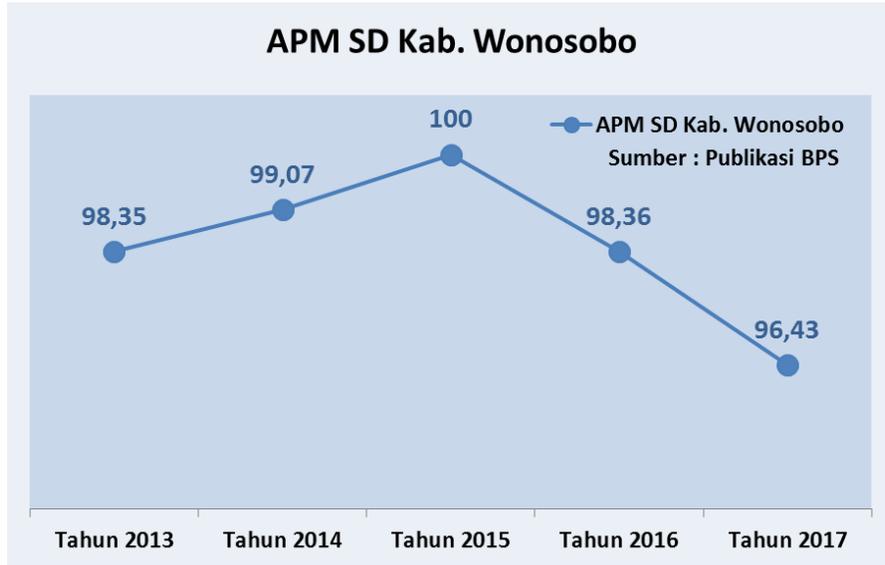
3.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi jumlah anak yang bersekolah tepat waktu. Bila semua anak bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

$$APM\ SD = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang sekolah diSD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$$

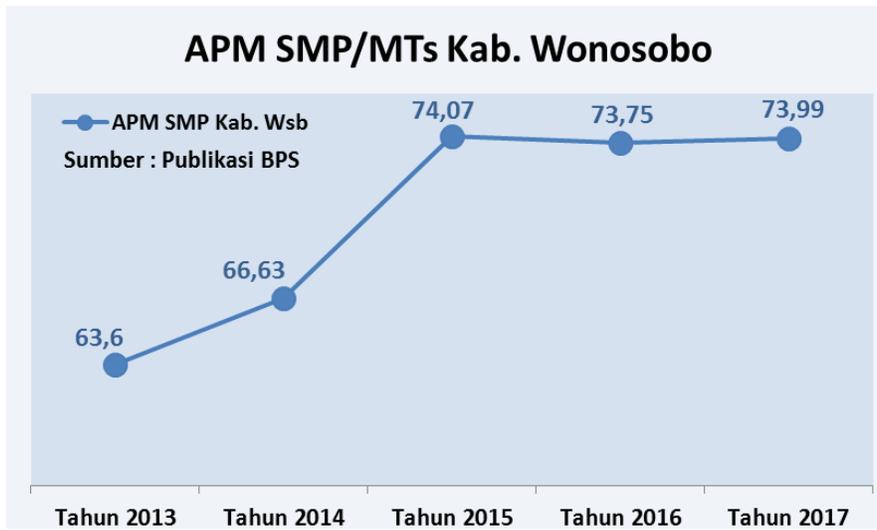
$$APM\ SLTP = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun yang sekolah diSLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SLTA} = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

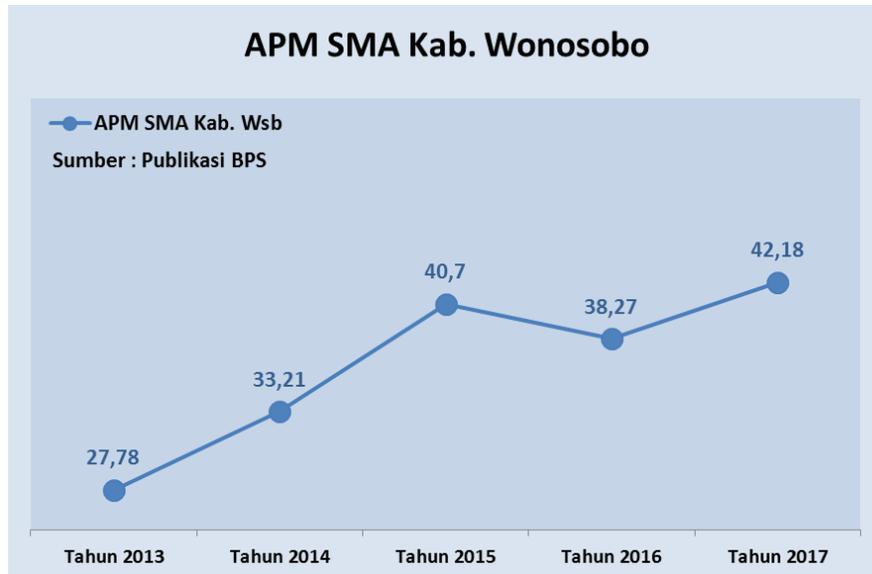


**Gambar 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017**

4



**Gambar 3.6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017**



**Gambar 3.7. Angka Partisipasi Murni (AMP) SMA/MA
di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017**

Pada Gambar 3.5. menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 96,43 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 73,99 persen, dan penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SMA/MA sebesar 42,18.

Selama kurun waktu 2013-2017 APM di Kabupaten Wonosobo menunjukkan kenaikan pada semua jenjang pendidikan dasar. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Wonosobo telah memberikan dampak positif terhadap : (1) meningkatnya mutu sarana dan prasarana pendidikan yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini berarti bahwa peningkatan efisiensi dan efektifitas sarana dan prasarana pendidikan baik fisik dan nonfisik sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran; (2) meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat; (3) meningkatnya profesionalisme guru yang memiliki kemampuan teknis kependidikan. Kualitas SDM tenaga kependidikan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena itu penyelenggaraan

pendidikan dapat dilakukan secara profesional; (4) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas.

3.4. Kemampuan Membaca dan Menulis

Angka Melek Huruf (AMHJ) dan Angka Buta Huruf (ABH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagi aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Angka Melek Huruf adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan.

Indikator Melek Huruf dapat digunakan untuk :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD masih tinggi.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dewasa (usia 10 tahun keatas) yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan seratus.

$$AMH = \frac{\text{Penduduk umur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas}} \times 100$$

Kebalikan angka melek huruf adalah angka buta huruf yang menunjukkan ketertinggalan sekelompok penduduk tertentu dalam mencapai pendidikan. Buta huruf dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan membaca dan menulis. Secara konsep Angka Buta Huruf dihitung dari persentase populasi dewasa yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Buta huruf sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, serta ketidakberdayaan masyarakat. Tingginya angka buta huruf disebabkan oleh :

- a. Tingginya angka putus sekolah SD
- b. Beratnya kondisi geografis di Kabupaten Wonosobo
- c. Munculnya penyandang buta huruf baru
- d. Pengaruh faktor sosiologis masyarakat

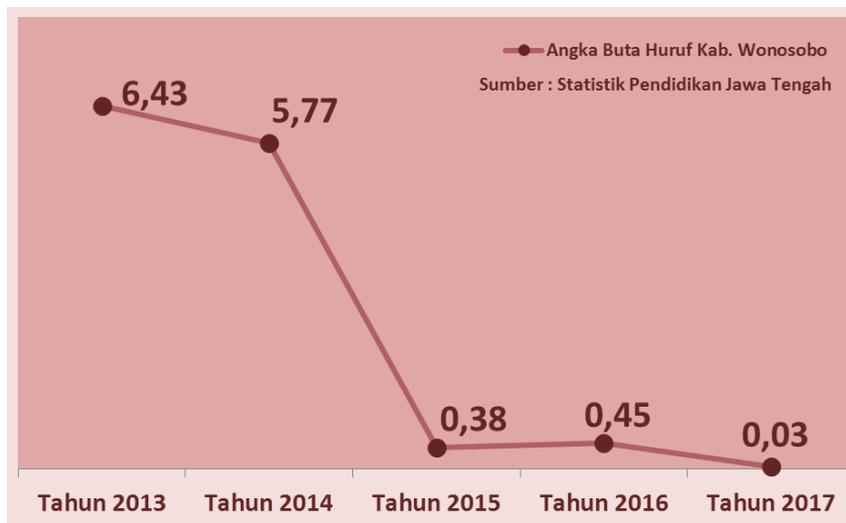
Angka Buta Huruf biasanya dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dewasa (usia 10 tahun keatas) yang tidak dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas dikalikan seratus.

$$ABH = \frac{\text{Penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas}} \times 100$$

Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah berusaha agar penduduk laki-laki maupun perempuan disegala lapisan masyarakat dapat terbebaskan dari buta aksara. Usaha

pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 9 tahun dan program kejar paket A dan B.

Dampak dari gerakan wajib belajar di tingkat dasar (penduduk usia 7-15 tahun) yang telah dilancarkan sejak tiga dasawarsa terakhir dapat terlihat melalui penurunan jumlah penduduk baik perkotaan maupun perdesaan yang tidak bisa baca tulis (Tabel 2.4.). Dari profil angka buta huruf penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 diketahui bahwa persentase penduduk yang buta huruf tinggal 0,03%. Penyebab dari keadaan ini diduga terkait dengan kemampuan ekonomi keluarga yang kurang memadai dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan di mana fasilitas yang tersedia berlokasi di tempat yang jauh dari jangkauan penduduk setempat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 3.8. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2017

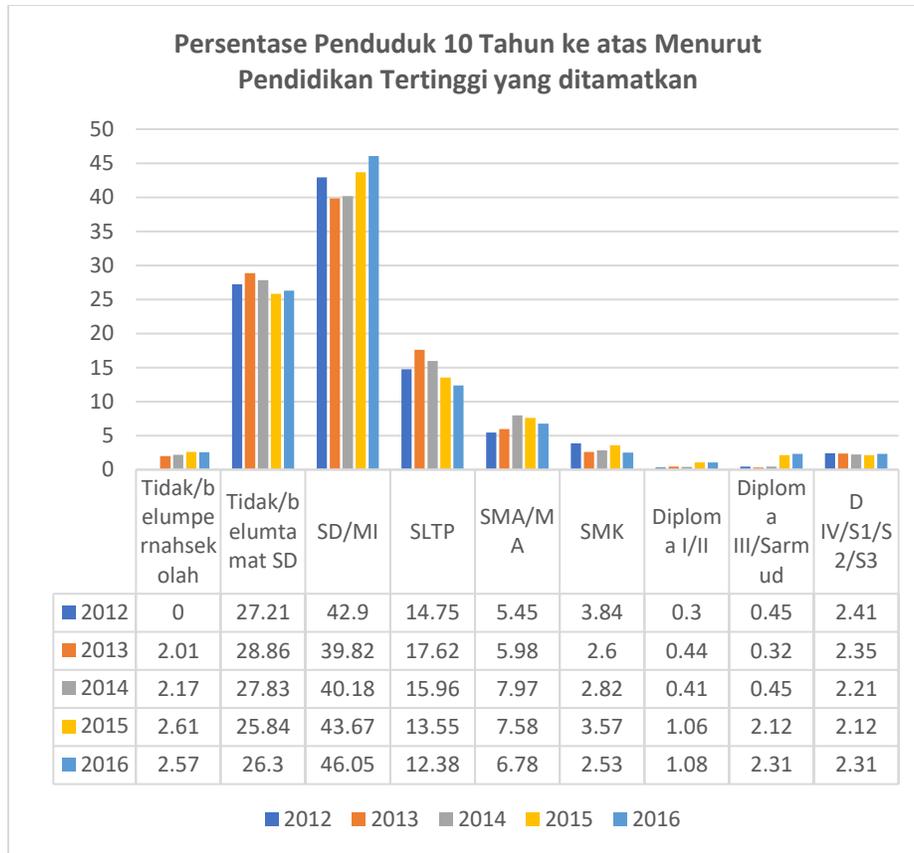
3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan keterkaitan sistem pendidikan dalam membidik sub kelompok penduduk dewasa (15 tahun keatas). Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat

kesejahteraannya. Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki atau surat kelulusan dari sekolah bagi yang baru lulus tapi belum menerima ijazah.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa antara lain ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk diketahui perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo terutama dari tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan.

Peningkatan persentase penduduk laki-laki dan perempuan berpendidikan menengah dan tinggi merupakan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Wonosobo (selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.9).



Gambar 3.9. Grafik Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo, 2012 – 2016

Gambar 3.9. diatas menunjukkan persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada kecenderungan pendidikan yang ditamatkan terfokus pada tingkat menengah (terutama pendidikan menengah pertama). Hal ini merupakan bukti keberhasilan Program Pemerintah tentang kebijakan pendidikan Wajar 9 tahun, namun di lain sisi juga menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk Wonosobo masih rendah karena rata-rata hanya lulusan SD dan SLTP, sementara penduduk yang lulus SMA dan perguruan tinggi masih sedikit. Kondisi ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat Wonosobo secara umum, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk dapat mendorong anak-anak usia sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

BAB 4

Kesehatan

BAB IV

KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunannasional. Gambaran tentang kondisi derajat kesehatan masyarakat terukur pada indikator Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Status Gizi masyarakat.

Upaya kesehatan di Kabupaten Wonosobo sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, berikut ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan, status kesehatan dan gizi, dan indikator penunjang lainnya, begitu juga hasil yang telah dicapai akan diuraikan pada bab ini.

4.1. Anak Lahir Hidup

Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi merupakan indikator penting dan sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu daerah, khususnya kemajuan bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan kesejahteraan bayi/balita sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dimana orang tuanya bertempat tinggal serta tingkat sosial ekonomi orang tua tersebut. Untuk itu ada

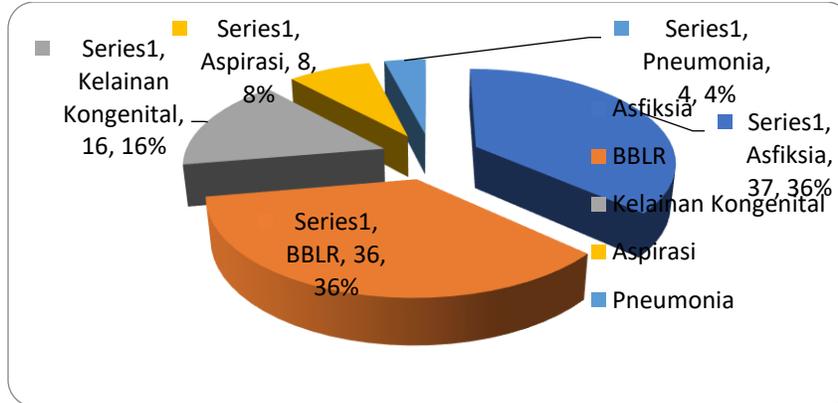
yang berpendapat bahwa taraf hidup kesehatan bayi/balita adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Hal ini dimungkinkan karena bagaimanapun juga anak-anak adalah generasi penerus yang merupakan sumber daya manusia guna menunjang pembangunan di masa mendatang.

Rata-rata anak lahir hidup merupakan perbandingan antara banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu dengan banyaknya ibu. Anak Lahir Hidup (ALH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok penduduk perempuan selama masa reproduksinya. Pengaruh umur pada paritas ALH mencerminkan pola hubungan yang positif, artinya, semakin tinggi umur perempuan, semakin banyak anak yang dimiliki, karena masa kemungkinan hamil semakin panjang (*time of exposure to risk*). Hubungan ini selain mencerminkan hubungan proses pembentukan keluarga, dapat juga memperlihatkan proses perubahan fertilitas antar waktu.

4.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0 – 12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Angka kematian bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 yaitu sebesar 10,34/ 1000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus 130 kasus, menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 12,83/1.000 kelahiran hidup. Lima besar penyebab kematian bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 adalah Asfiksia sejumlah 37 kasus (28,46%), BBLR sejumlah 36 kasus (27,69%) selanjutnya Kelainan kongenital 16 kasus (12,31%), aspirasi 8 kasus (6,15%), pneumonia 4 kasus (3,08%)



Gambar 4.1. Lima Besar Penyebab Kematian Bayi

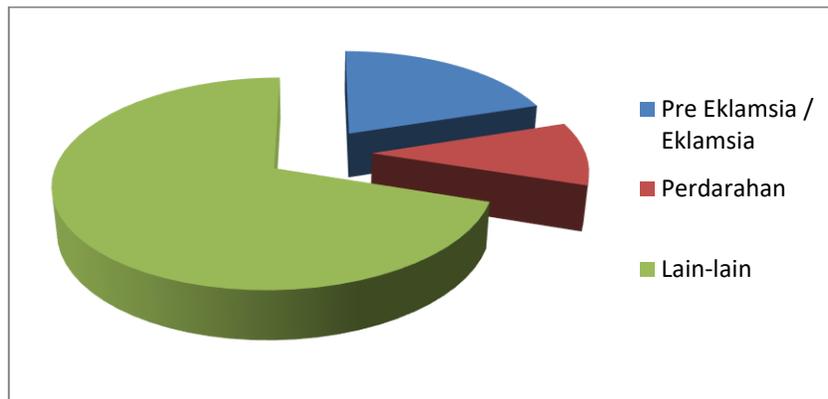
Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian bayi menjadi penting karena kematian bayi merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi menjadi prioritas utama dalam memberikan kontribusi terhadap penurunan AKB di kabupaten Wonosobo. Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum usia lima tahun. Jumlah kematian Anak Balita yang dilaporkan di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sejumlah 137 kasus, mengalami penurunan dibandingkan jumlah kematian tahun 2016 yaitu 178 kasus.

4.3. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan dari Bidang Pelayanan Kesehatan, kematian ibu di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 Angka Kematian Ibu ini sebesar 116,56 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus.

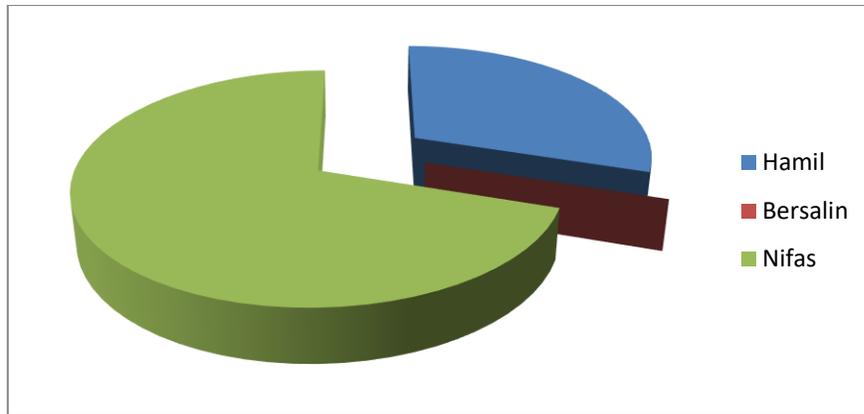
Sedangkan Pada tahun 2017 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi sebesar 79,54 per 100.000 Kelahiran hidup atau sejumlah 10 kasus yang

tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kepil 2 kasus, Leksono 1 kasus, Selomerto 1 kasus, Kertek 4 kasus, Wonosobo 1 kasus dan Watumalang 1 kasus dengan Penyebab langsung dan tidak langsung. Kematian ibu oleh sebab langsung ada 3 kasus, yaitu oleh sebab *Pre Eklamsia/ Eklamsia* 2 kasus (20%), perdarahan 1 kasus (10%), sedangkan kematian oleh sebab tidak langsung ada 7 kasus yaitu 1 kasus (10%) Kelaian Katup Jantung, 1 kasus (10%) *Peripartum Cardiomyopathy* (PPCM) yaitu gangguan pada otot jantung sehingga kekuatan memompa darah berkurang, 1 kasus (10%) Infeksi lambung dan bakteri dalam darah, 1 kasus (10%) *Sepsis Bronchopneumonia*, 3 kasus (30%) *TB Milier*. Distribusi kasus kematian ibu berdasarkan penyebab kematian ibu dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Kasus Kematian Ibu Tahun 2017 Berdasarkan Penyebab Kematian

Keadaan saat ibu meninggal terbagi dalam 3 waktu/ periode kematian yaitu hamil, melahirkan, sesudah melahirkan. Kejadian terbanyak pada waktu sesudah melahirkan sejumlah 7 Kasus (70%), pada waktu bersalin 0 kasus (0%) dan 3 kasus pada waktu hamil (30%). Kasus kematian ibu berdasarkan periode kematian dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Kasus Kematian Ibu Tahun 2017 Berdasarkan Periode Kematian

Kegiatan yang telah dilakukan untuk evaluasi kasus kematian ibu tahun 2017 antara lain :

1. Pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP)
2. Pengkajian AMP
3. Desiminasi kajian AMP
4. Pembinaan teknis kegawatdaruratan maternal neonatal di Puskesmas Poned dan pembinaan Kesehatan Keluarga
5. Penyediaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
6. Fasilitasi Teknis Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
7. Peningkatan Kualitas pelayanan antenatal

4.4. Gizi Buruk

Kasus gizi buruk berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) secara kumulatif selama tahun 2017 sebanyak 63 kasus dengan prevalensi kasus sebesar 0,12% (balita ditimbang = 51.590 balita). Bila dibandingkan dengan tahun 2016 (64 kasus) telah terjadi penurunan kasus sebesar 1,56% (1 kasus). Meskipun prevalensi kasus gizi buruk tidak mengalami perubahan bila dibanding tahun 2016 sebanyak 64 kasus dari 53.357 balita yang ditimbang (0,12%)

4.5. Angka Kesakitan

a. Angka “*Acute Flaccid Paralysis*” (AFP)

Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari Penyakit Polio, pemerintah telah melaksanakan Program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio rutin, pemberian imunisasi masal pada anak balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan surveilans AFP. Surveilans AFP adalah pengamatan dan penjarangan semua kelumpuhan yang terjadi secara mendadak dan sifatnya *flaccid* (layuh), seperti sifat kelumpuhan pada *poliomyelitis*.

Secara statistik jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan minimal 2 diantara 100.000 anak usia < 15 tahun. Tahun 2017 di Kabupaten Wonosobo menemukan penderita AFP non Polio sebanyak 11 kasus yang tersebar di Wilayah Kerja Puskesmas Wadaslintang 2 yaitu 2 kasus, Puskesmas Kepil 1 yaitu 1 kasus, Puskesmas Sapuran 1 kasus dan Puskesmas Leksono 1 yaitu 1 kasus, Puskesmas Selomerto 1 yaitu 1 Kasus, Selomerto 2 yaitu 1 kasus, Kertek 1 yaitu 2 Kasus, Kertek 2 yaitu 2 Kasus, Mojotengah 1 kasus. Setelah dilakukan Evaluasi kunjungan 60 hari semua kasus dalam keadaan membaik. Sedangkan tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo menemukan penderita AFP non Polio sebanyak 5 kasus.

Kenaikan penemuan kasus AFP tersebut dikarenakan surveilans PD3I berjalan dengan bagus dimana satu puskesmas ditargetkan menemukan 1 kasus AFP.

b. Angka Penemuan Penderita TB

Case Notification Rate (CNR) atau jumlah semua kasus TB yang dilaporkan di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebesar 183,91 / 100.000 penduduk sedangkan CNR 2016 sebesar 133,55 / 100.000 penduduk. Kenaikan angka CNR didukung oleh semakin meningkatnya surveilans TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Wonosobo dan kegiatan skrining TB di Wilayah

Puskesmas dan Jaringannya. Keberhasilan pelaksanaan Program penanggulangan TB paru dapat diukur dari pencapaian angka keberhasilan pengobatan penderita TB (*Succses Rate*). Angka keberhasilan pengobatan penderita TB tahun 2016 sebesar 88,66 % sedangkan capaian angka keberhasilan pengobatan TB tahun 2015 sebesar 92,21%.

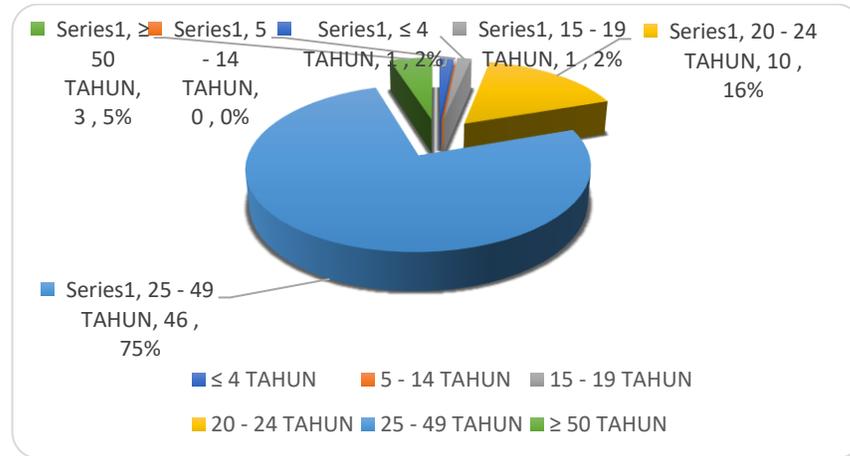
c. Persentase Balita dengan Pnemonia Ditangani

Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 50,75 % mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 99 %. Peningkatan capaian target di tahun 2017 didukung oleh 1. Refresing deteksi dini dan tatalaksana pneumoni kepada dokter puskesmas, bidan koordinator dan pemegang program pneumonia seluruh puskesmas di Kabupaten Wonosobo dan RS se Kabupaten Wonosobo, 2. Mengaktifkan Poli MTBS di Puskesmas se Kabupaten Wonosobo, 3. Perubahan target perhitungan penemuan penderita Pneumoni Balita dari 5% menjadi 3,61% dari jumlah penduduk.

d. Jumlah Kasus HIV/AIDS

Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebanyak 85 kasus dengan kasus terbanyak pada kelompok umur 25-49 tahun yaitu 52 kasus mengalami kenaikan apabila dilihat pada tahun 2016 sebanyak 61 kasus. Pada dua tahun terakhir kasus terbanyak pada kelompok umur 25-49 tahun hal ini dikarenakan kelompok umur tersebut adalah kelompok umur produktif dengan mobilitas yang tinggi dan akses ke pelayanan kesehatan tinggi juga. Kejadian HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es dimana kasus yang sudah ditemukan merupakan bagian kecil dari kasus keseluruhan. Untuk meningkatkan penemuan kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo membuat kebijakan semua puskesmas melaksanakan Provider Inisiatif Testing And Counselling (PITC) yaitu tes HIV yang berdasarkan inisiatif dari tenaga kesehatan, selain itu juga melaksanakan

kegiatan VCT Mobile pada poulasi beresiko HIV. Distribusi Kasus HIV/AIDS menurut kelompok Umur Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4.4. pada halaman berikutnya.



Gambar 4.4. Kasus HIV/AIDS Menurut Golongan Umur, 2017

e. Angka Kesakitan DBD

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebanyak 21 kasus dengan Incidence Rate (IR) sebesar 2,7/100.000 penduduk, mengalami penurunan dari kasus tahun 2016 yang sebanyak 176 kasus dengan Incidence Rate (IR) sebesar 22,6/100.000 penduduk. Penurunan ini dikarenakan oleh beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung atau pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PSN.

f. Persentase Diare Ditangani

Perkiraan penemuan diare di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebanyak 16.706 dan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani sebanyak 13.878 kasus (83,1%), angka ini mengalami penurunan angka absolut penemuan akan tetapi mengalami kenaikan persentase dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu kasus dikarenakan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan dari tingkat puskesmas sampai tingkat kabupaten. Pemberian Buku Pedoman Tata Laksana Diare Tahun 2017 kepada semua puskesmas sebagai upaya refresing kepada

petugas kesehatan puskesmas dalam menemukan kasus diare sehingga petugas termotifasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

g. Penemuan Kasus Kusta

Kasus Kusta di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebanyak 15 kasus terdiri dari 12 kasus kusta MB (Multi Basiler) dan 3 kasus PB (Pausi Basiler). Penemuan tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 yang sebanyak 4 kasus peningkatan penemuan kasus kusta ini didukung oleh 1) pelaksanaan skrining deteksi dini penemuan kusta di 2 desa dari 2 Puskesmas yaitu Desa Simbang Puskesmas Kalikajar 1 dan Desa Gadingrejo Puskemas Kepil 1, 2) Pembentukan kelompok perawatan diri di Desa Simbang Puskesmas Kalikajar 1, 3) Refresing deteksi dini dan tata laksana kusta kepada Dokter Puskesmas dan Programer Kusta se Kabupaten Wonosobo dan perwakilan Dokter RS Se Kabupten Wonosobo.

h. Angka Kesakitan Malaria

Penyakit malaria masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 9 kasus malaria import, API (*Annual Parasit Incident*) atau angka kesakitan malaria sebesar 0,01. Angka ini mengalami penurunan dibanding dengan kasus tahun 2016 sebanyak 18 kasus. Semua kasus malaria yang ditemukan di Wonosobo seluruhnya adalah kasus import. Penurunan kasus ini disebabkan oleh mobilitas penduduk yang menurun di tahun 2017.

i. Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Penyakit yang termasuk PD3I adalah Polio, Campak, Difteri dan Tetanus Neonatorum. Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit tersebut, diperlukan komitmen global untuk menekan turunnya angka

kesakitan dan kematian yang lebih banyak dikenal dengan Eradikasi Polio (ERAPO), Redukasi Campak (Redcam) dan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN).

Saat ini telah dilaksanakan Program Surveilans Integrasi PD3I, yaitu pengamatan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Difteri, Tetanus Neonatorum, dan Campak). Tahun 2017 kasus PD3I yang ada hanya Campak Klinis sebanyak 184 kasus sedangkan tahun 2016 kasus PD3I yang ada juga hanya Campak Klinis sebanyak 280 kasus.

j. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) yang diintervensi meliputi jantung koroner, dekompensasio kordis, hipertensi, stroke, diabetes militus, kanker serviks, kanker payudara, kanker hati, kanker paru, penyakit paru obstruktif kronis, asma bronkiale dan kecelakaan lalu lintas. Penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, stroke, diabetes militus, penyakit paru obstruktif kronis dan kanker tertentu, dalam kesehatan masyarakat sebenarnya dapat digolongkan sebagai satu kelompok PTM utama yang mempunyai factor risiko sama (*common underlying risk factor*). Factor risiko tersebut antara lain factor genetik merupakan faktor yang tidak dapat diubah (*unchanged risk factor*), dan sebagian besar berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diubah (*changed risk factor*) antara lain konsumsi rokok, pola makan yang tidak seimbang, makanan yang mengandung zat aditif, kurang berolah raga dan adanya kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap kesehatan.

Penyakit tidak menular mempunyai dampak negatif sangat besar karena merupakan penyakit kronis. Apabila seseorang menderita penyakit tidak menular, berbagai tingkatan produktifitas menjadi terganggu. Penderita ini menjadi serba terbatas aktifitasnya, karena menyesuaikan diri dengan jenis dan gradasi dari penyakit tidak menular yang dideritanya. Hal ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan tidak diketahui kapan sembuhnya karena memang secara medis penyakit tidak menular tidak bisa disembuhkan tetapi hanya bisa

dikendalikan. Sampai saat ini yang harus mendapat perhatian lebih adalah bahwa penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian tertinggi dibanding dengan penyakit menular.

Beberapa penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan adalah :

1) Hipertensi

Hipertensi atau sering disebut dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke (terjadi pada otak dan berdampak pada kematian yang tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi pada kerusakan pembuluh darah jantung) serta penyempitan ventrikel kiri/bilik kiri (terjadi pada otot jantung).

Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai diantara penyakit tidak menular lainnya. Hipertensi menempati urutan pertama pada 10 besar penyakit tidak menular di Kabupaten Wonosobo. Prevalensi kasus hipertensi di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebesar 3,8 % dengan jumlah kasus sebanyak 20.987 kasus meningkat dari jumlah kasus di tahun 2016 sebanyak 5.665 kasus. Peningkatan ini didukung oleh kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular melalui Posbindu dan Pelayanan Terpadu PTM di Fasilitas Kesehatan.

2) Kecelakaan Lalu Lintas

Penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.796 kasus meningkat dari kasus yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 966 kasus.

3) Diebetus Militus

Diabetes Mellitus (DM) atau kencing manis adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin, baik absolute maupun relatif. Absolute artinya pancreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin sehingga harus mendapatkan insulin dari luar (melalui suntikan) dan relatif artinya pancreas masih bisa menghasilkan insulin yang kadarnya berbeda pada setiap orang. DM merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan. DM itu sendiri menempati urutan ketiga pada 10 besar penyakit tidak menular di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dengan jumlah penderita sebanyak 3.408 penderita, dengan rincian DM Tipe 1 (tergantung insulin) sebanyak 161 kasus dan DM Tipe 2 (tidak tergantung insulin) sebanyak 3.247 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah kasus DM Tipe 1 tahun 2016 sebanyak 55 kasus dan DM tipe 2 sebanyak 844 kasus. Pada DM Tipe 2 sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan melalui gaya hidup sehat. Upaya yang dilakukan dalam penurunan kasus DM tersebut adalah kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko DM melalui kegiatan Posbindu PTM.

4) Asma Bronkial

*Asma Bronkiol*e terjadi akibat penyempitan jalan napas yang *reversible* dalam waktu singkat oleh karena mucus kental, spasme dan *edema mukosa* serta *deskuamasi epitel bronkus/bronkelolus*, akibat *inflamasi eosinofilik* dengan kepekaan yang berlebihan. Jumlah kasus *asma bronkiol*e di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebanyak 796 kasus sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 472.

5) Kanker Leher Rahim (Ca Servic)

Kanker Leher Rahim adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita, hampir semua kasus kanker leher rahim disebabkan oleh Virus HPV (*Human Papilloma Virus*). Wanita berusia 30-50 tahun berisiko menderita kanker leher rahim terutama yang aktif secara seksual. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan melalui pemeriksaan IVA (infeksi visual asamasetat). Pada tahun 2017 ditemukan IVA positif sebanyak 32 orang. Upaya untuk meningkatkan target sasaran melalui sosialisasi, penggerakan sasaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker leher rahim.

4.6. Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Persentase Kunjungan Neonatus

Kunjungan Neonatus (KN) adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan ke rumah ibu bersalin, untuk memantau dan memberi pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayinya. Jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini adalah pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif. Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam - 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir. Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap

bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, 1 kali pada 8-28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja pada satu tahun. Persentase KN 1 di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 99,35 %, turun menjadi 99,25 % ditahun 2017. Sedangkan Persentase KN lengkap tahun 2017 sebesar 98,63 %, naik di bandingkan tahun 2016 yaitu 97,79 %. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan implementasi kunjungan neonatal dengan MTBM dan kunjungan nifas dengan anggaran APBD Propinsi.

2. Persentase Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten, paling sedikit 4 kali (1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6 sampai 8 bulan, 1 kali pada umur 9 sampai 11 bulan) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 96,8% mengalami penurunan dibanding pada tahun 2016 sebesar 101%. Hal ini dikarenakan jumlah bayi yang pada akhir tahun 2017 belum mencapai umur 9 bulan lebih banyak daripada tahun 2016.

3. Balita dengan Gizi Buruk

Prevalensi kasus gizi buruk tahun 2017 sebanyak 63 kasus (0,101%). Ada penurunan kasus sebanyak 1 kasus (0,001%) dari tahun 2016 sebanyak 64 (0,102%) menjadi 63 kasus Upaya yang sudah dilakukan dengan memberikan perawatan gizi buruk baik rawat inap maupun rawat jalan dan pemberian PMT baik sumberdana dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun dari anggaran ADD. Pembekalan kader sebagai tenaga penyuluh di masyarakat juga sudah dilakukan dengan melalui kegiatan Sosialisasi Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi Kader. Rencana tindak lanjut kedepan akan dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) kasus Gizi buruk untuk mencari penyebab Gizi Buruk tersebut sehingga intervensinya lebih tepat.

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang telah dianjurkan, dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Setiap kehamilan dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit dan komplikasi oleh karena itu pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, terpadu dan sesuai standar pelayanan antenatal yang berkualitas.

Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu;

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
- b. Pengukuran tekanan darah;
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi;
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);

- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk Keluarga Berencana);
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya);
- j. Tatalaksana kasus

Pelayanan/pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil sesuai standar pada masa kehamilan oleh tenaga kesehatan terampil (dokter, bidan atau perawat) 4 kali dengan interval 1 kali pada trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga, akan menggambarkan cakupan pelayanan antenatal ibu hamil yang dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan ibu hamil K1 dan K4.

Cakupan kunjungan ibu hamil pertama (K1) di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebesar 99,98% mengalami sedikit penurunan di dibandingkan dengan cakupan kunjungan ibu hamil pertama (K1) tahun 2016 sebesar 99,99% sedangkan untuk kunjungan keempat (K4) tahun 2017 sebesar 89,37% juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kunjungan keempat (K4) tahun 2016 yang sebesar 90,27 %.

5. Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Pn). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 yaitu sebesar 99,94 %, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 99,82 %. Cakupan Pn Kabupaten Wonosobo sudah berada di atas target Renstra yang ditetapkan yaitu 98 persen. Masih diperlukan upaya-upaya agar cakupan Pn dapat ditingkatkan lagi menjadi 100% sesuai target Renstra yang dicapai ditahun mendatang.

6. Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari paska persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu;

- a. Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan.
- b. Kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8-14 hari)
- c. Kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari)

Pelayanan nifas meliputi pemberian vitamin A dosis tinggi ibu nifas yang kedua dan pemeriksaan kesehatan pasca persalinan untuk mengetahui apakah ada terjadi perdarahan pasca persalinan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit dan lain-lain. Kunjungan terhadap ibu nifas yang dilakukan petugas kesehatan biasanya bersamaan dengan kunjungan neonatus.

Cakupan pelayanan ibu nifas di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebesar 98,30 % dan apabila di dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2016 sebesar 99,49% mengalami penurunan yang cukup signifikan.

7. Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe

Program penanggulangan anemia yang dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah yaitu preparat Fe yang bertujuan untuk menurunkan angka anemia pada anak balita, ibu hamil, ibu nifas, remaja putri dan Wanita Usia Subur.

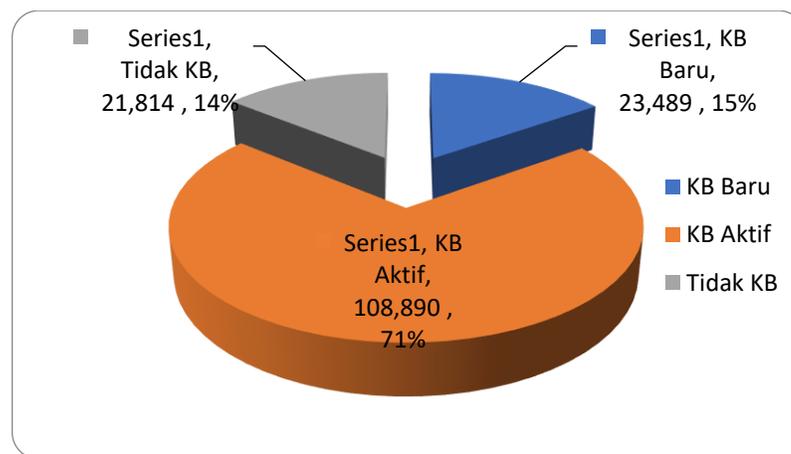
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan table Fe pada tahun 2017 adalah Fe1 sejumlah 13.221 ibu hamil (96,75%) dan Fe3 sebanyak 12.302 ibu hamil (89,93%) sedangkan ibu hamil yang mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi

sejumlah 12.533 (99,97%). Sedangkan pada tahun 2016 adalah Fe1 sejumlah 13.490 ibu hamil (96,75%) dan Fe3 sejumlah 12.890 ibu hamil (92,45%) sedangkan ibu hamil yang mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi sejumlah 12.836 (99,79%).

8. Pelayanan Keluarga Berencana

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebanyak 167.357 yang merupakan peserta KB baru sebanyak 23.800 (14,22%) dan peserta KB aktif sebanyak 134.651 (80,46%).

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 sebanyak 165.656 yang merupakan peserta KB baru sebanyak 25.083 (15,14%) dan peserta KB aktif sebanyak 123.135 (74,33%). Kepesertaan KB pada PUS di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Kepesertaan KB pada PUS Tahun 2017

9. Pelayanan Imunisasi Anak

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B, dan Campak. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri

dari BCG 1 kali, DPT-HB–HiB 3 kali, Polio 4 kali, HB unijekt 1 kali dan campak 1 kali. Sebagai indicator kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari hasil cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi umur 9 bulan dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap (HB, BCG, DPT-HB-HiB, Polio dan Campak).

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dari jumlah bayi 12.572 sebesar 95,53%. Sedangkan capaian perantigen adalah sebagai berikut :

- a. BCG : 12.543 (99,77%),
- b. DPT3-HB-HiB 3 : 12.594(100%),
- c. Polio 4 : 12.554 (99,85%),
- d. Campak : 12.039 (95,76%).

Sedangkan Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 dari jumlah bayi 12.869 adalah 101.83%. Sedangkan capaian perantigen adalah sebagai berikut :

- a. BCG : 13.184 (102,45%),
- b. DPT3-HB-HiB 3 : 12.963 (102%),
- c. Polio 4 : 12.884 (100,9%),
- d. Campak : 12.998 (101,8%).

Desa UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu desa yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya minimal 80 %. Desa UCI di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebanyak 265 desa (100%).

10. Pelayanan Kesehatan Gigi

Pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan kesehatan dasar gigi dan kesehatan gigi sekolah. Kegiatan pelayanan dasar gigi adalah tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap.

Cakupan pelayanan dasar gigi di Puskesmas untuk tumpatan gigi tetap tahun 2017 sebanyak 3.667 kasus, pencabutan gigi tetap sebanyak 7.609 kasus dan rasio tambal/cabut sebesar 0,48%. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 3.286 kasus, pencabutan gigi tetap sebanyak 6.144 kasus dan rasio tambal/cabut sebesar 0,53%.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 yang sudah terfasilitasi Jaminan Kesehatan baik menggunakan APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten sejumlah 414.390 jiwa.

12. Kejadian Luar Biasa (KLB)

Tahun 2017 di kabupaten Wonosobo terjadi KLB sebanyak 5 kejadian dengan rincian 1 kali KLB Rubella, 1 kali KLB Diare, 2 kali KLB Tersangka Difteri, 1 kali KLB Keracunan makanan. Lima kejadian KLB tersebut terjadi di Kecamatan Sapuran, Kaliwiro, Wonosobo dan Garung. Semua Kejadian Luar Biasa pada tahun 2017 sudah dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan sudah ditangani kurang dari 24 jam.

4.7. Sumber Daya Kesehatan

1. Tenaga Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fisik dan penambahan sarana dan prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan. Namun dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karakteristik dan fungsi tenaganya.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 terdiri dari tenaga medis (141 orang), bidan (415 orang), perawat (599 orang), farmasi (91 orang), gizi (32 orang), kesehatan masyarakat (40 orang), teknisi medis (64

orang), dan sanitasi (32 orang) yang tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro, Rumah Sakit Islam Wonosobo, PKU Wonosobo, ADINA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

2. Sarana Kesehatan

- a. Pada tahun 2017 jumlah Puskesmas di Kabupaten Wonosobo adalah 24 Puskesmas, yang terdiri dari 16 Puskesmas tanpa rawat inap dan 8 Puskesmas dengan rawat inap. Dari 24 puskesmas di Kabupaten Wonosobo sudah terakreditasi 17 Puskesmas dengan strata : Paripurna 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Kaliwiro, Utama 2 Puskesmas yaitu Kalikajar 1, Selomerto 1, Strata Madya 8 Puskesmas yaitu Leksono 1, Wonosobo 1, Garung, Kejajar 1, Sapuran, Kalikajar 2, Kalibawang, Kepil 1, Strata Dasar 5 Puskesmas yaitu Wadaslintang 1, Mojotengah, Watumalang, Kertek II, Sukoharjo 1. Sedangkan Puskesmas Pembantu sebanyak 44 buah dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 209 buah serta Puskesmas Keliling sebanyak 24 buah.
- b. Rumah Sakit Umum di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebanyak 4 buah, yaitu RSUD KRT Setjonegoro RSUD milik pemerintah 1 buah dengan Strata Akreditasi Paripurna dan RSUD milik swasta 2 buah yaitu RSI Wonosobo dengan Strata Akreditasi Madya dan PKU Wonosobo dengan Strata Akreditasi Paripurna, sedangkan rumah sakit khusus kelas C ada 1 buah yaitu Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak ADINA.

BAB 5

Penduduk

BAB V

PENDUDUK

5.1. Jumlah Penduduk

Penduduk dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Pemahaman tentang keadaan kependudukan bagi instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian serta masyarakat umum sangatlah penting. Dalam rangka mempermudah pemahaman tentang kependudukan, perlu diketahui konsep dan definisi tentang penduduk. Penduduk adalah seseorang yang tinggal/berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang tinggal/berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Ukuran tentang jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan suatu wilayah pada tahun tertentu. Jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambah sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk akan bersifat penambah dan penduduk yang keluar bersifat pengurang. Dengan demikian jumlah penduduk dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$P_t = P_0 + B - D + M_t$$

dimana :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar

B = Jumlah kelahiran pada tahun t

D = Jumlah kematian pada tahun t

M_t = Jumlah penduduk yang masuk di tahun t dikurangi jumlah penduduk yang keluar di tahun t

Tabel 5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2017

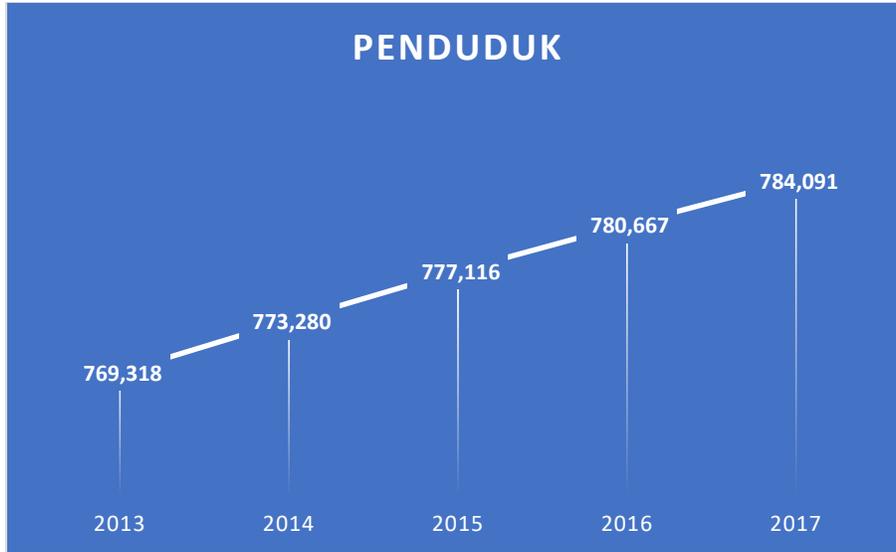
No.	Kecamatan	2012			2013		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Wadaslintang	26,474	27,096	53,570	26,346	26,954	53,300
2	Kepil	28,942	28,975	57,917	28,803	28,823	57,626
3	Sapuran	28,046	27,411	55,457	28,043	27,437	55,480
4	Kalibawang	11,473	11,328	22,801	11,418	11,270	22,688
5	Kaliwiro	22,654	22,659	45,313	22,546	22,538	45,084
6	Leksono	20,398	19,833	40,231	20,370	19,769	40,139
7	Sukoharjo	16,327	15,448	31,775	16,325	15,406	31,731
8	Selomerto	23,371	22,603	45,974	23,346	22,525	45,871
9	Kalikajar	29,614	29,028	58,642	29,472	28,875	58,347
10	Kertek	39,710	38,172	77,882	39,670	38,139	77,809
11	Wonosobo	43,354	42,722	86,076	43,458	42,797	86,255
12	Watumalang	25,030	24,016	49,046	24,910	23,890	48,800
13	Mojotengah	30,326	28,198	58,524	30,329	28,218	58,547
14	Garung	24,834	23,517	48,351	24,747	23,381	48,128
15	Kejajar	21,329	20,355	41,684	21,301	20,288	41,589
	Jumlah	391,882	381,361	773,243	391,084	380,310	771,394

Tabel 5.1. Lanjutan

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Wadaslintang	25,718	26,319	52,037	25,770	26,372	52,142
2	Kepil	28,437	28,440	56,877	28,495	28,497	56,992
3	Sapuran	28,020	27,453	55,473	28,198	27,626	55,824
4	Kalibawang	11,343	11,199	22,542	11,366	11,222	22,588
5	Kaliwiro	22,266	22,255	44,521	22,311	22,300	44,611
6	Leksono	20,467	19,842	40,309	20,593	19,963	40,556
7	Sukoharjo	16,636	15,694	32,330	16,762	15,812	32,574
8	Selomerto	23,483	22,718	46,201	23,632	22,862	46,494
9	Kalikajar	29,418	28,765	58,183	29,478	28,824	58,302
10	Kertek	39,949	38,489	78,438	40,171	38,703	78,874
11	Wonosobo	43,441	42,701	86,142	43,862	43,115	86,977
12	Watumalang	25,097	24,069	49,166	25,148	24,118	49,266
13	Mojotengah	31,047	28,926	59,973	31,252	29,116	60,368
14	Garung	25,122	23,812	48,934	25,223	23,908	49,131
15	Kejajar	21,573	20,581	42,154	21,707	20,710	42,417
	Jumlah	392,017	381,263	773,280	393,968	383,148	777,116

Tabel 5.1. Lanjutan

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Wadaslintang	25,809	26,419	52,228	25,844	26,460	52,304
2	Kepil	28,537	28,548	57,085	28,576	28,592	57,168
3	Sapuran	28,362	27,795	56,157	28,522	27,958	56,480
4	Kalibawang	11,384	11,242	22,626	11,399	11,260	22,659
5	Kaliwiro	22,344	22,339	44,683	22,374	22,374	44,748
6	Leksono	20,708	20,081	40,789	20,821	28,522	41,016
7	Sukoharjo	16,879	15,928	32,807	16,995	16,040	33,035
8	Selomerto	23,769	23,001	46,770	23,903	23,135	47,038
9	Kalikajar	29,522	28,875	58,397	29,562	28,919	58,481
10	Kertek	40,372	38,908	79,280	40,569	39,104	79,673
11	Wonosobo	44,264	43,523	87,787	44,662	43,923	88,585
12	Watumalang	25,185	24,161	49,346	25,219	24,198	49,417
13	Mojotengah	31,440	29,300	60,740	31,625	29,479	61,104
14	Garung	25,310	23,997	49,307	25,394	24,082	49,476
15	Kejajar	21,831	20,834	42,665	21,953	20,954	42,907
	Jumlah	391,706	384,951	780,667	397,418	386,673	784,091



Sumber: Daerah Dalam Angka 2017

Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Wonosobo Tahun 2013 - 2017

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari 769.218 jiwa pada tahun 2013 menjadi 784.091 jiwa pada tahun 2017. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo secara alami dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

5.2. Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah jumlah penduduk disuatu wilayah pada tahun tertentu dibagi dengan luas wilayahnya. Tingkat kepadatan penduduk dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PD = \frac{P}{W}$$

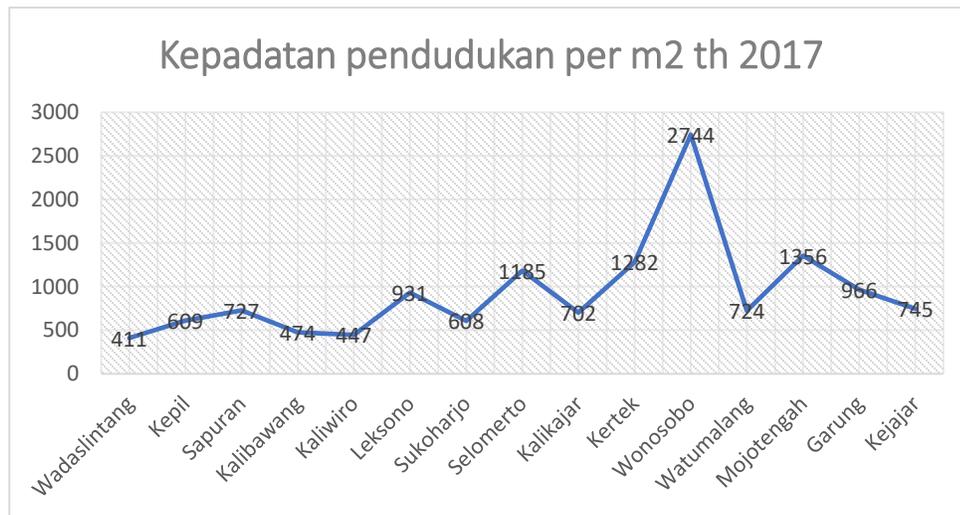
dimana:

PD = Tingkat kepadatan penduduk

P = Jumlah penduduk pada tahun t

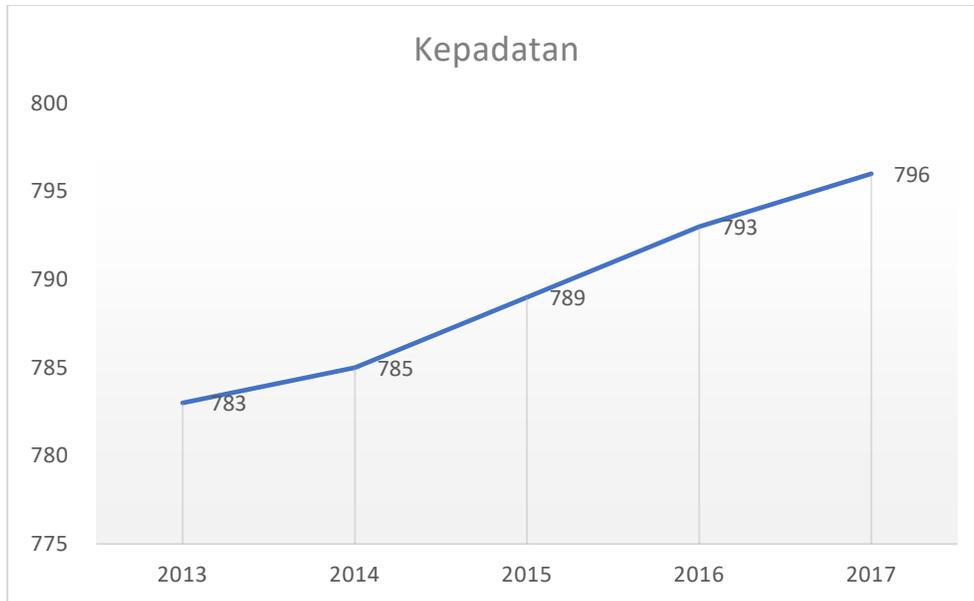
W = Luas wilayah (km²)

Perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 793 jiwa/km² menjadi 796 jiwa/ km² pada tahun 2017. Wilayah kecamatan dengan kepadatan tertinggi masih didominasi oleh wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Wonosobo dengan kepadatan penduduk sebesar 2.744 jiwa/ km² pada tahun 2017. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : ketersediaan fasilitas pelayanan yang lengkap dibandingkan kecamatan lainnya, pusat kegiatan (pemerintahan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).



Sumber: Daerah Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 5.2. Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017



Sumber: Daerah Dalam Angka 2017

**Gambar 5.3. Perkembangan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017**

Tabel 5.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan, Tahun 2017

Kecamatan	Prosentase penduduk	jumlah	Kepadatan pendudukan per m2
Wadaslintang	6.67	52,304	411
Kepil	7.29	57,168	609
Sapuran	7.20	56,480	727
Kalibawang	2.89	22,659	474
Kaliwiro	5.71	44,748	447
Leksono	5.23	41,016	931
Sukoharjo	4.21	33,035	608
Selomerto	6.00	47,038	1185
Kalikajar	7.46	58,481	702
Kertek	10.16	79,673	1282
Wonosobo	11.30	88,585	2744
Watumalang	6.30	49,417	724
Mojotengah	7.79	61,104	1356
Garung	6.31	49,476	966
Kejajar	5.47	42,907	745
Jumlah 2017	99.99	784,091	796

Sumber : Wonosobo Dalam Angka 2017

5.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Komposisi penduduk dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut Rasio Jenis kelamin atau *Sex Ratio* (SR). Untuk keperluan perencanaan SR juga merupakan informasi yang cukup penting. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$SR = \frac{L}{P} \times 100$$

dimana :

L = Penduduk laki-laki

P = Penduduk perempuan

Rasio jenis kelamin berbeda antar kelompok umur, umumnya pada kelompok umur muda SR diatas 100 artinya lebih banyak bayi laki-laki dibanding perempuan. Pada kelompok umur tua biasanya SR kurang dari 100 artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Fenomena ini terjadi antara lain disebabkan karena rata-rata usia harapan hidup (*life expectancy*) perempuan lebih panjang dibanding laki-laki. SR juga bervariasi menurut wilayah atau antara daerah perkotaan dan perdesaan

Tabel 5.3. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan, 2013-2017

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Wadaslintang	25.844	26.460	97.67
Kepil	28.576	28.592	99.94
Sapuran	28.522	27.958	102.02
Kalibawang	11.399	11.260	101.23
Kaliwiro	22.374	22.374	100.00
Leksono	20.821	20.195	103.10
Sukoharjo	16.995	16.040	105.95
Selomerto	23.903	23.135	103.32
Kalikajar	29.562	28.919	102.22
Kertek	40.264	38.908	103.76
Wonosobo	44.662	43.923	101.68
Watumalang	25.219	24.198	104.22
Mojotengah	31.625	29.479	107.28
Garung	25.394	24.082	105.45
Kejajar	21.953	20.954	104.77
Jumlah	397.418	386.673	102.78

Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka 2018



Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka 2018

Gambar 5.4. Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017

Berdasarkan Gambar 5.4 di atas dapat terlihat rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2013, rasio jenis kelamin sebesar 102,83 menjadi 102,78 pada tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa persentase kenaikan jumlah penduduk laki-laki mengalami kenaikan dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk perempuan.

5.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin

Selain jumlah dan kepadatan, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Informasi mengenai umur dan jenis kelamin sangat penting karena informasi mengenai demografi, sosial dan ekonomi sangat berbeda antar kelompok umur dan jenis kelamin. Misalnya, perbedaan jumlah kelahiran menurut jenis kelamin, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi laki-laki lebih banyak dari bayi perempuan. Untuk kematian, terjadi perbedaan angka harapan hidup waktu lahir antara laki-laki

dan perempuan, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Selain itu juga ditemukan perbedaan tingkat kematian menurut umur. Anak balita dan lansia mempunyai resiko kematian yang lebih tinggi dari pada kelompok umur lainnya. Perpindahan penduduk paling banyak dilakukan oleh penduduk kelompok umur 20 – 29 tahun daripada kelompok umur lainnya dan laki-laki cenderung untuk melakukan perpindahan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk juga berbeda menurut kelompok umur dan jenis kelamin, misal tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja.

a. Struktur Umur Penduduk

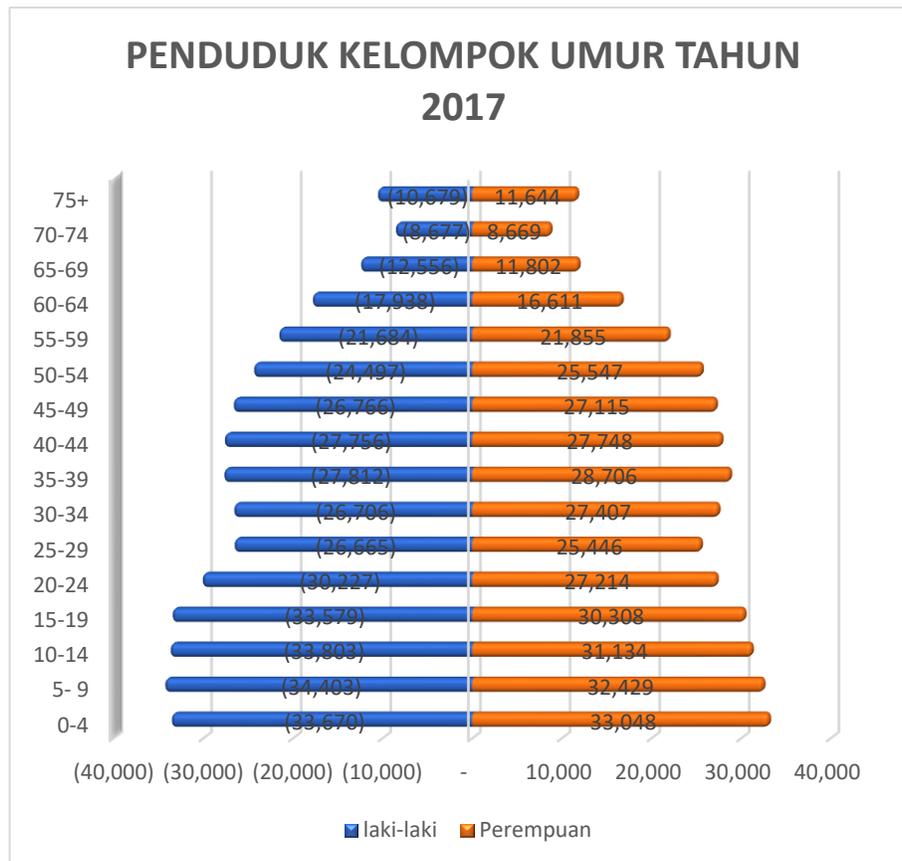
Struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. Misal fasilitas kesehatan untuk balita berbeda dengan lansia. Untuk balita cenderung pada peningkatan gizi dan imunisasi sedangkan untuk lansia cenderung ke arah perawatan penyakit kronis.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menggambarkan struktur penduduk menurut umur, diantaranya adalah dengan distribusi frekuensi, distribusi persentase, rasio dan gambar batang atau piramida penduduk.

b. Piramida Penduduk

Cara lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk adalah dengan piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan dengan jelas distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Tingginya setiap batang piramida menggambarkan kelompok umur dan panjangnya dari setiap batang piramida menunjukkan jumlah penduduk dari kelompok umur tersebut. Untuk membuat piramida penduduk dapat digunakan persentase distribusi penduduk atau frekuensi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Persentase distribusi ini dihitung terhadap total penduduk. Piramida penduduk menunjukkan tingkat perkembangan penduduk untuk setiap kelompok umur yang berbeda, dalam

beberapa kelompok umur bisa saja terlihat pertumbuhan yang menurun. Fluktuasi dalam piramida penduduk paling banyak dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dari setiap kelompok umur (kohor penduduk) selain tingkat kematian dan migrasi. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran yang tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Berdasarkan Gambar 5.6 di bawah dapat terlihat bahwa komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam **kelompok ekspansif**, dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda.



Sumber :BPS Kabupaten Wonosobo, 2017

Gambar 5.5. Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo, 2017

c. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Angka Ketergantungan adalah jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0–14 tahun dan 65 tahun keatas terhadap penduduk kelompok umur 15–64 tahun. DR secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas).

Dependency Ratio (DR) diformulasikan sebagai berikut :

$$DR = ((P_{<15} + P_{65+}) / P_{15-64}) \times 100$$

dimana:

$P_{<15}$ = Jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun

P_{65+} = Jumlah penduduk 65 tahun keatas

P_{15-64} = Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun

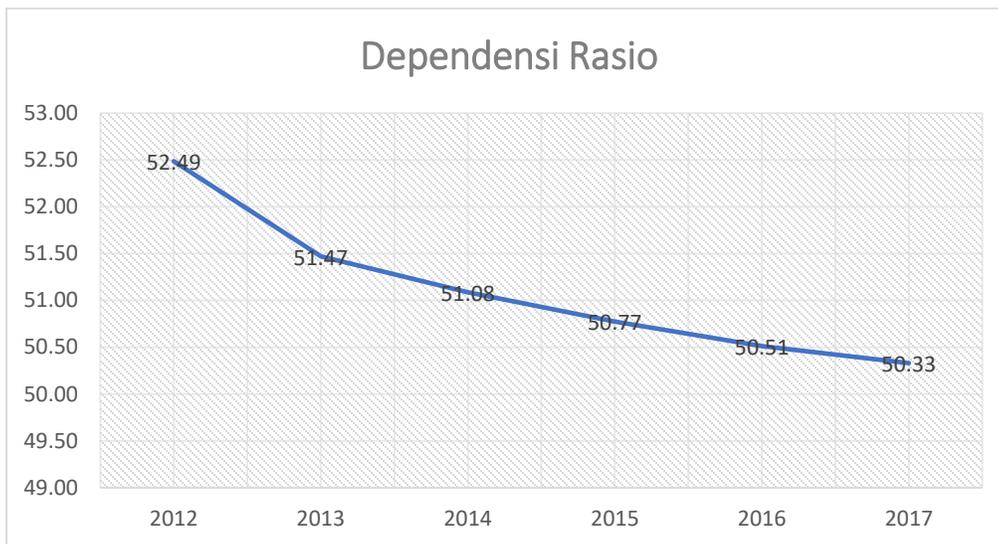
Tabel 5.4. Persentase Komposisi Umur Penduduk dan *Dependency Ratio* (DR) di Kabupaten Wonosobo, 2012- 2017

Tahun	Umur (tahun)			Jumlah	Dependensi Rasio
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	27.06	65.58	7,36	100,00	52.47
2013	27.62	66,02	7,36	100,00	51.47
2014	26,29	66,19	7,52	100,00	51,08
2015	25,96	66,33	7,72	100,00	50,77
2016	25,63	66,44	7,93	100,00	50,51
2017	25.31	66.52	8.17	100,00	50.33

Sumber :BPS, Wonosobo Dalam Angka 2018

Komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 digolongkan penduduk produktif karena 66,52 persen penduduk berumur 15 – 64 tahun. Dengan komposisi umur penduduk seperti yang terlihat pada Tabel 5.4, angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Wonosobo sebesar 50,53 persen pada tahun 2017, yang berarti setiap sejumlah 100 penduduk usia produktif harus menanggung 50 penduduk usia non produktif (usia anak-anak dan penduduk usia lanjut). Angka beban tanggungan di Kabupaten Wonosobo tersebut dapat digolongkan sedang.

Angka beban tanggungan pada tahun 2017 masih relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 52,49 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kelahiran dan kematian di tahun 2013 masih cukup tinggi. Dengan artian bahwa di tahun 2016 makin sedikit penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



**Gambar 5.7. Perkembangan DR di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2012 - 2017**

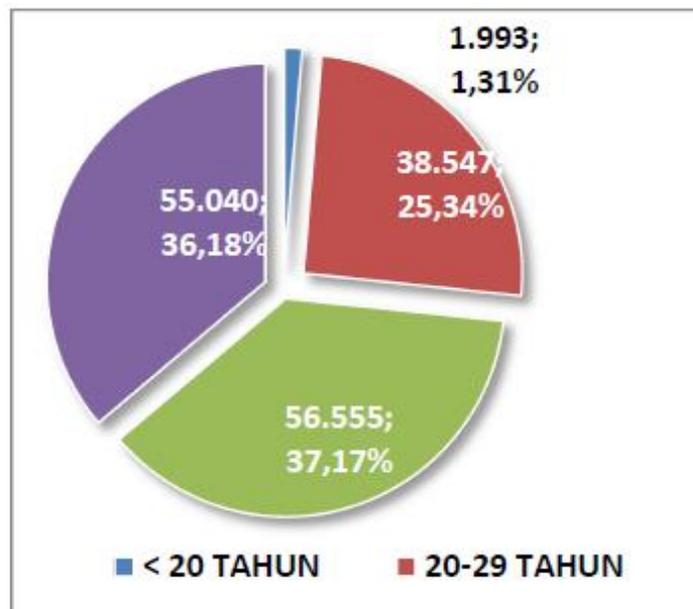
5.5. Aspek Keluarga Berencana

1. Pasangan Usia Subur (PUS)

Berdasarkan hasil update data keluarga pada tahun 2017 dari sejumlah 256.045 kepala keluarga yang ada, terdapat Pasangan Usia Subur atau PUS sejumlah 152.135 atau 59,42%.

Jika di kelompokkan berdasarkan usia ibu/ istri diketahui:

- a. Usia < 20 tahun : 1.993 PUS (1,31%)
- b. Usia 20-29 tahun : 38.547 PUS (25,34%)
- c. Usia 30-39 tahun : 56.555 PUS (37,17%)
- d. Usia 40-49 tahun : 55.040 PUS (36,18%)



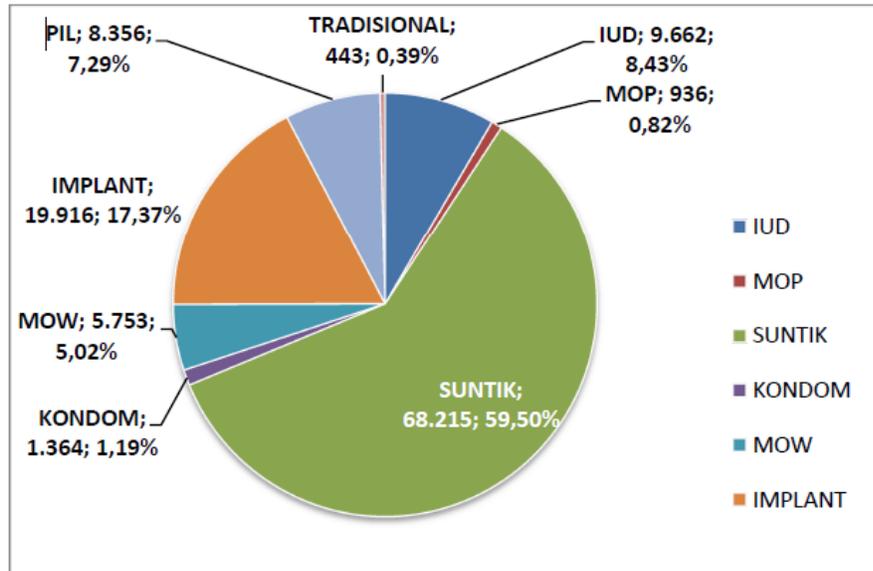
Sumber : Buku Laporan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2017

Gambar 5.8. Jumlah & Persentase Pus Menurut Kelompok Umur

2. Kesertaan Keluarga Berencana

Dari jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 151.823, PUS yang telah mempergunakan alat kontrasepsi sebanyak 114.458 atau 75,45 % dari PUS yang ada, sisanya 24,61% belum mempergunakan kontrasepsi.

Dari sejumlah 114.458 peserta KB apabila dilihat per mix kontrasepsi adalah sebagai berikut :



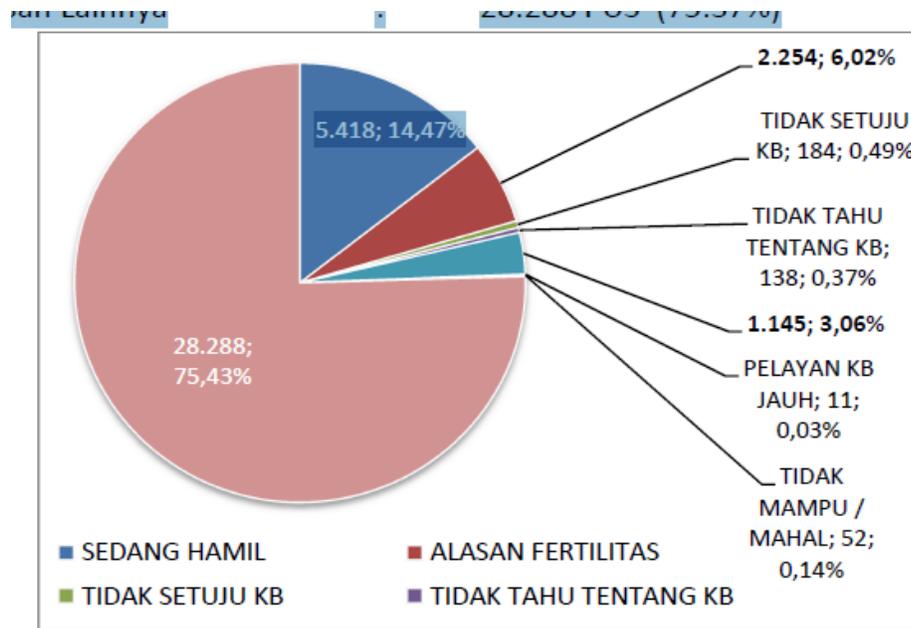
Gambar 5.9. Peserta KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi

3. PUS bukan peserta KB

Pasangan Usia Subur di Kabupaten Wonosobo yang belum mempergunakan alat kontrasepsi sebanyak 37.325 atau 24,58 % dari PUS yang ada, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Hamil : 5.418 PUS (14,51%)
- b. Fertilitas : 2.254 PUS (6,02%)
- c. Tidak Setuju KB : 184 PUS (0,49%)
- d. Tidak Tahu Tentang KB : 138 PUS (0,42%)
- e. Takut Efek Samping : 1.145 PUS (3,06%)
- f. Tempat Pelayanan Jauh : 11 PUS (0,02%)

- g. Tidak Mampu/Mahal : 52 PUS (0,17%)
- h. Alasan Lainnya : 28.288 PUS (75.37%)



Gambar 5.10. PUS Bukan Peserta KB

5.6. Aspek Keluarga Sejahtera

1. Tahapan Keluarga Sejahtera.

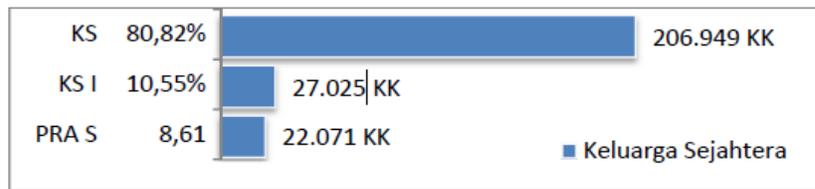
Menurut Undang – Undang No. 52 tahun 2009 Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat . Kegiatan ini mempunyai tujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul, rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Dari hasil update data keluarga tahun 2017 dapat diketahui bahwa ada 256.045 Kepala Keluarga dengan tahapan keluarga sebagai berikut :

KS	JUMLAH	PERSENTASE
Keluaga Pra Sejahtera	22.071	8,61%
Keluarga Sejahtera I	27.025	10,55%
Keluarga Sejahtera	206.949	80,82%

Gambar 5.11. Jumlah Kepala Keluarga dengan Tahapan Keluarga Sejahtera

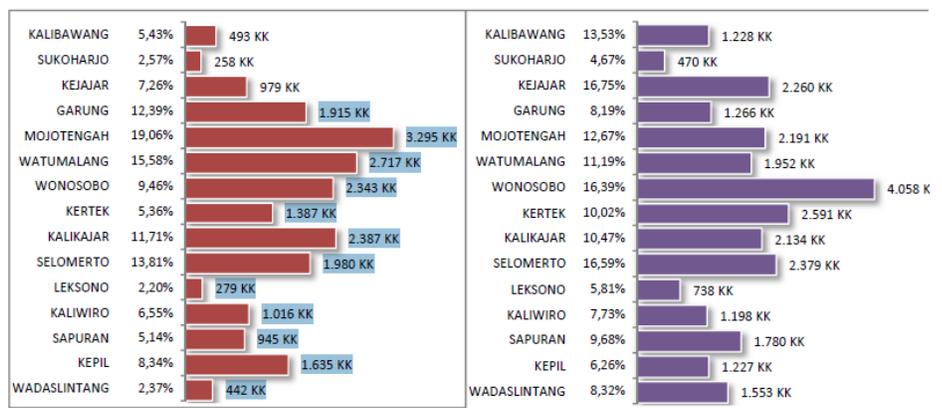
JUMLAH & PERSENTASE TINGKAT KELUARGA SEJAHTERA



Gambar 5.12. Jumlah & Persentase Tingkat Keluarga Sejahtera

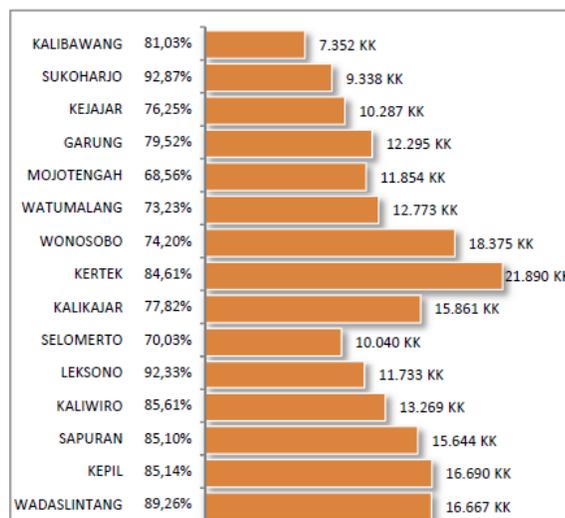
JUMLAH & PERSENTASE KELUARGA PRA SEJAHTERA PER KECAMATAN

JUMLAH & PERSENTASE KELUARGA SEJAHTERA I PER KECAMATAN



Gambar 5.13. Jumlah & Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Per Kecamatan

JUMLAH & PERSENTASE KELUARGA SEJAHTERA PER KECAMATAN



Gambar 5.14. Jumlah & Persentase Keluarga Sejahtera Per Kecamatan

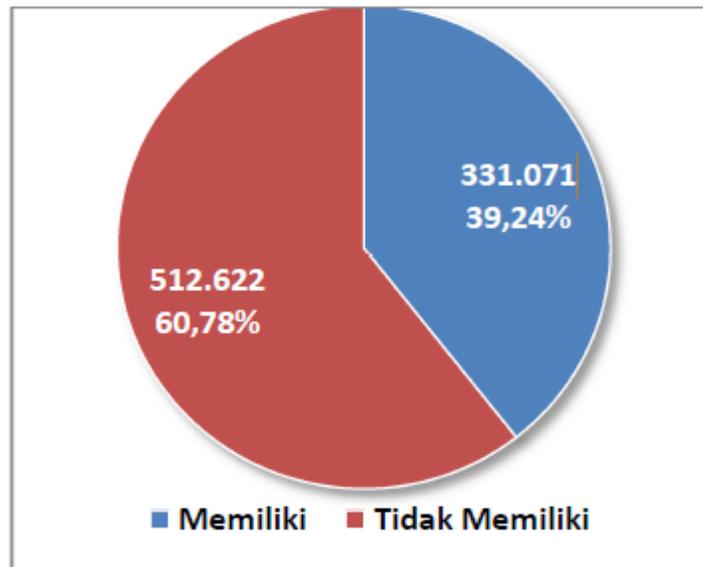
2. Aspek Pembangunan Keluarga.

Hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2017 untuk indikator Pembangunan Keluarga dari 256.045 kepala keluarga

3. Penjaminan Kesehatan

Dari jumlah penduduk yang tercatat sejumlah 843.693 jiwa, 331.071 penduduk sudah memiliki JKN atau 39,24%, sedangkan sejumlah 512.622 jiwa atau 60,78 % belum memiliki JKN.

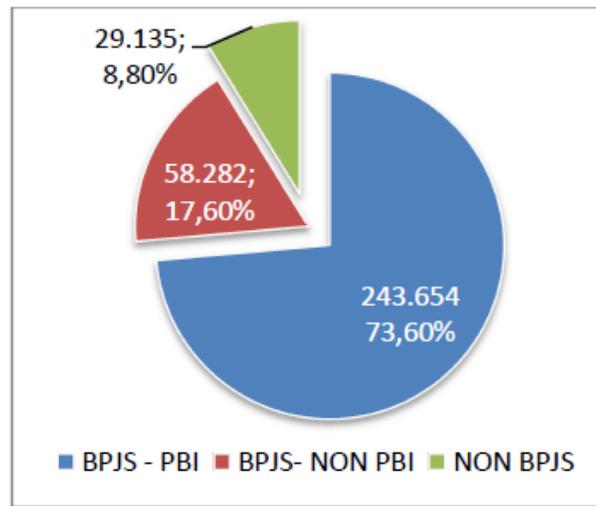
DIAGRAM PERSENTASE KEPIMILIKAN JKN



Gambar 5.15. Persentase Kepemilikan JKN

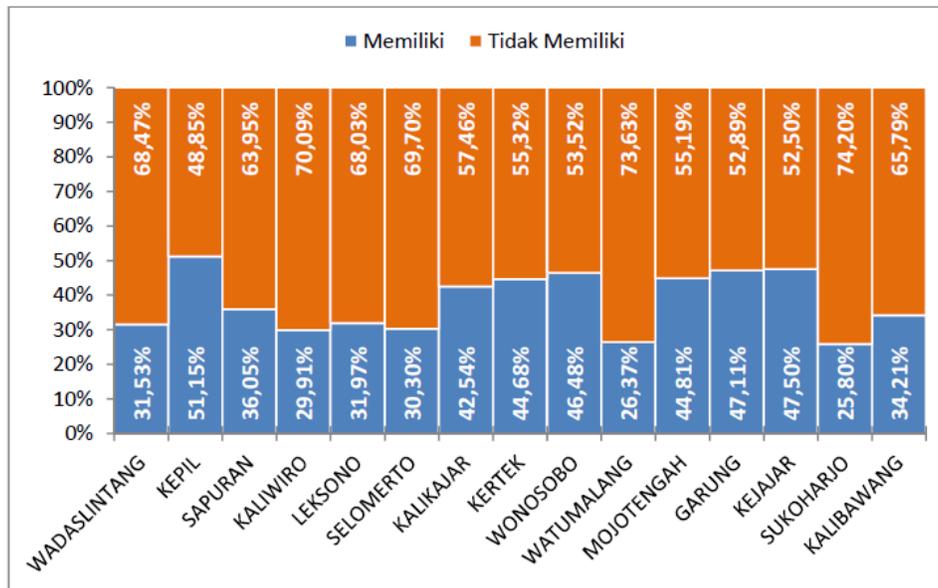
Berdasarkan Gambar 5.15. dari jumlah 331.071 penduduk yang sudah memiliki JKN jika di bagi menurut jenis JKN yang dimiliki, jenis BPJS-PBI adalah jenis JKN yang paling banyak dimiliki, dengan persentase 73,60% (243.654 Jiwa), kedua adalah BPJS-NON PBI dengan persentase sebesar 17,60% (58.282 Jiwa) dan terakhir NON BPJS dengan persentase sebesar 8,80% (29.135 Jiwa). Jika cermati berdasarkan kecamatan menurut persentase jenis JKN yang dimiliki, jenis BPJS-PBI terbanyak ada di kecamatan Kalibawang dengan persentase 89,61%, BPJS-NON PBI dan NON

BPJS ada di kecamatan Sukoharjo dengan 41,13% BPJS-NON PBI dan 26,12% NON BPJS.



Gambar 5.16. Persentase Kepemilikan JKN Menurut Jenis

Persentase Kepemilikan JKN Per Kecamatan

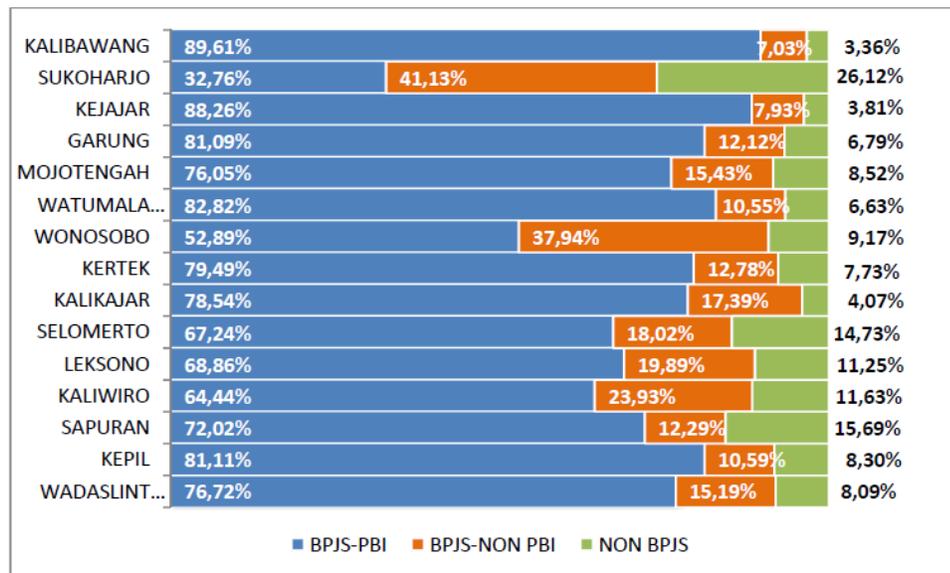


Gambar 5.17. Persentase Kepemilikan JKN Menurut Kecamatan

Jika dilihat per Kecamatan, persentase kepemilikan terbanyak ada pada kecamatan Kepil dengan persentase kepemilikan sebesar 51,24%, sisanya 48,88% belum memiliki. Kedua adalah kecamatan Kejajar dengan persentase 47,79% memiliki JKN dan 52,21% belum memiliki. Kecamatan dengan persentase kepemilikan terendah

ada pada Kecamatan Sukoharjo dengan persentase 25,60% memiliki JKN, dan sebanyak 74,06% belum memiliki

Berdasarkan Diagram 3.15, dari jumlah 328.853 penduduk yang sudah memiliki JKN jika di bagi menurut jenis JKN yang dimiliki, jenis BPJS-PBI adalah jenis JKN yang paling banyak dimiliki, dengan persentase 73,70% (242.362 Jiwa), kedua adalah BPJS-NON PBI dengan persentase sebesar 17,44% (57.344) dan terakhir NON BPJS dengan persentase sebesar 8,86% (29.147). Jika cermati berdasarkan kecamatan menurut persentase jenis JKN yang dimiliki, jenis BPJS-PBI terbanyak ada di kecamatan Kalibawang dengan persentase 89,61%, BPJS-NON PBI dan NON BPJS ada di kecamatan Sukoharjo dengan 41,13% BPJS-NON PBI dan 26,12% NON BPJS.



Gambar 5.18. Persentase Kepemilikan JKN Menurut Jenis & Kecamatan

BAB 6

Ketenagakerjaan

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Salah satu dari lima prioritas program pembangunan yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Berbagai kebijakan dan strategi telah ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya dibidang ekonomi, sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Dengan demikian titik sentral ketenagakerjaan adalah perencanaan tenaga kerja yang mencakup :

- a. Penyusunan program penyediaan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan
- b. Penyusunan program penciptaan kesempatan kerja supaya dapat menggunakan sumber daya manusia secara optimal
- c. Terciptanya lapangan kerja baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Oleh karena itu upaya pembangunan harus banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Misalnya skala prioritas arah pertumbuhan antara sektor informal dan formal di perkotaan. Akhir-akhir ini sektor informal di perkotaan semakin berperan penting dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja, maka menjadi kurang bijaksana jika kebijakan pembangunan perkotaan lebih diarahkan hanya pada sektor formal.

Program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu ditingkatkan demi terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta peningkatan mutu

lapangan pekerjaan, diharapkan akan dapat mengurangi perbedaan penghasilan diantara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga dengan demikian dapat ditingkatkan pemerataan pendapatan.

6.1. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan adalah *The Labor Force Concept* sesuai yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu **penduduk usia kerja** dan **penduduk bukan usia kerja**. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 **penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. **Penduduk bukan usia kerja** adalah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun. **Angkatan kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja dan pengangguran. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima bunga bank, jompo atau alasan yang lain). **Bekerja** yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja mencakup sedang bekerja maupun sementara tidak bekerja (cuti, sakit dan sejenisnya).

Pengangguran yang digunakan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dan mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja. Sehingga pengangguran mencakup empat kriteria yaitu: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged worker*) dan sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal

berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain tidak dapat disebut sebagai pengangguran terbuka. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja yang dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah dengan tindakan nyata, tidak termasuk yang baru merencanakan, niat, atau baru ikut kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha, jangka waktunya tidak terbatas pada seminggu yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari : *Setengah Penganggur* adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dulu disebut setengah pengangguran terpaksa); *Pekerja paruh waktu* adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Lapangan usaha menurut PBB (1998) adalah bidang kegiatan suatu organisasi/lembaga/usaha (*establishment*) tempat seseorang bekerja selama periode waktu acuan yang dibuat data untuk karakteristik ekonomi (atau yang dikerjakan terakhir, jika orang tersebut tidak bekerja). Kegiatan *establishment* adalah jenis barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Status pekerjaan

adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha yang biasanya dikelompokkan menjadi :

- a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja dibayar.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/karyawan/pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau barang.
- e. Pekerja bebas (pertanian/non pertanian) seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) atas dasar balas jasa dengan menerima imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan
- f. Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa barang maupun barang.

6.2. Indikator Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017, di kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 6226 pencari kerja terdaftar Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi kabupaten Wonosobo.

a. Penduduk Usia Kerja

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Pada tahun 2017 penduduk usia kerja berpendidikan terakhir SD yaitu 35,99 persen(2241 pencari kerja) dan yang di tempatkan sebanyak 1810 pekerja.

Sementara sektor pertanian merupakan faktor paling dominan sebagai lapangan usaha (lapangan pekerjaan utama) di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017 . ini dilihat dari kontribusinya penyerapan tenaga kerja yang mencapai 154 416 jiwa dari penduduk yang bekerja . Diikuti oleh sektor perdagangan besar , eceran , rumah makan dan hotel sebanyak 95 967 jiwa.

Tabel 6.1. Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kelamin dan kegiatan seminggu yang lalu, 2017

Kegiatan Utama/ main activity	2017		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja (AK)/economically active	251 082	171 118	422,200
- Bekerja/working	239 375	165 158	404 533
- Pengangguran/unemployment	11 707	5 960	17 667
Bukan AK	43 787	117 379	161 166
- Sekolah/attending school	18 610	17 148	35 758
- Mengurus Ruta/housekeeping	10 981	89 023	100 004
- Lainnya/others	14 196	11 208	25 404
Jumlah/ Total	294 869	288 497	583 366
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	85.15	59.31	72.37
Tingkat Pengangguran	4.66	3.48	4.18

Sumber : Survei Angkatan kerja Nasional Agustus

Penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki bukan angkatan kerja. Sebaliknya untuk penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja. Masih kentalnya tatanan sosial budaya masyarakat, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah, sehingga, angkatan kerja laki-laki (85,15%) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan (59,31%).

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama satu minggu lalu di Kabupaten Wonosobo 2017

Pendidikan Tertinggi yang dinamatkan	Angkatan Kerja (AK)/economically active		Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum Pernah Sekolah	11 083	-	11 083
Tidak /belum tamat SD	78 947	4 175	83 122
Sekolah Dasar	189 439	2 835	192 274
Sekolah Menengah Pertama	53 857	3 901	54 758
Sekolah Menengah Atas	28 571	3 736	32 307
Sekolah Menegah Kejuruan	16 183	2 099	18 282
Diploma I/II/III	6 177	-	6 177
Universitas	20 276	921	21 197
Jumlah /Total	404 533	17 667	422 200

Sumber : Survei Angkatan kerja Nasional Agustus

Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan pendidikan sekolah dasar menjadi penyumbang terbanyak yang bekerja mencapai 189 439, pendidikan diploma 6 177 . Pada angka pengangguran terbuka dari pendidikan belum tamat SD mencapai 4 175.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ini biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk Angkatan Kerja dengan penduduk usia kerja.

TPAK dapat di hitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

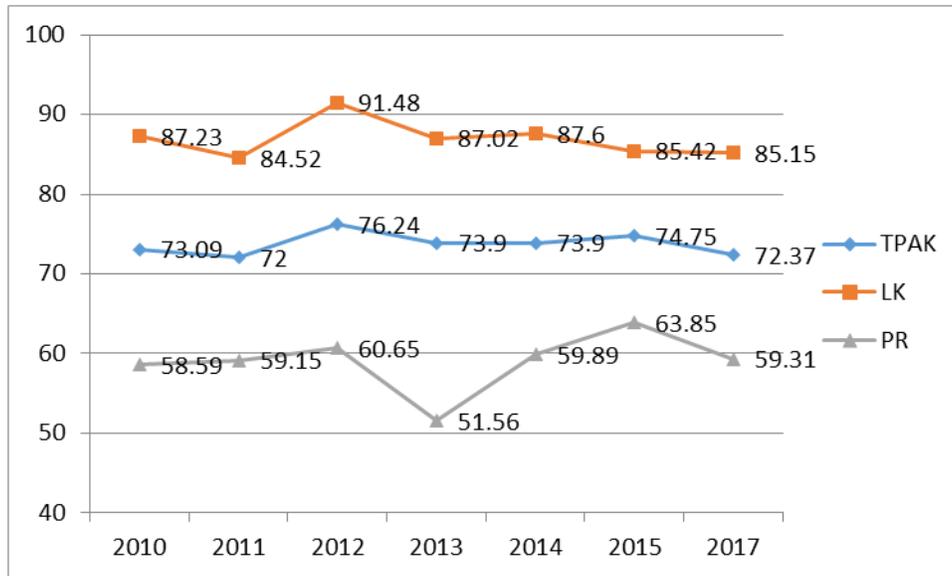
TPAK perempuan biasanya lebih rendah dibanding laki-laki karena di Indonesia umumnya yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk kedalam angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas 2017, TPAK total Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 72,37 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 72 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis. TPAK Kabupaten Wonosobo yang tergolong sedang ini jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata TPAK laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,15 persen sedangkan TPAK perempuan 59,31 persen. Hal ini berarti penduduk laki-laki yang aktif secara ekonomis lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 6.3. Persentase TPAK, TKK, dan TPT di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
Total	76,24	64,50	73,90	74,75	72,37
Laki-laki	91,48	87,02	87,60	85,42	85,15
Perempuan	60,65	51,56	59,89	63,85	59,31
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)					
Total	94,63	94,17	94,66	95,53	95,82
Laki-laki	95,52	94,39	95,76	95,95	95,34
Perempuan	93,24	93,80	93,02	94,95	96,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Total	5,37	5,83	5,34	4,47	4,18
Laki-laki	4,48	5,61	4,24	4,05	4,66
Perempuan	6,76	6,20	6,98	5,05	3,48

Sumber : BPS



Gambar 6.1. Perkembangan TPAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017

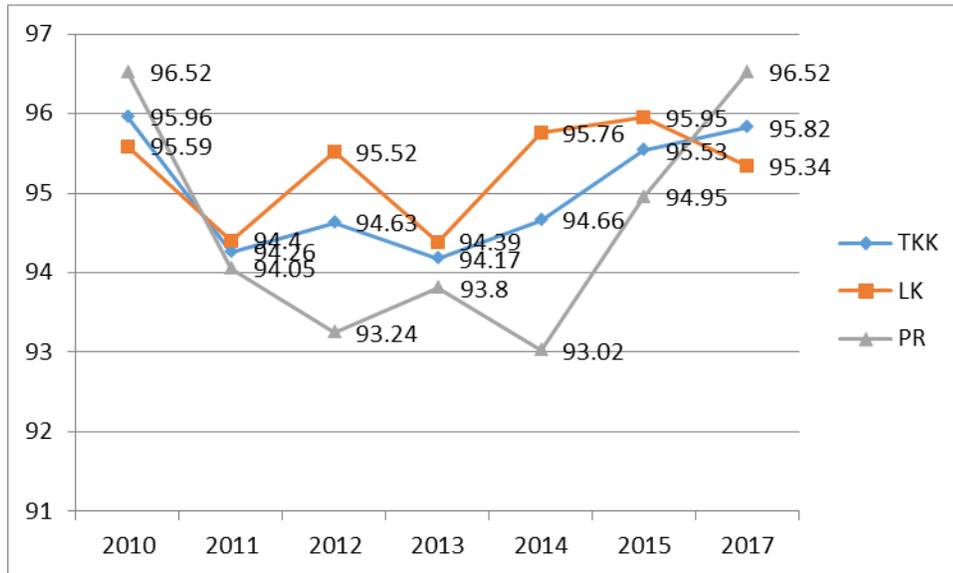
c. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. TKK biasanya diformulasikan sebagai berikut :

$$TKK = \frac{JumlahPendudukBekerja}{JumlahAngkatanKerja} \times 100$$

Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2017 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Wonosobo sebesar 95,82 persen. Ini berarti sekitar 96 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 4 dari 100 penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Penduduk yang tergolong pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, dan hanya mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah diterima

bekerja tapi belum mulai bekerja atau putus asa (sudah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak pernah diterima bekerja).



Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2017

**Gambar 6.2. Perkembangan TKK Kabupaten Wonosobo
Tahun 2010 - 2017**

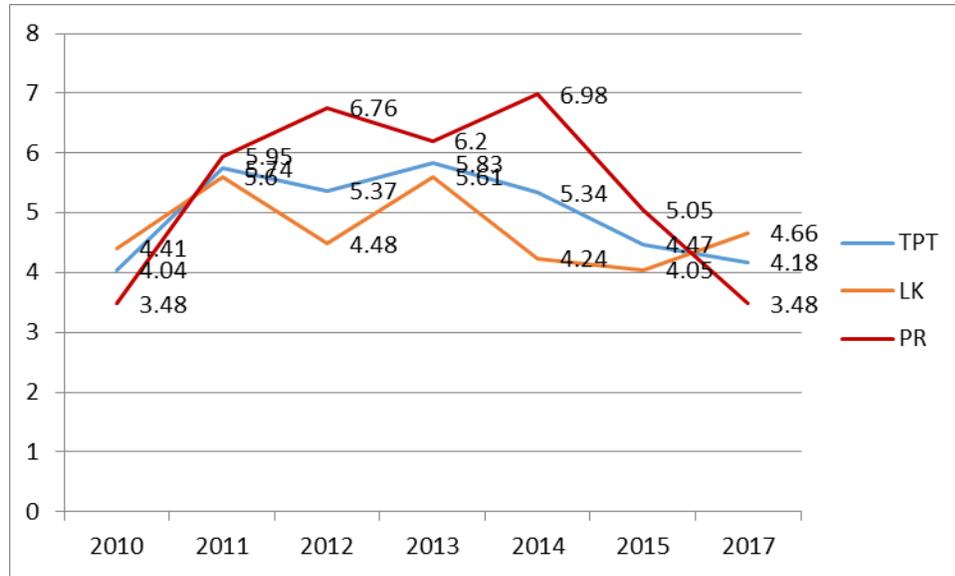
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \text{ atau}$$

$$TPT = 100\% - TKK$$



Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2014

**Gambar 6.3. Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo
Tahun 2010 - 2017**

Perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, TPT berhasil ditekan pada angka 4,04 tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 5,83. Dan mulai tahun 2014 mulai dapat ditekan hingga tahun 2017 sebesar 4,18. Meskipun demikian TPT Kabupaten Wonosobo apabila diklasifikasikan masih tergolong rendah. Pada tahun 2017, tercatat TPT sebesar 4,66 persen untuk laki-laki dan 3,48 persen untuk perempuan, ini berarti bahwa dari 100 angkatan kerja laki-laki, 5 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan, 3 orang diantaranya menganggur. Dari grafik diatas terlihat disaat tingkat pengangguran tinggi perempuan lebih kelihatan berdampak sedangkan untuk laki-laki fluktuasinya tidak sebesar perempuan.

e. Lapangan Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap

tenaga kerja. Disamping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah. Dari Tabel 7.3 dapat terlihat bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan dimana lebih dari 38,17 persen pekerja, bekerja disektor ini. Selanjutnya sektor perdagangan (23,72%) menjadi pilihan kedua dan diikuti oleh sektor industri (12,10%). Kemampuan sektor pertambangan, listrik dan air dalam menyerap tenaga kerja yang masih sangat kecil (0,83%), menandakan bahwa sektor ini belum dapat diandalkan dalam perekonomian di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 6.4. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	56,28	64,22	60,39	45,93	42,55
Pertambangan	0,56	0,21	0,19	0,85	1,17
Industri Pengolahan	5,21	6,87	5,68	12,25	7,77
Listrik, gas dan air	0,18	0,19	0,09	0,53	0,11
Bangunan	9,31	2,61	6,27	10,80	13,00
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	13,34	13,19	12,50	17,05	19,09
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	4,22	5,2	4,76	3,89	4,47
Keuangan dan jasa perusahaan	1,17	1,03	1,76	1,67	2,78
Jasa kemasyarakatan	9,74	6,5	8,37	7,03	9,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Tabel 6.5. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	51,03	44,97	44,29	43,06	31,83
Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Industri Pengolahan	14,07	16,34	11,39	15,03	18,37
Listrik, gas dan air	0,00	0,16	0,00	0,00	0,17
Bangunan	0,46	0,00	0,32	0,26	0,17
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	20,99	27,72	22,48	27,96	30,44
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	0,50	0,00	0,00	0,19	0,61
Keuangan dan jasa perusahaan	0,96	0,39	0,00	0,85	2,04
Jasa kemasyarakatan	11,99	10,42	21,51	12,13	16,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Tabel 6.6. Persentase Penduduk Laki-laki + Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	54,28	58,13	54,24	44,72	38,17
Pertambangan	0,64	0,00	0,34	0,70	0,70
Industri Pengolahan	9,43	6,45	8,64	13,42	12,10
Listrik, gas dan air	0,16	0,22	0,11	0,30	0,13
Bangunan	5,52	5,86	5,80	6,38	7,76
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	16,47	16,98	16,30	21,64	23,72
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	3,60	1,80	2,78	2,34	2,89
Keuangan dan jasa perusahaan	0,81	0,62	1,09	1,33	2,48
Jasa kemasyarakatan	9,09	9,93	10,61	9,17	12,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

f. Status dan Jenis Pekerjaan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status dan jenis pekerjaan. Tabel 6.4 menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Kabupaten Wonosobo yang bekerja disektor informal. Hal ini terlihat dari tingginya persentase (40.52%) pekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap pada tahun 2017.

Pada umumnya mereka yang berusaha sendiri ini ada disektor pertanian. Pola struktur pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tahun 2017 berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (28,10%). Sedangkan untuk laki-laki pada umumnya berusaha dengan bantuan orang lain/buruh tidak tetap (23,93%), berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (18,60%) dan sebagai buruh/ karyawan dibayar (22,17%) sedangkan sebagai pekerja keluarga hanya 8,28%.

Tabel 6.7. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012 - 2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	16,08	17,68	17,29	15,64	18,60
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	30,91	34,42	35,28	29,71	23,93
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,21	6,51	5,87	6,08	5,75
Buruh/karyawan/pegawai	14,18	14,17	16,13	24,05	22,17
Pekerja bebas pertanian	8,58	3,96	4,59	4,68	8,45
Pekerja bebas non pertanian	10,58	2,04	6,39	10,03	12,83
Pekerja Keluarga	14,96	21,21	14,45	9,80	8,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS

Tabel 6.8. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012 - 2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	13,15	15,26	14,24	16,73	17,09
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	14,48	17,63	17,05	16,26	20,52
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,25	1,38	2,36	2,76	2,86
Pegawai/karyawan	15,23	16,66	14,92	17,99	18,23
Pekerja bebas pertanian	1,76	2,71	2,76	2,52	6,41
Pekerja bebas non pertanian	1,76	0,43	1,62	4,86	6,79
Pekerja Keluarga	48,17	45,94	47,05	38,88	28,10
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Tabel 6.9. Persentase Penduduk Laki-laki + Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012 - 2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	19,94	15,26	16,09	16,09	17,98
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	31,19	17,63	28,10	24,06	22,54
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,42	1,38	4,49	4,69	4,57
Pegawai/karyawan	19,38	16,66	15,65	21,50	20,56
Pekerja bebas pertanian	10,80	2,71	3,87	3,77	7,61
Pekerja bebas non pertanian	9,56	0,43	4,51	7,86	10,36
Pekerja Keluarga	3,71	45,94	27,29	22,02	16,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

BAB 7

Transportasi dan Telekomunikasi

BAB VII

TRANSPORTASI DAN TELEKOMUNIKASI

7.1. Transportasi

Transportasi adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh karena itu infrastruktur transportasi merupakan salah satu masalah krusial yang harus diperhatikan dalam menangani pembangunan dalam suatu daerah. Infrastruktur tersebut antara lain meliputi jaringan jalan, kondisi jembatan dan sarana prasarana penunjang lain seperti jaringan terminal dan jumlah kendaraan.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan di suatu daerah, data-data transportasi menjadi hal yang harus bisa disajikan dalam penyusunan indikator statistik makro suatu daerah, termasuk Indikator Statistik Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 ini. Dengan adanya data ini, diharapkan pemerintah dapat menangani permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan.

7.1.1. Jaringan Jalan

Pada tahun 2014 – 2017 panjang total jaringan jalan di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari 779,89 km menjadi 999,28 km atau sekitar 21,96%. Peningkatan ini hampir merata di semua kecamatan. Jalan kabupaten yang terpanjang berada di wilayah Kecamatan Kaliwiro yaitu 97,13 km atau 9,72% dari total panjang jalan kabupaten, sedangkan yang terpendek berada di wilayah Kecamatan Kejajar yaitu 35,16 km atau 3,52% dari total panjang jalan kabupaten.

Selain jalan kabupaten, di Kabupaten Wonosobo ada yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Untuk status kewenangan jalan di Kabupaten Wonosobo yang ditangani Provinsi panjangnya 107,33 km atau sekitar 4,18 % dari total panjang jalan kewenangan provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Sedang panjang jalan Nasional dengan status kewenangan pusat hanya 31,994 km atau sekitar 2,30 % dari total panjang jalan kewenangan pusat yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

1. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo (km)

**Tabel 7.1 Panjang jalan per kecamatan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014–2017**

No	Kec	2014	2015	2016	2017
1	Wadaslintang	61,45	61,45	86,98	86,98
2	Kepil	57,15	57,15	68,64	68,64
3	Sapuran	68,11	68,11	82,19	82,19
4	Kalibawang	39,23	39,23	55,61	57,29
5	Kaliwiro	80,52	80,52	97,13	97,13
6	Leksono	44,33	44,33	61,17	61,17
7	Sukoharjo	71,09	71,09	62,79	62,79
8	Selomerto	27,52	27,52	40,38	45,75
9	Kalikajar	51,95	51,95	79,88	77,46
10	Kertek	40,62	40,62	64,26	64,26
11	Wonosobo	48,26	48,26	66,95	69,51
12	Watumalang	95,15	95,15	95,46	79,00
13	Mojotengah	49,82	49,82	58,42	60,17
14	Garung	10,4	16,40	44,28	51,79
15	Kejajar	34,29	34,29	35,16	35,16
Jumlah		779,89	785,89	999,30	999,28

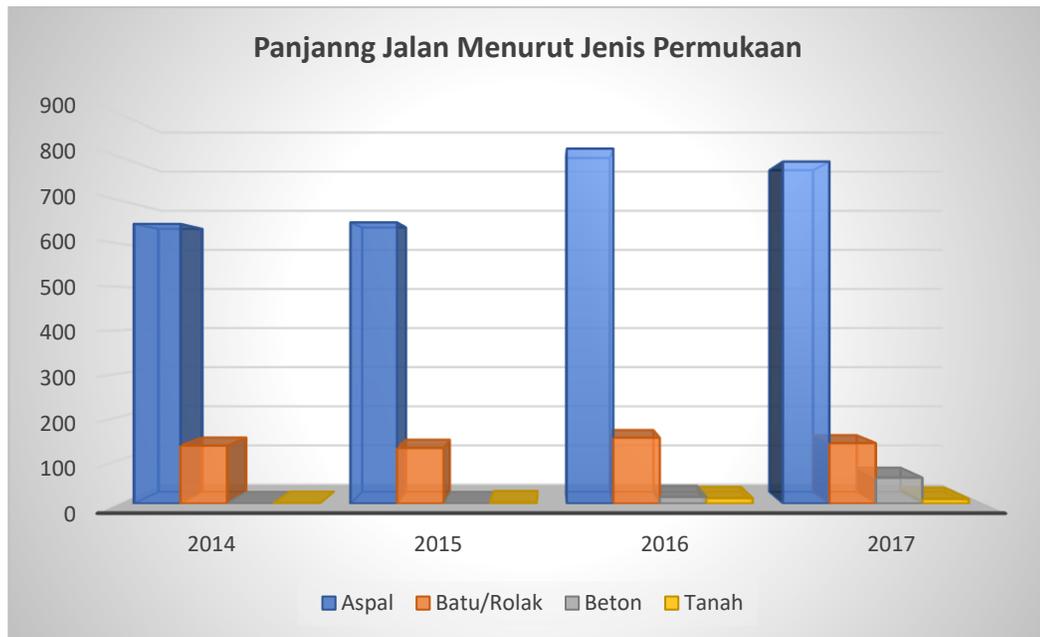
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

2. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Kabupaten Wonosobo

Tabel 7.2 Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014–2017

Jenis Permukaan	2014	2015	2016	2017
Aspal	645,18	648,53	818,69	788,78
Batu/Rolak	133,71	128,56	152,11	139,49
Beton	-	-	15,64	59,97
Tanah	1,00	2,80	12,84	11,04
Jumlah	779,89	779,89	999,28	999,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.1 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Wonosobo jika dirinci menurut jenis permukaan, sebagian besar jalan kabupaten dalam kondisi diaspal dan hanya sebagian kecil saja yang masih dalam kondisi batu/rolak dan tanah. Jalan kabupaten yang diaspal selama tahun 2014–2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014

panjang jalan yang diaspal adalah 645,18 km, dan pada tahun 2017 panjang jalan yang diaspal mencapai 788,78 km.

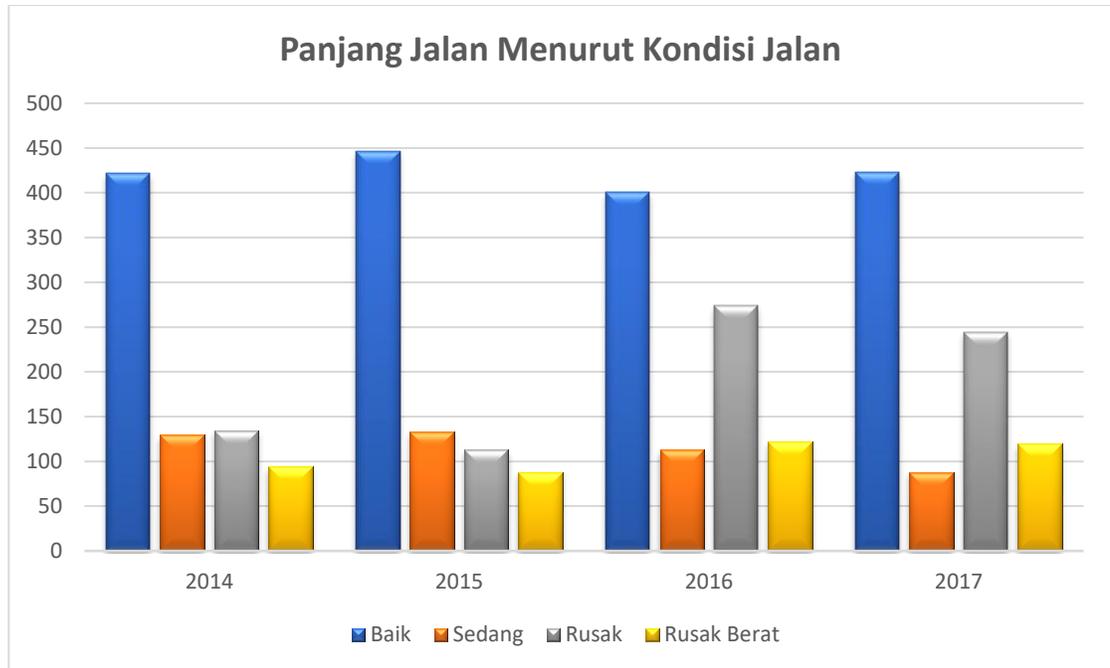
Peningkatan jumlah jalan yang diaspal ini sejalan bertambahnya total panjang jalan yang ada. Peningkatan jalan yang diaspal sangat penting karena jalan merupakan sarana penduduk untuk melakukan mobilitas. Semakin banyak jalan yang diaspal, maka semakin memudahkan dan memperlancar mobilitas penduduk, yang pada akhirnya diharapkan akan semakin meningkatkan dan pemeratakan kondisi ekonomi antar wilayah karena adanya sarana yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar penduduk.

3. Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan

Tabel 7.3 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014–2017

Kondisi Jalan	2014	2015	2016	2017
Baik	422,06	446,03	400,66	423,38
Sedang	129,29	132,96	202,59	211,54
Rusak	134,53	112,79	273,68	244,45
Rusak Berat	94,01	88,11	122,35	119,91
	779,89	779,89	999,28	999,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.2. Panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan Tahun 2014 – 2017

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Wonosobo jika dirinci menurut kondisi jalan sebagian besar jalan kabupaten dalam kondisi baik. Jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 54,12% kondisi ini turun jika dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 62,13%. Turunnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 ini sejalan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi sedang, rusak, dan rusak berat.

7.1.2. Jembatan

Jembatan sebagai prasarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya.

Dari segi perkonomian, jembatan dapat mengurangi biaya transportasi. Dan dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat mempersingkat waktu tempuh pada perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan juga dapat

meningkatkan daerah tertinggal untuk dapat lebih berhubungan dengan daerah lain dengan mudah

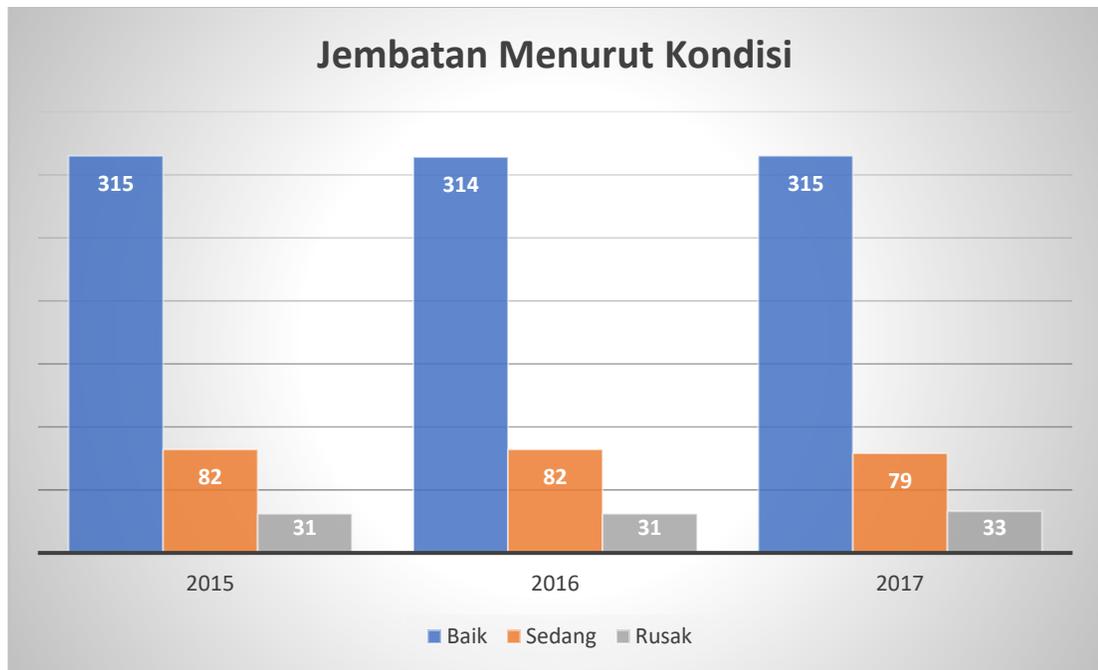
Tabel 7.4 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2017

No	Kec	2015					2016					2017				
		B	S	R	J	P (m)	B	S	R	J	P (m)	B	S	R	J	P (m)
1	Wadaslintang	31	19	2	52	322	31	19	2	52	322	31	19	2	52	322
2	Kepil	38	9	1	48	298	38	9	1	48	298	39	9	0	48	298
3	Sapuran	25	8	3	36	223	25	8	3	36	223	26	8	2	36	223
4	Kalibawang	10	3	1	14	86	10	3	1	14	86	10	3	1	14	86
5	Kaliwiro	29	6	8	43	266	28	6	8	43	266	28	5	10	43	266
6	Leksono	17	3	2	22	139	17	3	2	22	139	17	3	2	22	139
7	Sukoharjo	20	4	2	26	155	20	4	2	26	155	20	3	3	26	155
8	Selomerto	23	3	1	27	167	23	3	1	27	167	23	3	1	27	167
9	Kalikajar	18	5	1	24	149	18	5	1	24	149	18	5	1	24	149
10	Kertek	14	5	1	20	133	14	5	1	20	133	14	4	2	20	133
11	Wonosobo	18	3	1	22	139	18	3	1	22	139	18	3	1	22	139
12	Watumalang	23	5	2	30	183	24	5	2	30	186	23	5	2	30	186
13	Mojotengah	20	5	1	26	165	19	5	1	25	155	19	5	1	25	155
14	Garung	15	2	1	18	112	15	2	1	18	112	14	2	2	18	112
15	Kejajar	14	2	4	20	124	14	2	4	20	124	15	2	3	20	124
Jumlah		315	82	31	428	2.661	314	82	31	427	2.654	315	79	33	427	2654

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Keterangan :

- B : Baik
- S : Sedang
- R : Rusak
- J : Jumlah
- P (m) : Panjang dalam meter



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.3. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo , 2015–2017

Dalam rentang tahun 2015 – 2016 jembatan dengan kondisi baik berkurang 1 menjadi kriteria kondisi sedang yaitu di Kecamatan Wonosobo.

Dengan meningkatnya prasarana jembatan diharapkan arus transportasi antar wilayah semakin lancar karena tidak terjadi kesenjangan antar wilayah karena rute transportasi yang terpisah oleh sungai, saluran atau jalan raya.

7.1.3. Terminal

Prasarana lainnya selain jaringan jalan dan jembatan yang mendukung transportasi adalah terminal. Terminal yang dimiliki sebagai alat pendukung transportasi di Kabupaten Wonosobo adalah terminal bus.

Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 7.5 Jumlah Terminal berdasarkan Tipe Terminal Di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2016

Type	2014	2015	2016
Type A	1	1	1
Type B	0	0	0
Type C	7	7	7
Jumlah	8	8	8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Jumlah total terminal bus di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak ada perubahan yaitu 8 buah yang terdiri dari 1 buah terminal type A yaitu terminal induk Mendolo dan 7 terminal type C yang masing- masing berada di Kecamatan Wonosobo (terminal Mendolo atas), Leksono (ds. Sawangan), Kertek, Garung, Watumalang (ds. Gondang), Sapuran dan Kaliwiro.

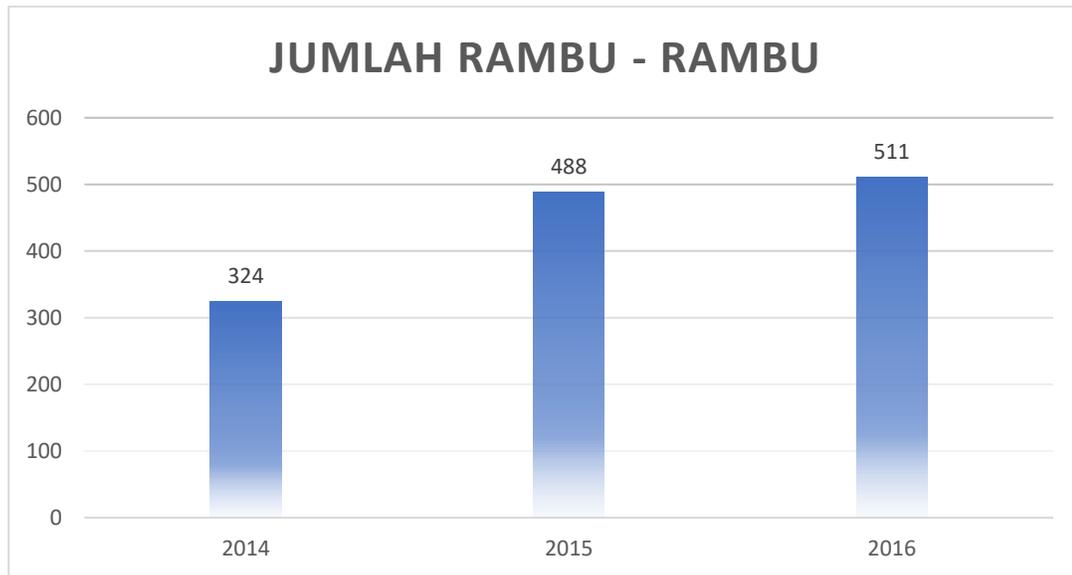
7.1.4. Prasarana Pendukung Transportasi Lainnya

Prasarana pendukung transportasi lainnya yang mendukung kelancaran transportasi yang ada di Kabupaten Wonosobo antara lain adalah rambu-rambu.

Tabel 7.6 Jumlah Rambu Jalan Di Kabupaten Wonosobo, 2014 - 2016

Jenis	Jumlah		
	2014	2015	2016
Traffic Light	6	6	6
Warning Light	10	14	14
Cermin Tikung	20	20	20
Rambu Model F	43	55	63
RPPJ	10	15	20
Rambu LL Ukuran 60 cm	200	200	200
Rambu LL Ukuran 75 cm	0	20	30
Deliniator	0	123	123
Zebracross	35	35	35
Jumlah	324	488	511

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.4 Jumlah Rambu-Rambu yang Terpasang di Kabupaten Wonosobo, 2014 - 2016

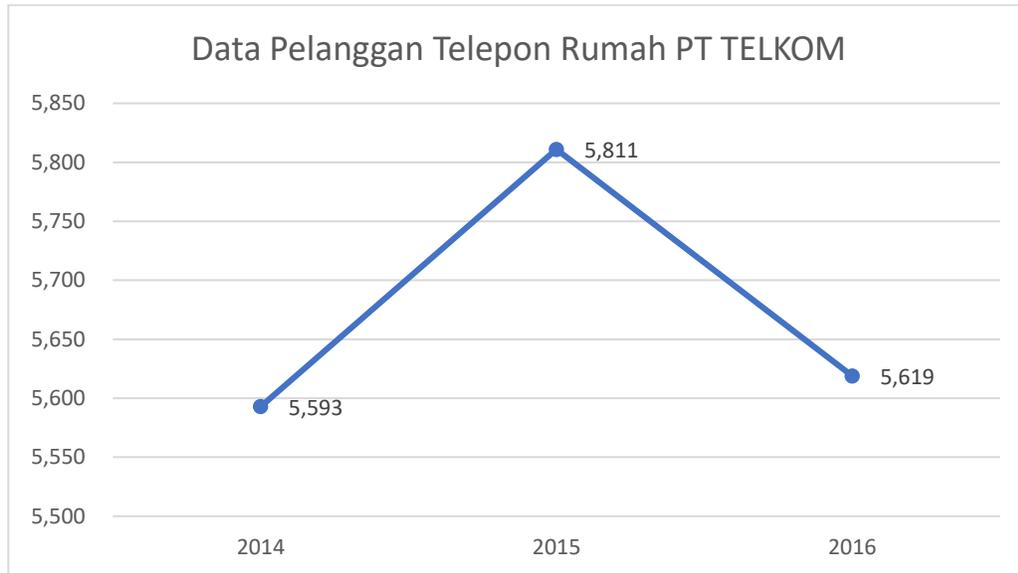
Berdasarkan pada grafik 7.4 terlihat Pemasangan rambu-rambu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 63%. Dengan peningkatan pemasangan rambu-rambu ini diharapkan meminimalkan kecelakaan lalu lintas dan memperlancar arus transportasi.

7.2. Telekomunikasi

Perkembangan jaman dan informasi menuntut manusia untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar maupun di luar lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini, sarana komunikasi dan informasi yang ada sudah semakin canggih dan lengkap dalam memberikan kebutuhan informasi masyarakat. Harga telepon seluler yang semakin lama semakin kompetitif, telepon dengan menggunakan jaringan internet, serta pergeseran akan prioritas kebutuhan membuat pelanggan telepon rumah mengalami fluktuasi.

Dibeberapa daerah terjadi pemasangan baru berkaitan dengan fitur tambahan yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa. Sementara disisi lain kebutuhan akan fitur tersebut bisa dicukupi dengan gadget yang lain.

7.2.1. Telepon Rumah



Sumber : *PT. Telkom Wonosobo*

Gambar 7.5 Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 - 2016

7.2.2. Menara Telekomunikasi

Kondisi wilayah geografis yang tidak terjangkau telepon kabel, serta perkembangan peralatan telekomunikasi yang bersifat *mobile* mengharuskan infrastruktur juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Pembangunan menara selluler menjadi salah satu hal wajib yang harus dilakukan untuk menopang kebutuhan ini. Disisi lain juga harus ada pembatasan agar tidak terjadi rimba menara di Kabupaten Wonosobo, sehingga diutamakan untuk menggunakan menara existing secara bersama. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 117 tower berijin yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 7.7 Jumlah Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2016

No	Kecamatan	Jumlah Tower Berijin			
		2014	2105	2106	2017
1	Wadaslintang	5	5	5	5
2	Kepil	8	8	8	8
3	Sapuran	6	6	6	6
4	Kalibawang	5	5	5	5
5	Kaliwiro	7	7	7	7
6	Leksono	1	2	2	2
7	Sukoharjo	7	7	7	7
8	Selomerto	8	10	10	10
9	Kalikajar	6	6	6	6
10	Kertek	12	13	13	13
11	Wonosobo	19	20	20	20
12	Watumalang	6	6	6	6
13	Mojotengah	7	7	7	7
14	Garung	4	5	5	5
15	Kejajar	10	10	10	10
Jumlah		111	117	117	117

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB 8

Agama dan Sosial

BAB VIII

AGAMA DAN SOSIAL

8.1. Penduduk Menurut Agama

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo yang beragama Islam sebesar 98,65 persen. Di peringkat kedua agama Kristen sebesar 0,77 persen, diikuti agama Katholik sebesar 0,46 persen, Hindu 0,06 persen, Budha sebesar 0,06 persen dan sisanya beragama lainnya (Konghucu, Kepercayaan), (Tabel 8.1).

Tabel 8.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Agama, Tahun 2013 – 2016

Agama	2014		2015		2016		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	831,683	98.61	879,781	98.65	714,359	98.28	808,366	98.65
Katolik	4,131	0.49	4,602	0.52	4,951	0.68	3,816	0.46
Kristen	5,406	0.64	5,493	0.62	5,543	0.76	6,290	0.77
Budha	692	0.08	735	0.08	751	0.10	469	0.06
Hindu	1479	0.18	1175	0.13	1206	0.17	485	0.06
Lainnya	36	0.00	36	0.00	36	0.00	30	0.00
Jumlah	764.189	100,00	769.315	100,00	726846	100,00	819,456	100,00

Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2016

8.2. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah tempat dimana umat suatu agama menjalankan ibadah. Selain digunakan untuk melaksanakan ibadah, seringkali tempat ibadah digunakan untuk acara-acara keagamaan yang bersifat kolektif atau bersama-sama. Ketersediaan tempat ibadah menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan, karena menyangkut ketersediaan sarana untuk pelaksanaan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk.

Tabel 8.2. Banyaknya Tempat Ibadah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 - 2017

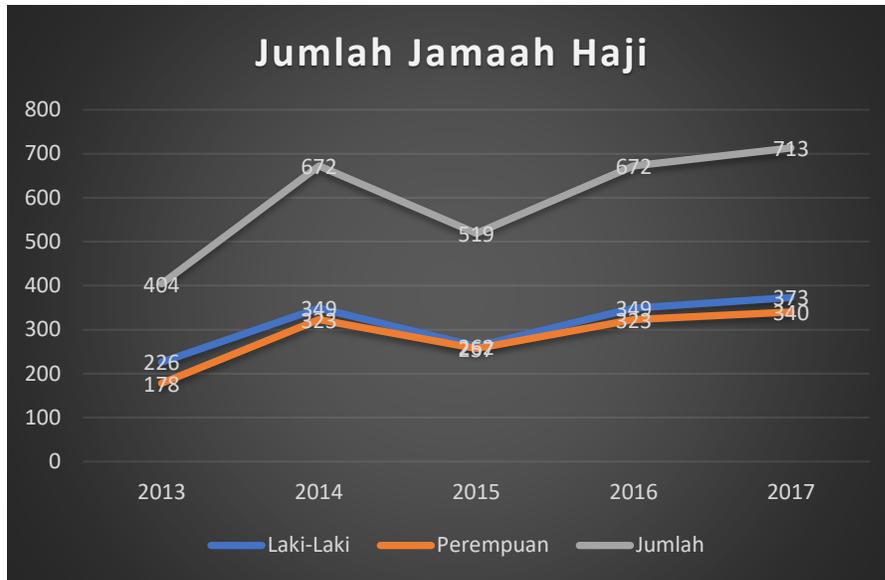
Tempat Ibadah	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Masjid	1,470	1,474	1,474	1536
Mushola	2,380	2,246	2,246	4508
Gereja	28	37	37	22
Kapel	0	0	0	16
Wihara	10	9	9	7
Pura	1	0	0	0
Jumlah	3,889	3,766	3,766	6089

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, seperti masjid, gereja, dan pesantren-pesantren. Tempat ibadah di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 mencapai 6089 buah yang terdiri dari 25.22 persen Masjid dan Langgar 74.78 persen Gereja Kristen dan Katholik.

8.3. Jamaah Haji

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban bagi seorang muslim yang telah mampu. Jumlah jamaah haji di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 713 jamaah, naik dari 672 jamaah pada tahun 2016. Kenaikan jumlah jamaah haji di Kabupaten Wonosobo ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kuota haji bagi kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.



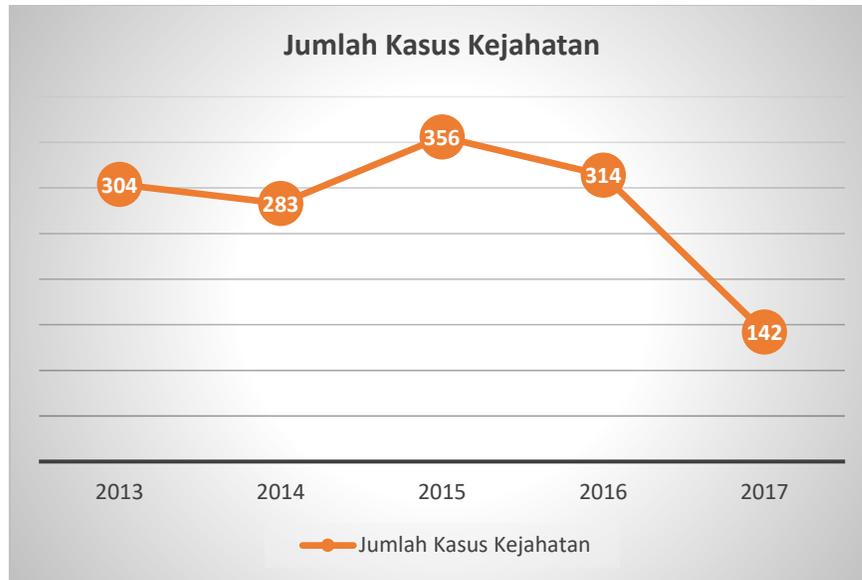
Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, 2016

Gambar 8.1. Jumlah Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2013 – 2017

8.4. Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas

Secara umum, kejahatan adalah tindakan yang melanggar undang-undang baik perkara pidana maupun perdata. Tindak kejahatan ada bermacam-macam jenisnya. Kejahatan yang dimaksud di sini meliputi pembunuhan, penganiayaan berat dan ringan, pencurian, penipuan, penggelapan, pembakaran, narkoba, pemalsuan uang dan surat, pemerkosaan, perjudian, pengroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari Gambar 8.2. dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 21 kasus atau 8,07% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 42 kasus atau 8,16% di banding tahun sebelumnya. Ditahun 2016 mengalami penurunan 149 kasus atau 48,85 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 terjadi 142 kasus kejahatan yang mana mengalami penurunan sebesar 55% dari tahun sebelumnya.



Sumber: Polres Wonosobo, 2018

Gambar 8.2. Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2017

Sebagai kabupaten yang sedang berkembang, ketersediaan sarana transportasi berupa jalan yang layak digunakan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan sarana transportasi juga harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas agar lalu lintas menjadi tertib.

Kasus yang sering kali terjadi, rambu-rambu dan peraturan lalu lintas sudah dibuat, tetapi kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang ada masih kurang. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015, secara umum terjadi kenaikan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wonosobo. Kenaikan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015 adalah sebesar 28,75 persen dibanding tahun sebelumnya atau dari 19.845 kasus pada tahun 2014 menjadi 25.551 kasus pelanggaran pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran lalu lintas di kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 63,79 persen atau turun menjadi 15.600 kasus. Sementara pada tahun 2017 pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan sebesar 156 persen yaitu sebanyak 39.957 kasus.



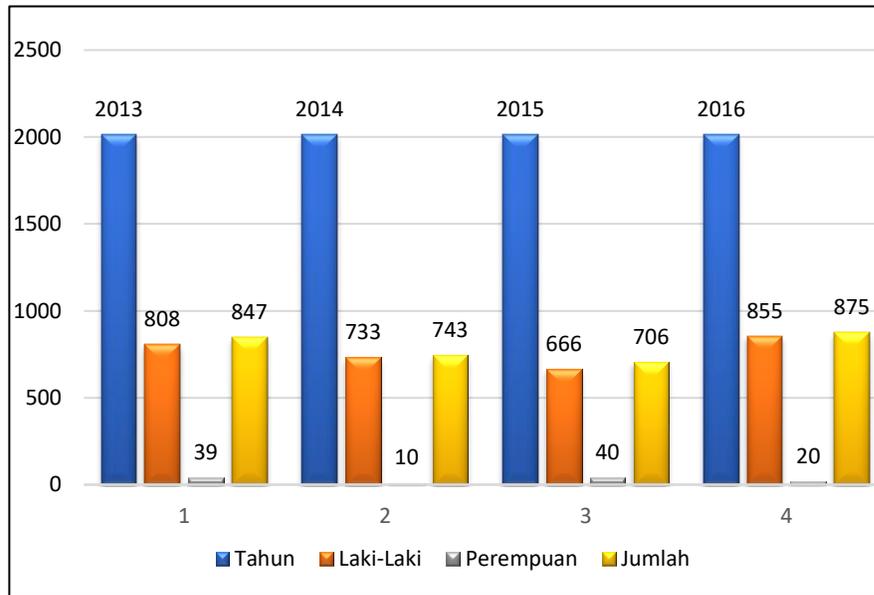
Sumber : Polres Wonosobo, 2018

Gambar 8.3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Wonosobo 2013– 2017

8.5. Napi yang Menghuni Rutan Wonosobo

Kabupaten Wonosobo memiliki 1 buah Rumah Tahanan (Rutan), menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman yaitu dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Pada tahun 2013 jumlah narapidana di Rutan Kabupaten Wonosobo berjumlah 847 orang, terdiri dari 808 napi laki-laki sedangkan napi perempuan berjumlah 39. Ditahun 2015 jumlah napi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berkurangnya jumlah napi dikarenakan berkurangnya napi laki-laki menjadi 666 napi. Akan tetapi di tahun 2016 jumlah napi laki-laki mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 1,19 persen dan jumlah keseluruhan napi di Rutan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 berjumlah 875 orang terdiri dari napi laki-laki 855 dan 20 orang napi perempuan.



Gambar 8.4. Jumlah Narapidana yang Menghuni Rumah Tahanan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2016

BAB 9

Kemiskinan

BAB IX

KEMISKINAN

Salah satu permasalahan terbesar pembangunan di kabupaten Wonosobo adalah tingginya angka prosentase penduduk miskin. Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun, sampai sekarang kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Perhatian pemerintah baik pemerintah pusat sampai dengan daerah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kebijakan dengan target sasaran menurunkan persentase jumlah penduduk miskin. Karena Kabupaten Wonosobo sejak Tahun 2013-2018 masih menduduki posisi terendah di Provinsi Jawa Tengah dengan angka penduduk miskin terbesar. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan menjadi sesuatu hal yang penting karena merupakan input yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun di tingkat komunitas. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Defenisi ini menunjukkan makna kemiskinan sangat luas dan multidimensi, serta tidak mudah untuk mengukurnya. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang bermartabat. Setiap orang tentu akan menginterpretasikannya secara berbeda-beda, sehingga dapat mengundang

perdebatan panjang. Selain itu, tidak semua hak-hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Karenanya, hingga saat ini tak ada satupun metode yang sempurna dalam memotret kemiskinan. Kata kemiskinan adalah sesuatu yang sangat kualitatif. Karenanya, sangat sulit untuk mengukurnya secara kuantitatif. Sebagai contoh, jika setiap orang diminta melengkapi kalimat berikut, "saya miskin karena.....". Akan ada ratusan, bahkan ribuan kata yang bisa digunakan untuk melengkapi kalimat ini, tergantung orangnya. Dan pastinya, tidak semua bisa dikuantitatifkan. Singkat kata, mengukur kemiskinan tidaklah semudah mengukur panjang suatu objek riil dengan sebuah penggaris.

9.1. Konsep Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

9.2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan penduduk miskin adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Penghitungan ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus sehingga hasilnya adalah estimasi. Dan metode pendekatan moneter dan konsepnya Basic Needs Approach sehingga data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasa disebut data kemiskinan makro.

9.3. Kemiskinan Makro *versus* Kemiskinan Mikro

Berbagai kondisi kemiskinan dapat direpresentasikan melalui berbagai jenis data baik data yang bersifat makro maupun data mikro. Data kemiskinan yang dihasilkan dengan menggunakan GK seperti yang disajikan pada publikasi adalah data kemiskinan makro. Data ini hanya dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu beserta karakteristiknya sehingga perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi, dan peningkatan kesempatan kerja, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program-program anti kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan data makro, data mikro lebih bersifat operasional yang idealnya mampu menyajikan informasi siapa itu si miskin, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan, yang direkap dalam unit administrasi terendah (misalnya RT/RW atau desa/kelurahan). Data kemiskinan yang bersifat mikro ini lebih operasional dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (seperti nama kepala keluarga, alamat dan status sosial-ekonomi tertentu). Data mikro ditujukan untuk program-program yang sifatnya target sasaran seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin dan Jamkesmas.

9.4. Konsep Garis Kemiskinan (GK)

Dalam penghitungan kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*), Garis Kemiskinan (GK) merupakan instrumen yang sangat penting. GK yang tidak tepat akan menghasilkan pengukuran kemiskinan yang menyesatkan. Pada dasarnya GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Komposisi komoditas makanan dan non makanan penyusun GK berbeda-beda pada tiap negara, sesuai dengan pola konsumsi penduduknya. Itulah sebabnya kenapa nominal GK yang digunakan di setiap negara juga berbeda. Karena itu, GK yang digunakan di Vietnam belum tentu representatif jika digunakan di Indonesia.

Rumus Penghitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

9.5. Teknik penghitungan GKM

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas

marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum/Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

dimana :

- GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kalori).
- P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.
- Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.
- V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana :

- K_j = Kalori dari komoditi k di daerah j
- \overline{HK}_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2.100$$

dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

dimana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM_p).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

9.6. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P₀), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

dimana :

α = 0

z = Garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis

n = kemiskinan.

Jumlah penduduk.

9.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana :

α = 1

z = Garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis

q = kemiskinan.

Jumlah penduduk.

n =

9.8. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana :

$$\alpha = 2$$

z = Garis kemiskinan

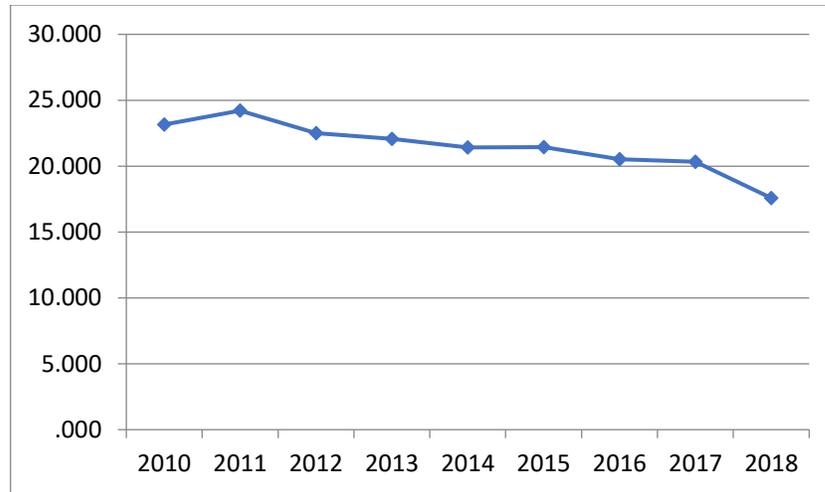
y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, \dots, q$),
 $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

9.9. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010-2017

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo selama periode 2010-2017 cenderung menurun, meskipun pernah ada kenaikan sebagaimana gambar 9.1. Pada tahun 2011 angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo meningkat menjadi 24,21 persen (182.951 orang) dan menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada periode 2010-2011 ini sebanyak kurang lebih 60 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan persentase penduduk miskinnya, termasuk Kabupaten Wonosobo. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2011, angka kemiskinan pada tahun selanjutnya yaitu periode 2012 dan 2013 kembali berhasil diturunkan dan tren penurunan itu terus berlanjut hingga tahun 2018 meskipun tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan dari 21,42 pada tahun 2014 menjadi 21,45 di tahun 2015. Pada tahun 2018 berhasil ditekan menjadi 17,58 dari 20,32 pada tahun 2017.



Sumber : BPS

Gambar 9.1. Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Wonosobo, 2010-2018

Meskipun jumlah penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jateng masih menempati urutan ke- 35. Salah satu faktor tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2018 masih relatif tinggi karena naiknya harga kebutuhan pokok yang digambarkan dengan kenaikan tingkat inflasi umum sebesar 3,27%, kumulatif dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2018.

Tabel 9.1. Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terendah di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2018

Kab./kota	2015	2016	2017	2018	Peringkat Jateng			
					2015	2016	2017	2018
(1)	(3)	(4)	(4)		(6)	(7)	(7)	
Kab. Purbalingga	19,70	18,98	18,80	15,62	32	32	32	31
Kab. Kebumen	20,44	19,86	19,60	17,47	34	34	34	34
Kab. Wonosobo	21,45	20,53	20,32	17,58	35	35	35	35
Kab. Rembang	19,28	18,54	18,35	15,41	31	31	31	30
Kab. Brebes	19,79	19,47	19,14	17,17	33	33	33	33
JAWA TENGAH	13,58	13,27	13,01	11,32	-	-	-	

Sumber : BPS

Pada tahun 2018, seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinannya. Kabupaten Wonosobo berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 2,74 persen, Kebumen 2,13 persen, Purbalingga 3,18 persen, Brebes 1,97 persen dan Kabupaten Rembang turun 2,94 persen. Peringkat 32 persentase kemiskinan tahun 2018 diduduki oleh kabupaten pemalng dengan angka kemiskinan sebesar 16,04 persen.

9.10. Perubahan Garis Kemiskinan 2010-2018

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batasan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 9.2. Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010-2018

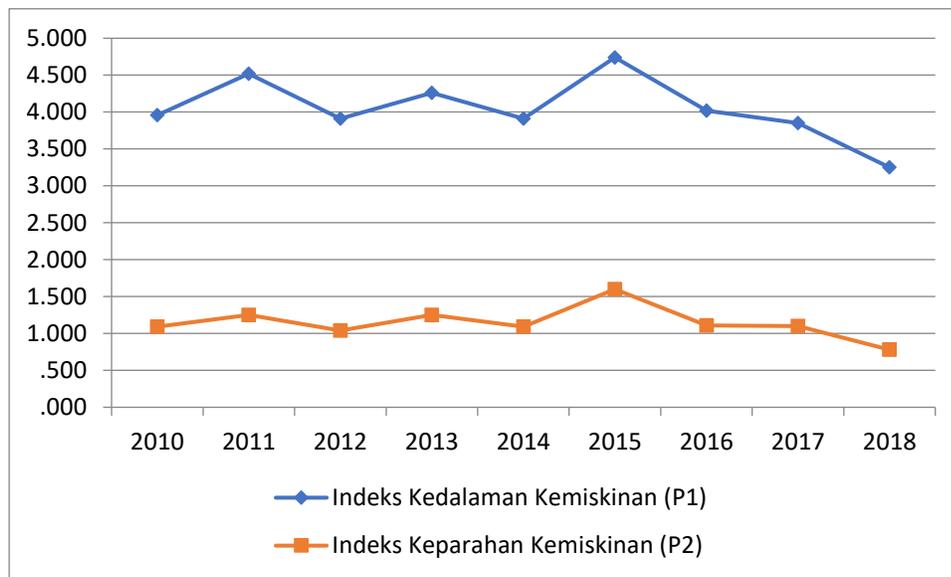
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
(1)	(2)
2010	203 216
2011	226 827
2012	253 181
2013	258 522
2014	267 548
2015	275 180
2016	297 422
2017	308 553
2018	323 490

Sumber : BPS

Dalam kurun waktu tahun 2010-2018, garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat inflasi sehingga ketika inflasi mengalami kenaikan maka garis kemiskinan akan bergeser naik. Berdasarkan tabel 9.2 perkembangan garis kemiskinan pada tahun 2010-2018 yang semakin naik tidak menyebabkan naiknya persentase penduduk miskin. Kenaikan inflasi dan garis kemiskinan menyebabkan melambatnya penurunan jumlah penduduk miskin.

9.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkeci ljumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.



Sumber : BPS

Gambar 9.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo, 2010-2018

Grafik perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, dengan demikian ada peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan namun dari angka yang ada menunjukkan bahwa masih ada penduduk di Kabupaten Wonosobo yang hidup dalam kekurangan karena masih ada kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang masih menunjukkan angka 0.78 pada tahun 2018. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran walaupun sama-sama miskin, antar orang miskin ada ketimpangan pengeluaran yang masih cenderung tinggi, walaupun telah juga mengalami penurunan ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB 10

Indeks Pembangunan Manusia

BAB X

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

10.1. Konsep

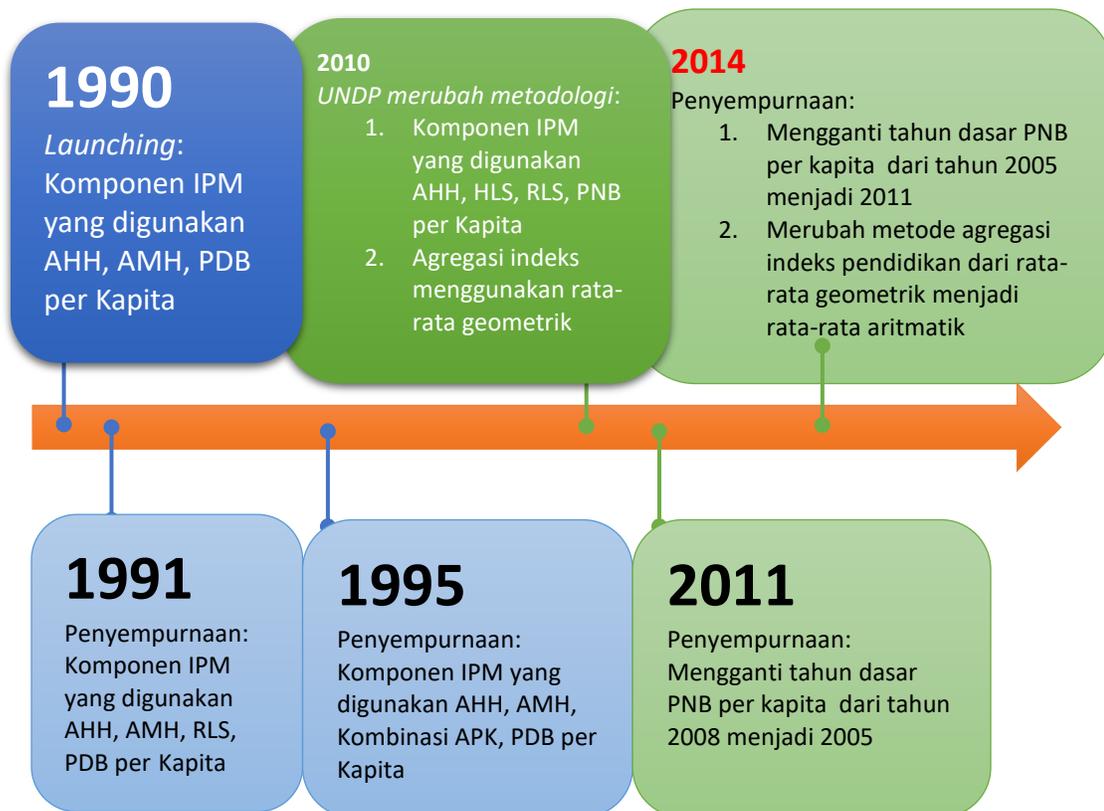
Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, juga untuk bisa membaca dan menulis. Laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) oleh *The United Nations Development Programme (UNDP)*, yang kini menjadi acuan pembangunan di berbagai negara di dunia dengan jelas membuktikan bahwa pembangunan manusia mendorong pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia maka tidak akan bertahan lama.

Untuk mengetahui kinerja pembangunan manusia suatu Negara atau wilayah, *UNDP* merumuskan suatu indikator yang dinamakan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat ukur berupa indikator komposit tentang gambaran pencapaian pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perlu diketahui bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

10.2. Perubahan Metodologi IPM

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru).



Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

AMH pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan IPM Metode Baru

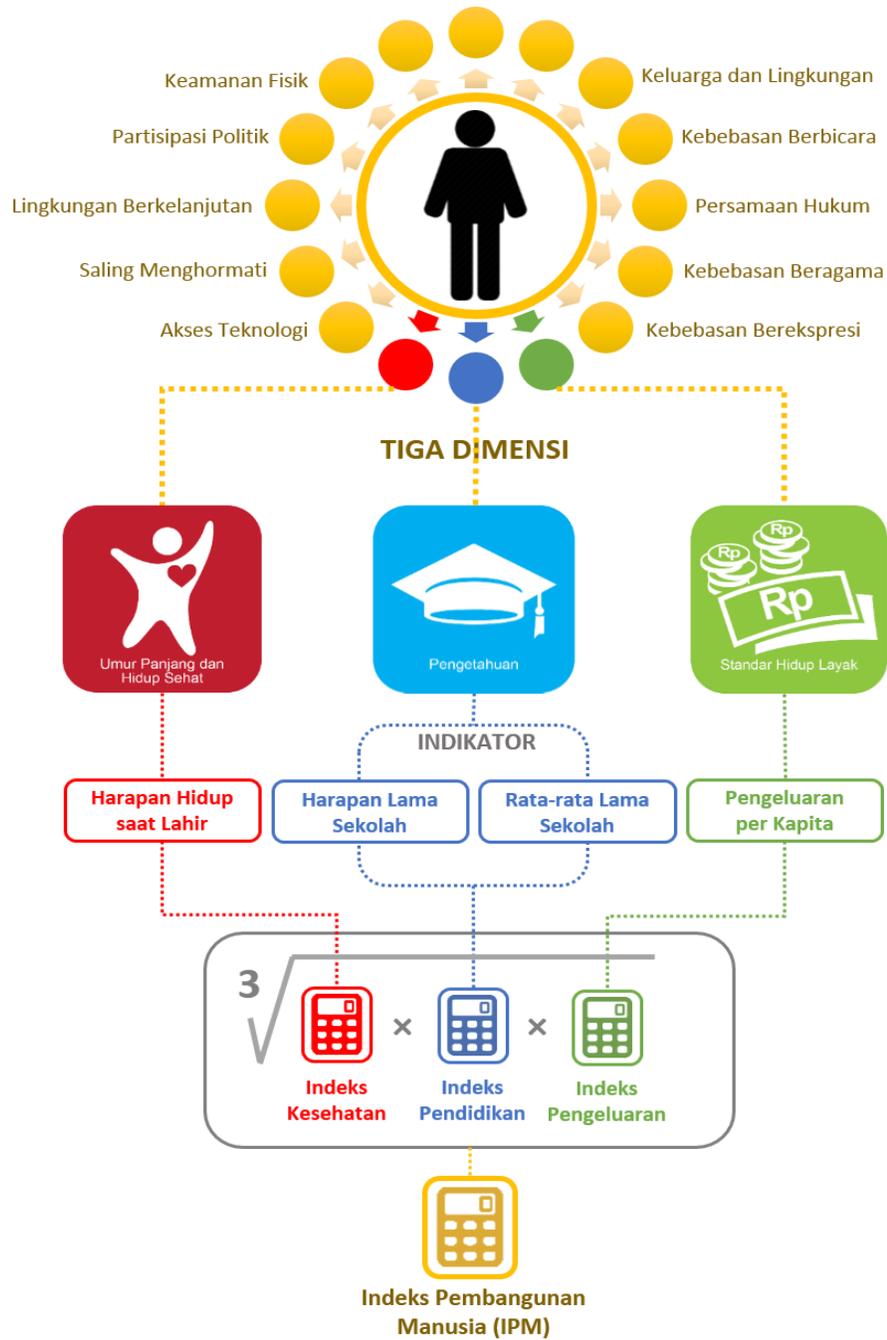
Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Bagaimana IPM Metode Baru Diukur?



Menghitung Indeks Komponen

Dimensi Kesehatan



$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan



$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimensi Pengeluaran



$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

10.3. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Ketersediaan data

- Angka Harapan Hidup saat lahir (Sensus Penduduk tahun 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk).
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-Susenas).

- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas.

Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup Saat Lahir(AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir(AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir(AHH)
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Harapan Lama Sekolah(HLS)	1. Harapan Lama Sekolah(HLS)
	2. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	2. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pengetahuan}} + I_{\text{pendapatan}})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	

Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy*-e₀)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dengan cara

tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

Rata-rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*)

Rata-rata lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan asumsi, kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Penghitungan Paritas Daya Beli

Paritas daya beli dihitung sebagai perbandingan rata-rata geometrik harga paket komoditas barang dan jasa di suatu wilayah terhadap Jakarta Selatan.

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ik} : harga komoditas di Jakarta Selatan

Klasifikasi Pembangunan Manusia

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



Mengukur Kecepatan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu yang digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

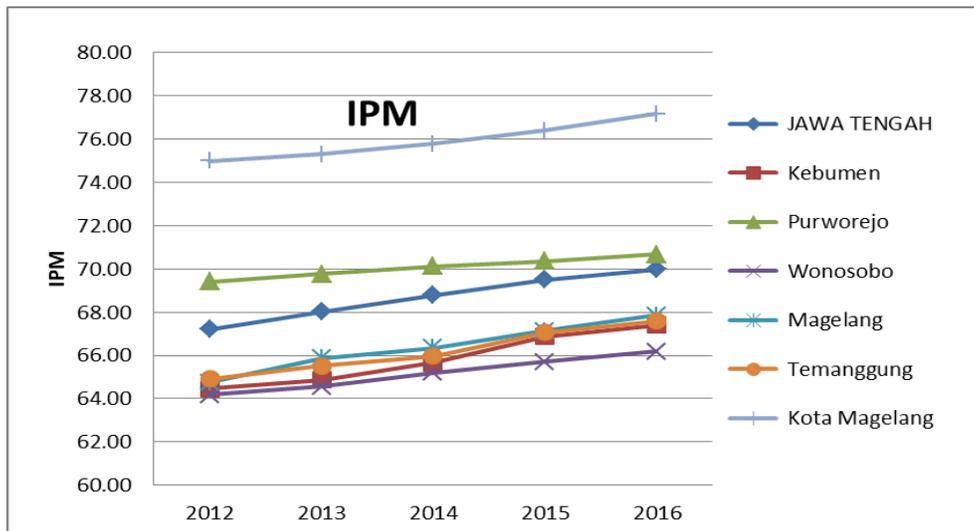
10.4. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2017

Tabel 10.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2012—2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,63	70,76	70,82	71,02	71,16	71,30
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,83	11,03	11,34	11,43	11,67	11,68
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,90	5,92	6,07	6,11	6,12	6,51
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah PPP)	9.404	9.155	9.189	9.305	9.497	9.601
IPM	64,18	64,57	65,20	65,70	66,19	66,89

Sumber : BPS

Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan adanya peningkatan. IPM tahun 2017 sebesar 66,89 meningkat 2,71 point atau jika dibanding tahun 2012 sebesar 64,18. Mengacu pada klasifikasi *UNDP*, sepanjang tahun 2017 IPM Kabupaten Wonosobo termasuk pada kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$).



Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan antara komponen pembentuk angka IPM menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 7,80% dan terendah adalah komponen Angka Harapan Hidup (tahun) sebesar 0,75%, hal ini menunjukkan bahwa bidang Angka Harapan Hidup (tahun) perlu dilakukan akselerasi pembangunan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat paling bawah di setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikasi sederhana bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih di bawah kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Berikut disajikan perkembangan IPM kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Kedu 2012-2017.

Sumber : BPS

Gambar 10.1. IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2012-2017

Jika dilihat secara lebih luas di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2012-2016 IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat ke 30-31 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang disusul berikutnya IPM Kota Salatiga masing-masing sebesar 81,19 dan 81,14. Sedangkan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes sebesar 63,98 atau selisih sekitar 2,21 poin dibandingkan IPM Kabupaten Wonosobo yang berada pada peringkat 31 se Provinsi Jawa Tengah.

Melihat perkembangan peringkat IPM yang selalu paling rendah dibandingkan kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu dan peringkat ke-31 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo perlu untuk meningkatkan pembangunan di semua unsur-unsur pembentuk IPM yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi masyarakat, meskipun dampak dari usaha yang dilakukan saat ini akan kelihatan hasilnya setelah beberapa tahun mendatang, tidak bisa secara instan langsung berdampak yang signifikan pada angka IPM ditahun berikutnya.

BAB 11

**PDRB Kabupaten
Wonosobo**

BAB XI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN WONOSOBO

Produk Domestik Regional Bruto atau biasa disingkat PDRB merupakan salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi konsumsi antara/biaya antara. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

a. Penggunaan harga pada tahun dasar

Setiap publikasi PDRB selalu disajikan dalam dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku didasarkan pada perkalian antara barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun dengan harga yang terjadi pada tahun bersangkutan. Jadi pertumbuhan yang terjadi pada PDRB atas dasar harga berlaku bukan merupakan pertumbuhan riil/nyata karena masih dipengaruhi oleh perkembangan harga/inflasi, sehingga pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tidak bisa dijadikan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB atas dasar harga konstan didasarkan pada perkalian antara barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun dengan harga yang terjadi pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai acuan/patokan, sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil/nyata karena pertumbuhan tersebut semata-mata hanya didasarkan pada naik turunnya produksi barang/jasa. Dengan kata lain pertumbuhan yang terjadi sama sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, karena harga barang/jasa sudah dipatok pada tahun dasar yang sudah ditentukan. Jadi pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan merupakan cermin dari produksi

barang/jasa secara riil/nyata yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada waktu tertentu, biasanya dihitung setiap satu tahun sekali.

Tahun dasar adalah tahun yang digunakan sebagai rujukan penilaian (*reference year*) dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan tahun dasar dan perubahannya merupakan rekomendasi yang dibuat oleh PBB bagi seluruh negara agar selalu berupaya untuk memperbarui tata cara serta teknik penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun yang dianggap lebih “*uptodate*”, mengikuti perubahan dan perkembangan tatanan yang terjadi. Serial penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2000 dianggap sudah terlalu lama, selain itu serial tahun dasar tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kondisi ekonomi yang terjadi. Oleh sebab itu serial penghitungan angka PDRB publikasi sekarang dan yang akan datang secara nasional maupun regional telah direkomendasikan untuk menggunakan tahun dasar 2010, karena pada tingkat nasional tahun tersebut dianggap tahun yang representatif untuk digunakan sebagai rujukan bagi penghitungan PDRB tahun-tahun lainnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB/PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

b. Tahun 2010 sebagai Tahun Dasar.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010

dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output Kategori yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*.
- Valuasi : Nilai tambah Kategori dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi :
Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional *Standard Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Kategori Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI2010).

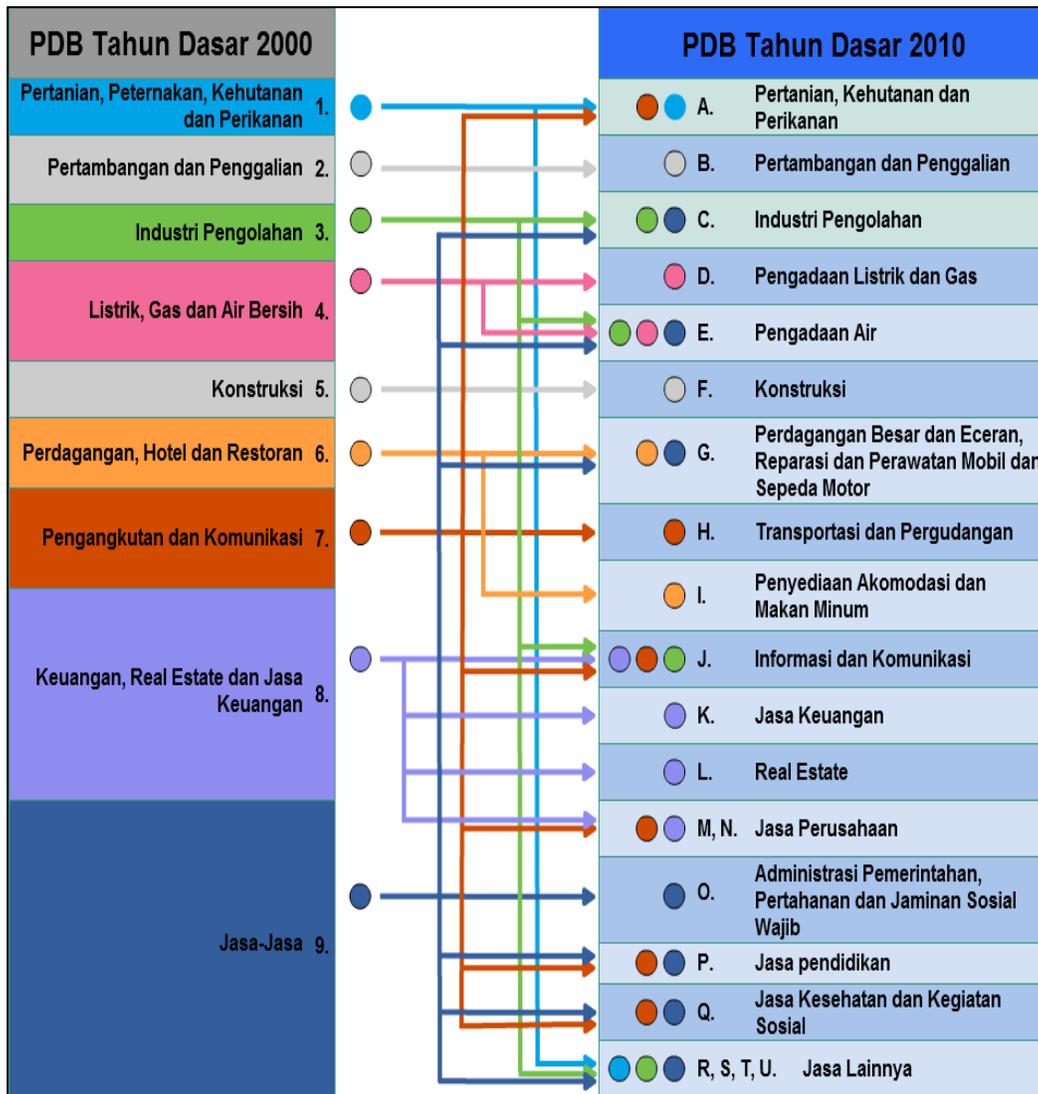
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 11.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge (IBSC)</i> .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)</i>
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut Kategori tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Kategori Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 11.1. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010

11.1. Nilai Nominal PDRB

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah.

11.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adhb

Selama tiga tahun terakhir, PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan gambaran tentang kinerja ekonomi makro di Kabupaten Wonosobo dari waktu ke waktu yang terus membaik.

Tabel 11.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2013 – 2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.910.220,64	4.293.200,78	4.608.009,96	5.013.846,93	5.020.393,43
B	Pertambangan dan Penggalian	109.515,99	115.297,90	133.036,34	140.377,17	151.365,21
C	Industri Pengolahan	1.980.079,05	2.219.188,74	2.424.228,17	2.605.852,68	2.784.591,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.920,18	4.341,99	4.705,00	4.927,73	5.441,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.445,87	14.291,35	15.108,54	15.768,45	16.425,72
F	Konstruksi	712.641,03	800.192,94	892.610,33	972.750,93	1.064.705,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.032.311,93	2.194.016,42	2.360.730,61	2.551.521,52	2.773.389,00
H	Transportasi dan Pergudangan	559.875,59	647.921,66	718.909,40	781.547,29	874.992,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	369.503,98	416.587,31	464.952,78	490.661,29	520.973,71
J	Informasi dan Komunikasi	126.730,34	136.464,71	148.223,89	159.196,67	188.318,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	341.453,56	380.820,78	426.753,46	478.706,02	525.659,53
L	Real Estate	171.014,81	191.572,37	212.050,21	229.210,55	250.232,76
M,N	Jasa Perusahaan	25.375,63	28.728,34	33.285,02	37.684,40	42.522,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	318.057,91	341.924,39	374.462,20	403.188,54	427.107,64
P	Jasa Pendidikan	700.220,18	778.751,78	842.306,51	932.140,49	1.047.165,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.806,17	169.701,10	191.085,02	211.447,28	235.304,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	231.351,36	268.087,92	286.203,12	319.673,86	356.655,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11.749.524,22	13.001.090,49	14.136.660,57	15.348.501,80	16.285.243,83

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

11.1.2. Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (adhk)

Perkembangan PDRB adhk dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas secara nyata, faktor pengaruh perubahan harga perlu dihilangkan yaitu dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini, selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang besarnya sama dengan 100 persen, dan difungsikan sebagai pembanding harga-harga pada tahun-tahun tertentu yang akan diselidiki.

Tabel 11.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2013 – 2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.402.316,96	3.518.265,83	3.617.584,00	3.810.795,26	3.766.629,73
B	Pertambangan dan Penggalan	99.758,48	101.921,64	102.685,71	105.298,55	109.222,01
C	Industri Pengolahan	1.712.642,25	1.783.409,98	1.879.373,30	1.944.374,40	2.022.990,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.192,44	4.408,40	4.546,11	4.653,32	4.730,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.976,81	13.486,69	13.771,79	14.080,68	14.260,91
F	Konstruksi	637.351,19	659.648,10	701.666,34	749.912,24	803.674,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.862.820,63	1.958.338,23	2.040.784,91	2.134.763,83	2.220.717,07
H	Transportasi dan Pergudangan	553.527,57	599.050,35	642.642,54	689.598,14	731.102,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	318.665,14	341.229,63	366.625,62	366.602,46	376.631,00
J	Informasi dan Komunikasi	130.688,79	146.518,33	160.320,36	172.034,33	194.862,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	281.888,47	300.078,58	321.230,92	349.141,74	369.447,05
L	Real Estate	166.108,76	176.900,81	190.235,20	203.199,83	216.389,45
M,N	Jasa Perusahaan	21.988,01	23.982,82	26.343,04	28.877,99	31.395,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	270.266,08	272.826,23	287.162,17	293.298,48	300.738,56
P	Jasa Pendidikan	524.196,65	561.432,81	595.947,11	635.358,88	680.763,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.809,06	131.542,62	140.855,83	154.555,35	167.552,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	216.559,76	235.127,62	242.305,08	259.453,43	281.695,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10.333.757,05	10.828.168,68	11.334.080,04	11.915.998,92	12.292.804,84

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

11.2. Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi

Salah satu indikator yang banyak diperhatikan dalam PDRB adalah Peranan atau kontribusi sektor dalam perekonomian suatu wilayah. Kontribusi ini akan membentuk Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian diikuti dengan kenaikan sektor industri.

Peranan masing-masing sektor/kategori terhadap total PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan walaupun biasanya tidak begitu frontal. Pada tahun 2017, peranan sektor pertanian masih sangat dominan dengan menduduki peringkat tertinggi walaupun mengalami penurunan yang cukup tajam. Sektor pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh sektor pertanian. Selama empat tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan. Yaitu dari 33,28% pada tahun 2013, menurun menjadi 33,02% pada tahun 2014 dan menurun lagi menjadi sebesar 32,60% pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 meningkat tipis menjadi 32,67% seiring dengan meningkatnya nilai tambah dari kategori pertanian dan menurun tajam ditahun 2017 sebesar 30,83%. Penurunan peranan ini disebabkan turunnya nilai tambah dari sektor pertanian akibat menurunnya produksi pertanian.

Sektor industri pengolahan menempati urutan ke dua dalam kontribusi terhadap PDRB meskipun selisih tipis dengan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor . Kategori ini memiliki peranan 17,10%

ditahun 2017 sedangkan kategori perdagangan memiliki peran 17,03%. Peran sektor industri pengolahan diharapkan akan terus meningkat dengan adanya penguatan di usaha-usaha UMKM.

Tabel 11.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2017 (persen),

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,28	33,02	32,60	32,67	30,83
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,89	0,94	0,91	0,93
C	Industri Pengolahan	16,85	17,07	17,15	16,98	17,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi	6,07	6,15	6,31	6,34	6,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,30	16,88	16,70	16,62	17,03
H	Transportasi dan Pergudangan	4,77	4,98	5,09	5,09	5,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	3,20	3,29	3,20	3,20
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,05	1,05	1,04	1,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,93	3,02	3,12	3,23
L	Real Estate	1,46	1,47	1,50	1,49	1,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,71	2,63	2,65	2,63	2,62
P	Jasa Pendidikan	5,96	5,99	5,96	6,07	6,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,31	1,35	1,38	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,97	2,06	2,02	2,08	2,19
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

11.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Untuk menghitung laju pertumbuhan (*rate of growth*) PDRB dalam suatu periode (n tahun) dapat dipakai formula:

$$g = \left(\left(\frac{Y_t}{Y_{t-1}} \times 100\% \right) - 100\% \right)$$

dimana : g = laju pertumbuhan
 Y_t = PDRB tahun ke - t
 Y_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya
 n = jumlah tahun dalam satu periode

Dari tabel 12.4. dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 sebesar 4,0 persen, di tahun 2014 sebesar 4,78 persen dan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 4,67 persen, ditahun 2016 mengalami pertumbuhan 5,13 persen dan pada tahun 2017 pertumbuhan melambat pada angka 3,16 persen, melambat dari tahun sebelumnya.

Perlambatan yang cukup signifikan ini dipicu karena menurunnya produksi disektor pertanian. Hampir disemua subsektor mengalami penurunan, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan. Hanya disub sektor peternakan yang masih memberikan pertumbuhan yang positif.

Tabel 11.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen), 2013 – 2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,13	3,41	2,82	5,34	-1,16
B	Pertambangan dan Penggalian	3,78	2,17	0,75	2,54	3,73
C	Industri Pengolahan	5,63	4,13	5,38	3,46	4,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,50	5,15	3,12	2,36	1,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	3,93	2,11	2,24	1,28
F	Konstruksi	5,96	3,50	6,37	6,88	7,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,45	5,13	4,21	4,61	4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	9,18	8,22	7,28	7,31	6,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,46	7,08	7,44	-0,01	2,74
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	12,11	9,42	7,31	13,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	6,45	7,05	8,69	5,82
L	Real Estate	7,04	6,50	7,54	6,82	6,49
M,N	Jasa Perusahaan	10,84	9,07	9,84	9,62	8,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,35	0,95	5,25	2,14	2,54
P	Jasa Pendidikan	9,50	7,10	6,15	6,61	7,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,57	11,66	7,08	9,73	8,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,82	8,57	3,05	7,08	8,57
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,00	4,78	4,67	5,13	3,16

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

11.4. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi)

Inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan. Indeks harga ini dapat diturunkan juga dari perhitungan PDRB yang disebut sebagai "PDRB *deflator*" atau yang dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), indeks implisit menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen dan harga yang dicakup dalam indeks ini relatif lebih lengkap. Indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga. Untuk kepentingan analisa, indeks implisit lebih sesuai jika

disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu.

Secara sederhana indeks implisit ini dapat dihitung dengan formula:

$$I_t = \frac{X_{it}}{Y_{it}} \times 100\%$$

dimana : I_t = Indeks Implisit
 X_{it} = PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun ke - t
 Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun ke - t

Perubahan harga produsen barang dan jasa diperoleh berdasarkan pertumbuhan indeksimplisit yang dapat dihitung dengan formula:

$$\Delta I_t = \left(\frac{I_t}{I_{t-1}} \times 100\% \right) - 100\%$$

dimana :
 Δ = Perubahan harga produsen tahun ke - t terhadap tahun sebelumnya
 I_{t-1} = Indeks implisit tahun sebelumnya

Tabel 11.6. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2013 - 2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114,93	122,03	127,38	131,57	133,29
B	Pertambangan dan Penggalian	109,78	113,12	129,56	133,31	138,58
C	Industri Pengolahan	115,62	124,44	128,99	134,02	137,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93,51	98,49	103,50	105,90	115,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,61	105,97	109,71	111,99	115,18
F	Konstruksi	111,81	121,31	127,21	129,72	132,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109,10	112,03	115,68	119,52	124,89
H	Transportasi dan Pergudangan	101,15	108,16	111,87	113,33	119,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,95	122,08	126,82	133,84	138,32
J	Informasi dan Komunikasi	96,97	93,14	92,45	92,54	96,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121,13	126,91	132,85	137,11	142,28
L	Real Estate	102,95	108,29	111,47	112,80	115,64
M,N	Jasa Perusahaan	115,41	119,79	126,35	130,50	135,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	117,68	125,33	130,40	137,47	142,02
P	Jasa Pendidikan	133,58	138,71	141,34	146,71	153,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,07	129,01	135,66	136,81	140,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	106,83	114,02	118,12	123,21	126,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,70	120,07	124,73	128,81	132,48

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Gambaran perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan inflasi yang dapat dikendalikan memberikan informasi adanya gerak laju pertumbuhan yang positif. Kondisi tersebut akan dapat bertahan apabila tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, konflik antar daerah tidak mencuat, investasi mulai berjalan, juga pengaruh iklim dan cuaca yang mendukung produksi pertanian sebagai sektor andalan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 11.7. Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2013 - 2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,68	6,18	4,39	3,29	1,30
B	Pertambangan dan Penggalian	3,21	3,05	14,53	2,90	3,95
C	Industri Pengolahan	1,98	7,63	3,66	3,90	2,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,37	5,33	5,08	2,32	8,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,20	2,27	3,53	2,08	2,85
F	Konstruksi	2,80	8,49	4,87	1,97	2,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,85	2,69	3,25	3,32	4,49
H	Transportasi dan Pergudangan	0,84	6,93	3,43	1,31	5,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,10	5,29	3,88	5,54	3,35
J	Informasi dan Komunikasi	-2,10	-3,95	-0,73	0,09	4,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,02	4,77	4,68	3,21	3,77
L	Real Estate	0,23	5,19	2,93	1,20	2,52
M,N	Jasa Perusahaan	4,82	3,80	5,48	3,28	3,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,54	6,50	4,05	5,42	3,31
P	Jasa Pendidikan	8,52	3,84	1,90	3,80	4,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,48	5,69	5,16	0,85	2,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,53	6,73	3,59	4,31	2,76
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,65	5,60	3,88	3,27	2,85

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dibandingkan dengan tahun 2010 sebagai tahun dasar, diperoleh indeks implisit pada tahun 2012 sebesar 109,70 meningkat di tahun 2013 sebesar 113,70, meningkat menjadi 130,50 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 mencapai 128,58. Sedangkan angka inflasi PDRB tahun 2012 mencapai 3,63%, tahun 2013 mencapai 3,65%, tahun 2014 mencapai 5,60%, tahun 2015 3,88% tahun 2016 mencapai 3,27% dan pada tahun 2017 mencapai 2,85%.

Laju inflasi dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, meskipun peningkatan dan penurunan ini masih dalam batas wajar. inflasi yang diharapkan adalah tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi yang menunjukkan ada pergerakan ekonomi.

11.5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

Tabel 11.8. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2013 –2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Harga Berlaku (juta Rupiah)	11.749.524,22	13.001.090,49	14.136.660,57	15.348.501,80	16.285.243,83
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	769.396,00	773.391,00	777.122,00	780.793,00	784.207,00
	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah/Jiwa/tahun)	15.271,10	16.810,50	18.191,04	19.657,58	20.766,51

Sumber Data : BPS

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo tahun 2013 sebesar 15,271 juta mengalami peningkatan sebesar 7,80% dibandingkan tahun 2012. Demikian pula untuk tahun 2014 sebesar 16,810 juta meningkat sebesar 10,08% dibandingkan tahun 2013. Untuk tahun 2015 meningkat 8,21 % dibanding tahun sebelumnya, dan pada tahun 2016 meningkat 8,06% dengan nominal 19,66 Juta/jiwa/tahun. Pada tahun terakhir 2017 PDRB perkapita sebesar 20,77 juta/jiwa/tahun meningkat 5,64%. Peningkatan PDRB per kapita ini menggambarkan secara kenaikan daya beli masyarakat secara umum Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun. Dapat dimaknai pula bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk Kabupaten Wonosobo meningkat dari tahun ke tahun.

BAB 12

Inflasi

BAB XII

INFLASI

12.1. Pengantar

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, gejolak terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Penentuan jumlah, jenis, dan kualitas dalam paket komoditi barang dan jasa serta bobot timbangannya dalam IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH). SBH yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 di 82 daerah perkotaan yang mencakup 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Periode waktu tertentu (telah ditentukan) yang dipakai sebagai dasar pembandingan disebut periode dasar atau tahun dasar. IHK pada tahun dasar bernilai sama dengan 100 ($IHK_0=100$). Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Berikut adalah kegunaan dari data IHK dan laju inflasi antara lain:

1. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*)
2. Penyesuaian Nilai Kontrak
3. Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*)
4. Penentuan Target Inflasi (*Inflation targetting*)

5. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget indexation*)
6. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP Deflator*).
7. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*)
8. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

12.2. Pemilihan Komoditi

Pada prinsipnya, semua komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masuk dalam paket komoditas yang baru. Mengingat begitu banyak jenis dan ragamnya, maka dilakukan pemilihan komoditas-komoditas yang masuk dalam paket komoditas, dengan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Kepentingan relatif dari setiap komoditas terhadap total pengeluaran rumah tangga dari rumah tangga sampel.
- b. Keterwakilan (*representativeness*) dari komoditas sebagai suatu indikator harga untuk komoditas sejenis dalam kategori yang sama.
- c. Kemampuan harga (*price ability*) yaitu satuan kuantitas, spesifikasi dan jenis dapat dirinci dengan jelas.
- d. Kelangsungan (*continuity*) harga dapat dipantau terus menerus.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose – COICOP*) yang diadaptasi oleh BPS untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga), yaitu:

- Kelompok Bahan Makanan
- Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- Kelompok Perumahan
- Kelompok Sandang
- Kelompok Kesehatan
- Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

12.3. Formulasi Penghitungan IHK dan Inflasi

12.3.1. Formula Penghitungan IHK

Karena IHK mengukur perubahan harga secara periodik dengan paket komoditas yang tetap, maka penghitungannya menggunakan rumus Modifikasi Laspeyers (*Modified Laspeyers*) dengan tahun dasar tertimbang. Rata-rata untuk periode 12 bulan mencakup Januari sampai dengan Desember 2012 diambil sebagai tahun dasar.

Pada *higher level index*, IHK dihitung dengan menggunakan formula Indeks Modified Laspeyres.

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{oi}} \times 100$$

dimana:

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga jenis barang i, periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)

$P_{0i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, pada periode tahun dasar

$P_{(n-1)i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, period ke-(n-1)

k = Jumlah jenis barang dalam paket komoditas

12.3.2. Formula Penghitungan Inflasi/Deflasi

Metode penghitungan laju inflasi yang dipergunakan adalah metode "*point to point*", yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya. Laju inflasi bulanan dihitung dengan metode "*month to month (mom)*" yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya. Laju inflasi setahun dihitung dengan metode "*year on year (yoy)*" yaitu dengan menghitung IHK Desember tahun berjalan dengan membandingkan IHK Desember tahun sebelumnya.

✓ **Rumus Umum:**

$$\text{laju Inflasi periode } n = \frac{\text{IHK periode } n - \text{IHK periode } n - 1}{\text{IHK periode } n - 1}$$

n adalah bulan/tahun tertentu.

✓ **Inflasi Bulanan**

$$\text{Inflasi}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$$

Dimana:

IHK_n = Indeks bulan ke-n

IHK_(n-1) = Indeks bulan ke (n-1)

✓ **Laju inflasi Tahun kalender**

$$\text{I (Kalender)}_i = \frac{\text{IHK}_{iy} - \text{IHK}_{\text{Des}(y-1)}}{\text{IHK}_{\text{Des}(y-1)}} \times 100$$

Dimana:

IHK_{iy} = IHK bulan i pada tahun y

IHK_{Des(y-1)} = IHK Des pada tahun (y-1)

✓ **Laju Inflasi Year on Year**

$$\text{I (YoY)}_i = \frac{\text{IHK}_{iy} - \text{IHK}_{i(y-1)}}{\text{IHK}_{i(y-1)}} \times 100$$

Dimana:

IHK_{iy} = IHK bulan i pada tahun y

IHK_{i(y-1)} = IHK bulan i pada tahun (y-1)

12.3.3. Penghitungan Andil (*share*) Inflasi/Deflasi

Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan, sesungguhnya merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap komoditi yang mengalami fluktuasi harga tersebut dapat diketahui besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional.

Rumus umum untuk menghitung besarnya andil inflasi adalah:

$$A_{ni} = \frac{[\%NK]_{(n-1)} \times \Delta RH_{ni}}{100}$$

Dimana:

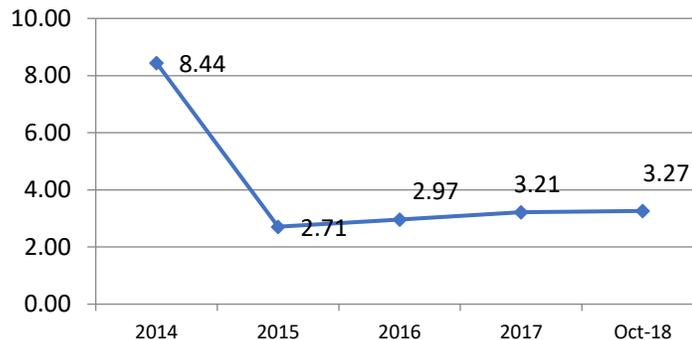
A_{ni} = Andil inflasi barang i bulan -n

$[\%NK]_{(n-1)}$ = Persentase barang i terhadap total pada bulan (n-1)

ΔRH_{ni} = perubahan harga barang i pada bulan n

12.4. Perkembangan IHK dan Inflasi

Sampai bulan Oktober 2018 di Kabupaten Wonosobo secara akumulatif telah terjadi inflasi sebesar 3,27 persen. Angka inflasi akumulatif tahun 2018 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2017 yaitu sebesar 3,21 persen. Adapun perkembangan inflasi pertengahan tahun selama kurun waktu 2014 – Oktober 2018 dapat dilihat pada gambar 12.1.



Sumber: BPS

Gambar 12.1. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo, 2014 - 2018 (persen)

Dalam kurun waktu 10 bulan selama tahun 2018, 8 bulan mengalami inflasi dan 2 bulan mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 1,87 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,03 persen. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 0,43 persen dan yang terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,21 persen.

Pada tahun 2017 inflasi Wonosobo sebesar 3,21 persen lebih rendah dibanding inflasi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,71 persen. Beberapa kelompok pengeluaran Wonosobo yang lebih tinggi dari kelompok pengeluaran Jawa Tengah adalah kelompok pengeluaran bahan makanan serta kelompok pengeluaran sandang. Sedangkan kelompok pengeluaran lainnya lebih rendah dari inflasi Jawa Tengah.

Tabel 12.1. Inflasi Akumulatif Wonosobo dan Jawa Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran Sampai Oktober 2018 (persen)

Kelompok Pegeluaran	Inflasi (%)	
	Wonosobo	Jateng
Umum	3,27	2,13
Bahan Makanan	-2,72	1,52
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	6,07	3,06
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,87	1,73
Sandang	5,21	2,27
Kesehatan	2,36	2,88
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,59	1,72
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	5,62	2,35

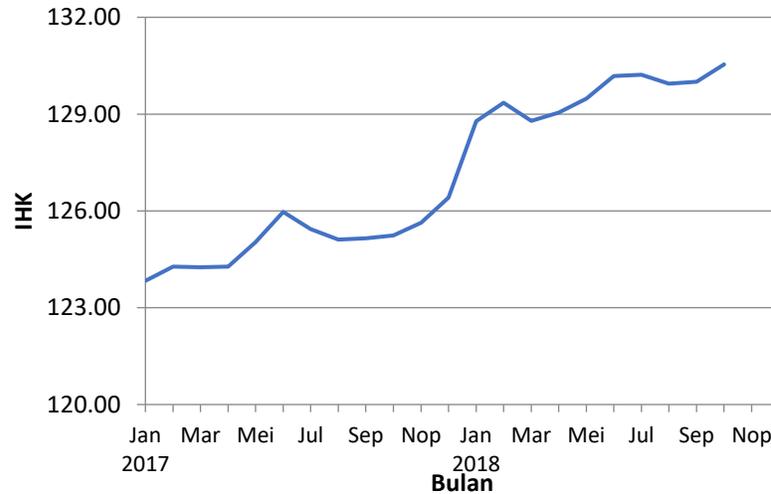
Sampai bulan Oktober 2018, kelompok Bahan Makanan mengalami deflasi sebesar 2,72 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 6,07 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar mengalami inflasi sebesar 5,87 persen; kelompok Sandang mengalami

inflasi sebesar 5,21 persen, kelompok Kesehatan mengalami inflasi sebesar 2,36 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga mengalami inflasi sebesar 0,59 persen; dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi sebesar 5,62 persen.

Tabel 12.2. Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2016-2018

No	Bulan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Januari	0,41	1,11	1,87
2.	Februari	-0,19	0,36	0,44
3.	Maret	0,22	-0,02	-0,43
4.	April	-0,10	0,02	0,19
5.	Mei	0,02	0,61	0,34
6.	Juni	0,87	0,75	0,54
7.	Juli	0,82	-0,42	0,03
8.	Agustus	-0,01	-0,25	-0,21
9.	September	0,10	0,03	0,05
10.	Oktober	0,02	0,08	0,41
11.	November	0,46	0,31	
12.	Desember	0,32	0,62	

Sumber : BPS



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Gambar 12.2. IHK Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2017–2018

Komoditas yang dominan mengalami inflasi di Kota Wonosobo tahun 2018 (sampai bulan Oktober) adalah minuman ringan, kol putih/kubis, pisang, celana panjang jeans wanita dan kerudung/jilbab. Komoditas yang dominan mengalami deflasi di Kota Wonosobo tahun 2018 (sampai bulan Oktober) adalah bawang merah, tomat sayur, bayam, kacang panjang dan kangkung.

BAB 13

Produk Domestik Regional Bruto

BAB XIII

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

13.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

13.2. AGREGAT PDRB KABUPATEN WONOSOBO MENURUT PENGELUARAN

Pada tahun 2017, nilai ekonomi Kabupaten Wonosobo mencapai Rp. 16,29 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor. Komponen Konsumsi rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi daya beli masyarakat yang notabene sebagian besar adalah petani. Turunnya hasil produksi pertanian sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat Wonosobo.

Secara umum ekonomi Kabupaten Wonosobo masih tergerus dengan tingginya impor yang besarnya sampai dengan tahun 2017 masih di atas ekspor Kabupaten Wonosobo walaupun rasionya sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 13.1. Trade Balance dan Rasio Perdagangan Luar Kabupaten Wonosobo

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Trade balance	0,77	0,80	0,80	0,84	0,86

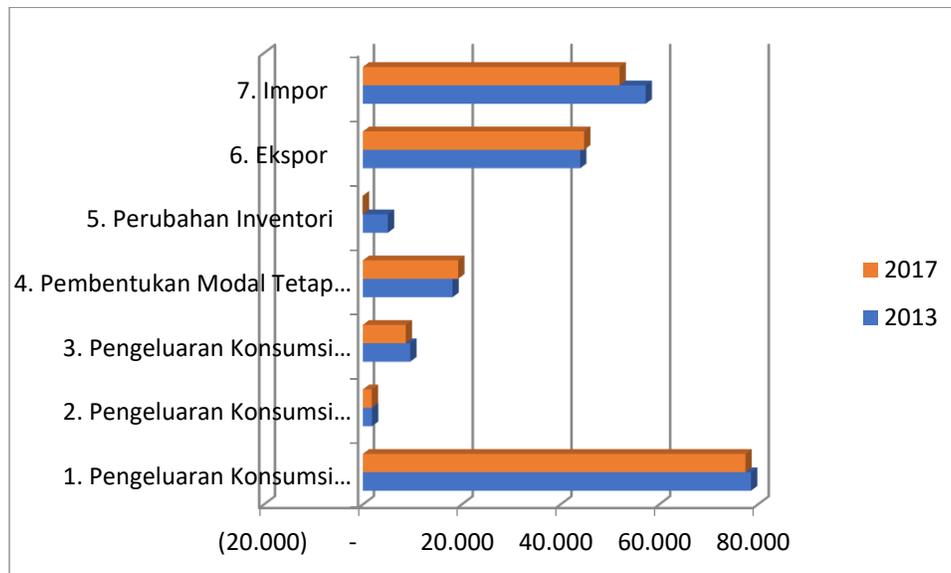
Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

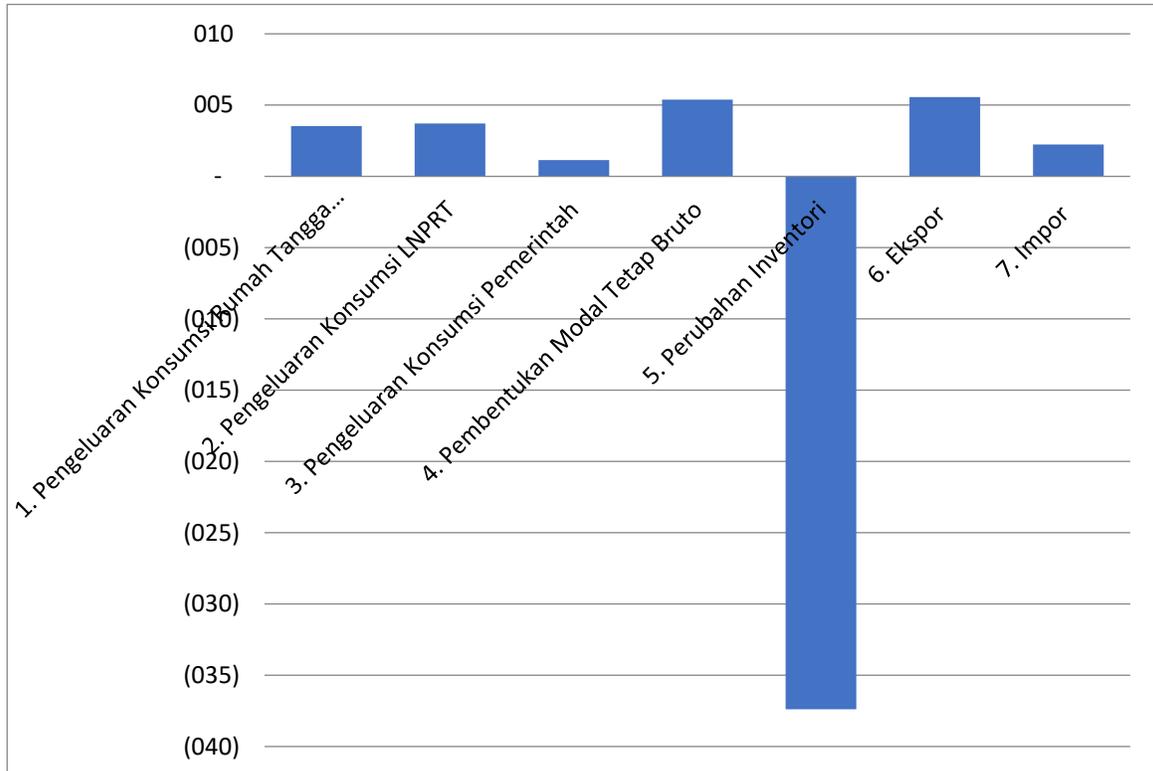
Selama kurun waktu 2013 - 2017, *trade balance* Kabupaten Wonosobo semakin baik, yang berarti bahwa besaran ekspor semakin tinggi dan mendekati besaran impor.

Komponen konsumsi Rumah tangga meskipun secara struktur ekonomi masih memiliki peranan yang terbesar, akan tetapi dalam lima tahun terakhir dominasinya semakin mengecil. Peranan ini diambil alih oleh ekspor dan PMTB yang semakin meningkat. Peningkatan peranan ekspor memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Kabupaten Wonosobo semakin luas, tidak sekedar lokal Kabupaten Wonosobo. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.



Gambar 13.1. Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2013 ke 2017

Perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang terjadi di tahun 2017 tidak begitu berpengaruh terhadap struktur ekonomi, yang masih tetap didominasi konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan Perubahan Inventori memberikan andil besar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi secara total. Pertumbuhan negatif pada komponen Perubahan Inventori menunjukkan stok yang ada dimasyarakat berkurang yang didukung dengan melambatnya import barang.



Gambar 13.2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2013 ke 2017

13.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

PDRB Kabupaten Wonosobo menurut pengeluaran masih di dominasi komponen Konsumsi akhir rumah tangga. Konsumsi ini dipenuhi dari produk lokal dan produk impor, baik impor dari luar negeri maupun provinsi lain. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 dipengaruhi turunnya daya beli masyarakat akibat turunnya produksi-produk pertanian. Walaupun demikian Dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi

akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang didorong oleh penambahan jumlah penduduk yang semakin banyak.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Kabupaten Wonosobo menurut pengeluaran. Konsumsi ini dipenuhi dari produk lokal dan produk impor, baik impor dari luar negeri maupun provinsi lain. Secara agregat dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang didorong oleh penambahan jumlah penduduk maupun pendapatan yang semakin membaik.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama periode tahun 2013 s.d 2017 cenderung menurun. Tahun 2013 proporsinya merupakan yang paling tinggi yaitu 78,63 persen, sementara tahun 2017 dengan porsi 77,51 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 77,41 persen. Kenaikan proporsi ini lebih banyak dipengaruhi karena menurunnya peranan komponen lain terutama pada komponen Perubahan Inventory. Fluktuasi pada komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

Tabel 13.2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	9.238.362,92	10.149.881,06	11.051.839,63	11.880.975,26	12.622.319,24
ADHK (juta)	8.018.005,35	8.290.336,88	8.608.241,30	8.936.607,86	9.214.888,67
Distribusi (ADHB) %	78,63	78,07	78,18	77,41	77,51
Pertumbuhan (ADHK) %	3,46	3,40	3,83	3,81	3,11

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga Konstan 2010 sebesar 3,46 persen pada tahun 2013. Kemudian, berturut-turut sebesar 3,40 persen (2014), 3,83 persen (2015), 3,81 persen (2016), selanjutnya melambat menjadi 3,11 persen (2017).

13.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian sehingga ke depannya akan semakin meningkat. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar

untuk PKLNPRRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 13.3. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	219.393,32	254.923,67	272.058,58	271.625,48	295.039,73
ADHK (juta)	182.534,53	196.181,44	199.437,16	193.534,37	201.855,23
Distribusi (ADHB) %	1,87	1,96	1,92	1,77	1,81
Pertumbuhan (ADHK) %	8,07	7,48	1,66	(2,96)	4,30

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.3, Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga (LNPRT) pada tahun 2013 tumbuh pesat sebesar 8,07 persen, hal ini dikarenakan adanya persiapan pilpres secara langsung ditahun 2014. Konsumsi partai politik ditahun ini begitu besar dan terus berlanjut pada tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi perlambatan hingga minus 3,66 yang tentu saja merupakan titik balik hingar bingarnya pilpres yang dilanjutkan pilkada baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati di Kabupaten Wonosobo.

13.5. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas

barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan untuk adh Berlaku tapi terjadi penurunan untuk adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 817 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 1,322 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan mulai tahun 2013-2015 tapi menurun di tahun 2016 kemudian naik lagi di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas di tahun 2016 akibat penghematan oleh pemerintah dan normal kembali di tahun 2017 (Tabel 3.4).

**Tabel 13.4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
2013-2017**

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	1.126.890,64	1.194.229,93	1.337.880,43	1.357.230,47	1.412.984,73
ADHK (juta)	908.416,10	910.291,95	947.621,13	926.671,34	933.165,03
Distribusi (ADHB) %	9,59	9,19	9,46	8,84	8,68
Pertumbuhan (ADHK) %	2,88	0,21	4,10	-2,21	0,7

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi, dari 9,59 persen di tahun 2013 hingga 8,68 persen

pada tahun 2017. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2016; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 9,59 persen.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil berfluktuasi. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2015, sebesar 4,10 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi -2,21 persen, pada tahun 2017 tumbuh tipis 0,7 persen.

13.6. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal

(*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun lembaga non profit), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.5 di bawah menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 tumbuh dengan rincian pada tahun 2013 tumbuh 5,29 persen ,2014 tumbuh 3,03 persen, 2015 tumbuh 5,99 persen , tahun 2016 tumbuh 6,23 persen dan terkahir tahun 2017 tumbuh 6,27 persen.

Tabel 13.5. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	2.130.881,21	2.377.110,87	2.658.544,56	2.885.812,97	3.139.736,72
ADHK (juta)	1.885.644,09	1.942.813,56	2.059.121,27	2.189.204,68	2.326.524,20
Distribusi (ADHB) %	18,14	18,28	18,81	18,80	19,28
Pertumbuhan (ADHK) %	5,29	3,03	5,99	6,32	6,27

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

13.7. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 pertumbuhan negatif pada komponen ini memiliki arti bahwa produksi/input barang lebih rendah dibanding konsumsinya sehingga mengurangi stok atau inventori yang ada. Nilai

inventory yang selalu positif bisa diartikan barang berlebih dan menumpuk, jadi nilai negatif tidak selalu buruk bagi perekonomian suatu daerah.

Tabel 13.6. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	594.078,60	420.833,46	315.191,01	246.910,12	(14.244,39)
ADHK (juta)	313.478,66	323.413,41	150.687,55	149.940,27	(7.059,72)

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

13.8. PERKEMBANGAN EKSPOR - IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

c. Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah
- Impor antar daerah

Komoditas utama ekspor Kabupaten Wonosobo ke luar negeri adalah produk-produk pertanian dan hasil olahannya serta hasil industri. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekspor sebesar 2,22 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 5,28 persen. Kondisi ini dipicu dengan menurunnya hasil pertanian, dan melambatnya hasil industri.

Tabel 13.7. Perkembangan dan Struktur Export Barang dan Jasa

Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	5.168.635,74	5.710.035,34	6.149.158,52	6.706.244,96	7.294.191,35
ADHK (juta)	4.868.081,13	5.155.698,63	5.463.199,51	5.751.451,05	5.879.165,33
Distribusi (ADHB) %	43,99	43,92	43,50	43,69	44,79
Pertumbuhan (ADHK) %	8,42	5,91	5,96	5,28	2,22

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

Tabel 13.8 di bawah menunjukkan bahwa Nilai import Kabupaten Wonosobo adh Berlaku terus meningkat dari tahun 201 dengan nilai 6,73 trilyun hingga 2017 dengan nilai 8,64 trilyun rupiah.

Tabel 13.8. Perkembangan dan Struktur Import Barang dan Jasa Luar Daerah Tahun

2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	6.728.718,21	7.105.923,84	7.648.012,16	8.000.297,46	8.464.783,55
ADHK (juta)	5.842.402,82	5.990.567,18	6.094.227,88	6.231.410,65	6.255.733,89
Distribusi (ADHB) %	57,27	54,66	54,10	52,12	51,98
Pertumbuhan (ADHK) %	4,25	2,54	1,73	2,25	0,39

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

Kabupaten Wonosobo dengan topografi yang bergunung menjadikan hasil hasil pertanian sebagai komoditas utama sehingga untuk menukupi kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi masih mengandalkan import dari luar daerah, dari komoditas yang berupa bahan bakar, pakaian dan berbagai kebutuhan lain masih didatangkan dari luar daerah. Tahun 2017 pertumbuhan import melambat yang cukup signifikan, dari 2,25 ditahun 2016 menjadi 0,39 ditahun 2017.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 13.9. Net Ekspor Antar Daerah Tahun 2013 - 2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (juta)	(1.560.082,47)	(1.395.888,49)	(1.498.853,64)	(1.294.052,50)	(1.170.592,21)
ADHK (juta)	(974.321,68)	(834.868,55)	(631.028,37)	(479.959,60)	(376.568,57)
Pertumbuhan (ADHK) %	12,56	14,31	24,42	23,94	21,54

Sumber Data : BPS

*) Data Sementara.

**) Data Sangat Sementara

Nilai net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2013-2017 selalu bernilai negatif, baik adh Berlaku maupun adh Konstan. Hal ini menunjukkan nilai import antar daerah lebih besar dari nilai exportnya, atau dengan perkataan lain perdagangan antar daerah Kabupaten Wonosobo dengan kabupaten-kabupaten lain selalu mengalami minus. Kondisi ini umum untuk daerah-daerah yang didominasi pertanian. Hampir semua kebutuhan lain baik barang maupun jasa didatangkan dari daerah lain. Barang-barang yang didatangkan dari luar daerah meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, bahan bakar, bahan bangunan dan barang kebutuhan lainnya. Bila dicermati nilai net export di Kabupaten wonosobo walaupun nilainya masih minus namun nilainya terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai import yang tinggi mulai diimbangi dengan exportnya.

Harapan ke depan nilai net export bisa bernilai positif dalam arti barang-barang import yang dilakukan juga diimbangi dengan nilai export yang lebih baesar lagi, sehingga disuatu saat nilai export dari Kabupaten Wonosobo bisa lebih besar dari nilai importnya.

BAB 14

Statistik Akomodasi

BAB XIV

STATISTIK AKOMODASI

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Ketika pengelolaan sektor ini dilakukan dengan baik, maka dapat menjadi salah satu jalan masuk devisa negara dengan berkunjungnya wisatawan asing ke dalam negeri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan pesona wisata yang sangat berpotensi menarik wisatawan untuk berkunjung.

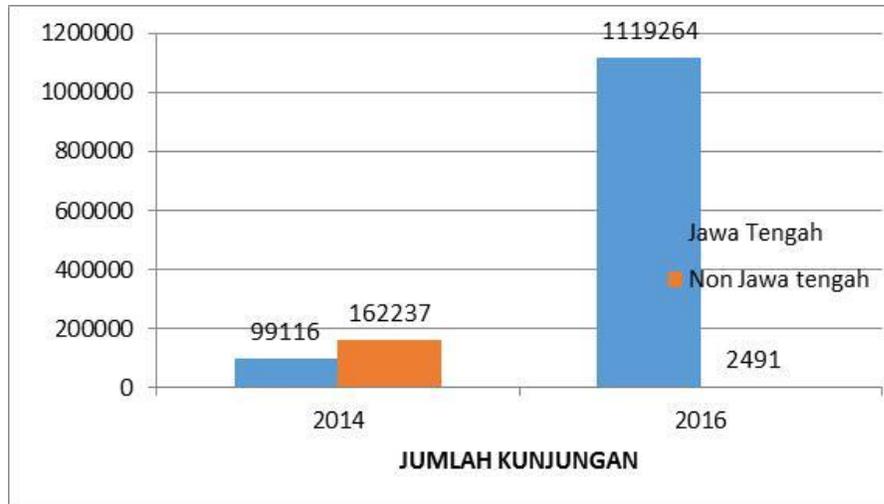
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang beriklim dingin dan berada di lereng gunung. Dengan potensi tempat wisata alam dan sejarah yang dimiliki, Kabupaten Wonosobo dapat menarik wisatawan untuk datang, yang pada akhirnya dapat semakin menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo menyajikan beberapa indikator di bidang pariwisata dan perhotelan yang dapat bermanfaat untuk mengetahui gambaran kondisi pariwisata dan hotel di Kabupaten Wonosobo.

14.1. PARIWISATA

Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten yang terletak di antara dua gunung yaitu gunung Sindoro dan Sumbing dan terletak di lereng pegunungan. Iklim yang dingin, dengan kekayaan pemandangan alam, wisata alam, dan wisata budaya menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menarik pada wisatawan untuk berkunjung. Dataran Tinggi Dieng yang merupakan ikon wisata Kabupaten Wonosobo adalah salah satu tempat wisata budaya alam dan budaya yang setiap tahunnya selalu menarik wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Selain itu ada objek wisata alam lain yang menarik untuk dikunjungi seperti Telaga Menjer, Pemandian Mangli, Gelanggang renang Kalianget, Lembah Dieng, bukit seroja, bolongan sewu dan lain sebagainya.

Berikut adalah banyaknya wisatawan Jawa Tengah, luar Jawa Tengah, dan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Dataran Tinggi Dieng.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Gambar 14.1. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng yang Berasal dari Jawa Tengah, Luar Jawa Tengah, dan Mancanegara, 2014 dan 2016

Mayoritas pengunjung Objek Wisata Dieng adalah wisatawan yang berasal dari luar Jawa Tengah dan yang terendah adalah wisatawan mancanegara. Wisatawan yang berasal dari Jawa Tengah dari tahun 2014–2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 wisatawan nusantara meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wisatawan yang berasal dari luar Jawa Tengah banyak berkunjung ke Wonosobo karena mereka tertarik dengan wisata alam yang ditawarkan melalui media elektronik. Dari beberapa obyek wisata yang ada di Wonosobo Dieng Plateau Theatre (DPT) paling banyak dikunjungi oleh wisatawan.

14.2. HOTEL

Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Hotel harus mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pariwisata, hotel dapat dibedakan menjadi hotel berbintang dan hotel non bintang (melati). Syarat-syarat hotel bintang adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan fisik, meliputi kondisi bangunan dan sebagainya
2. Bentuk pelayanan yang disediakan
3. Klasifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan, kesejahteraan karyawan dan sebagainya
4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti tenis, kolam renang, diskotik dan sebagainya.

Losmen adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran) dengan pembayaran.

Akomodasi lainnya adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran) tetapi dapat memperoleh fasilitas lainnya dengan pembayaran. Usaha akomodasi yaitu wisma, pondok wisata/remaja, motel, bungalow, rumah pemondokan dan sebagainya.

a. Jumlah Hotel dan Pondok Wisata

Selama lima tahun terakhir, jumlah hotel dan pondok wisata di Kabupaten Wonosobo tidak banyak mengalami perubahan. Dari data yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo terdapat 1 buah hotel bintang IV, 1 buah hotel bintang II, 20 buah hotel nonbintang dan 26 buah pondok wisata.

Tabel 14.1. Jumlah Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2016

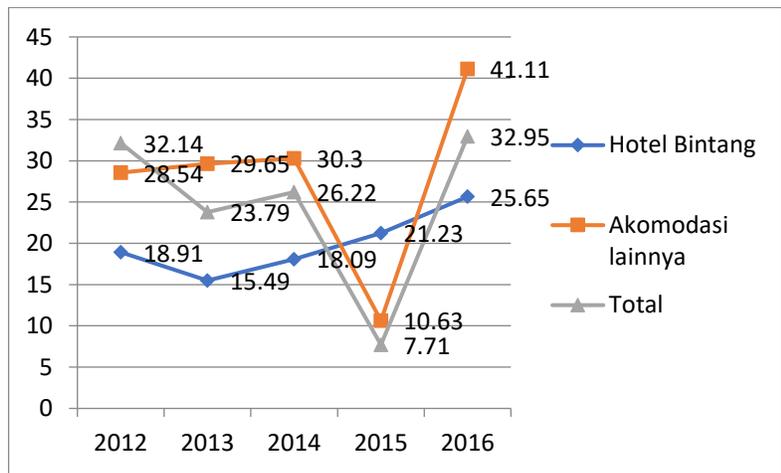
Klasifikasi Hotel	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	
Bintang V				
Bintang IV	1	1	1	1
Bintang III				
Bintang II	1	1	1	1
Bintang I	1	1		
Non Bintang	17	17	17	20
Pondok Wisata	19	26	26	26
Jumlah	30	45	46	48

14.2.1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK)

TPK adalah persentase kamar yang dihuni/dipakai tamu terhadap jumlah kamar yang tersedia. TPK dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dihuni/dipakai tamu (*room night occupied*) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/dapat dipakai (*room night available*) dikalikan 100%.

$$TPK = \frac{\text{Jumlah kamar yang dihuni tamu (room night occupied)}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia (room night available)}} \times 100\%$$

Dari TPK dapat dilihat berapa persentase kamar hotel yang terpakai dalam suatu kurun waktu tertentu. Semakin tinggi nilai TPK berarti semakin sering/semakin besar persentase kamar digunakan/disewa oleh tamu.



Sumber : BPS

Gambar 14.2. TPK Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2012 -2016

TPK hotel secara umum mengalami peningkatan dan juga penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012 total rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 32,41 pada tahun 2012 dan tahun 2013 turun menjadi 23,79 atau 8,35 . Pada tahun 2016 TPK total adalah 32,95 atau mengalami peningkatan sebesar 25,24 persen dibanding tahun sebelumnya yang turun pada angka 7,71.

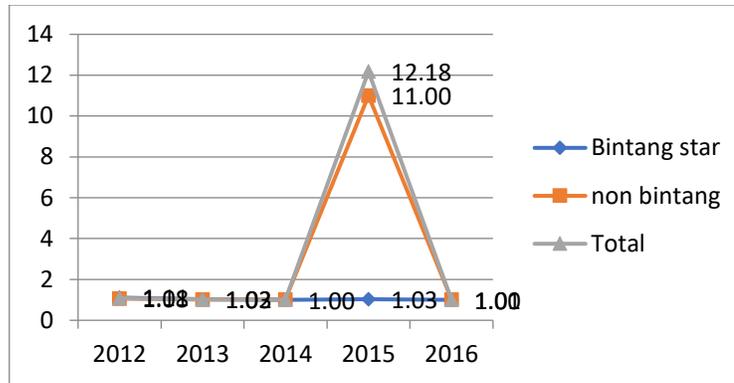
TPK hotel bintang pada tahun 2012 berada pada 18,91 kemudian tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 15,49 dan naik lagi pada tahun 2014 menjadi 18,09 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan pada angka 25,65 atau mengalami kenaikan menjadi 4,42 dibandingkan di tahun 2015 pada bernilai 21,23.

TPK hotel non bintang, yang mana jumlah sarana akomodasinya lebih banyak daripada hotel bintang selama 2012-2016 mengalami kenaikan, baik di tahun 2012 maupun di tahun 2016. Pada tahun 2012, TPK hotel non bintang adalah 28,54 atau mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang bernilai 29,65. Kemudian pada tahun 2014 TPK hotel non bintang mengalami kenaikan lagi menjadi 30,30 sedang pada tahun 2015 mengalami penurunan tajam menjadi 10,63 dan pada tahun 2016 naik kembali menjadi 41,11.

Jika dibanding TPK antara hotel bintang dan non bintang, secara umum TPK hotel non bintang lebih besar dibanding dengan TPK hotel bintang. Hal ini berarti pengguna hotel yang menginap, masih lebih memilih hotel non bintang dibanding dengan hotel bintang. Hal ini dapat dikarenakan tarif hotel non bintang yang lebih murah. Selain itu juga dikarenakan jumlah hotel non bintang yang lebih banyak dibandingkan hotel bintang.

14.2.2. Rata-rata Lama Menginap (RLM)

Rata-rata Lama Menginap dihitung berdasarkan banyaknya malam tempat tidur yang dihuni/dipakai (*bed night used/guest night*) dibagi dengan banyaknya tamu yang datang. Dari Data BPS untuk total rata-rata lama menginap pada tahun 2012 – 2016 tahun 2012 pada 1,08 terus tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,02 pada tahun 2015 ada kenaikan signifikan di angka 12,18 namun pada tahun 2016 kembali lagi turun menjadi 1,01

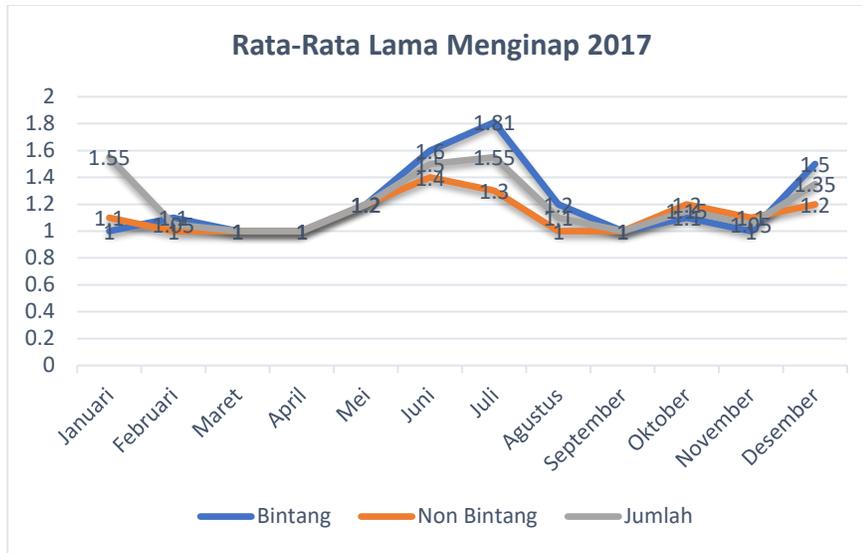


Gambar 14.3. RLM Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2013-2017

Tahun 2017 rata-rata menginap di hotel berbintang di sekitar angka 1.00 artinya rata-rata menginap kurang lebih satu malam .sedang pada hotel non bintang mengalami kenaikan dan juga penurunan pada setiap bulannya .

Data dari BPS RLM tamu pada akomodasi Hotel menurut bulan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

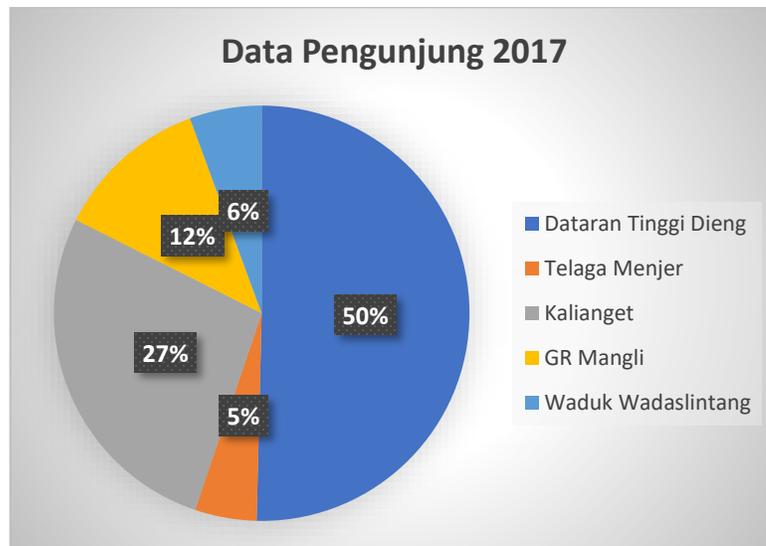
No	Bulan	Bintang	Non Bintang	Jumlah
1	Januari	1.00	1.10	1.55
2	Februari	1.10	1.00	1.05
3	Maret	1.00	1.00	1.00
4	April	1.00	1.00	1.00
5	Mei	1.20	1.20	1.20
6	Juni	1.60	1.40	1.50
7	Juli	1.81	1.30	1.55
8	Agustus	1.20	1.00	1.10
9	September	1.00	1.00	1.00
10	Oktober	1.10	1.20	1.15
11	November	1.00	1.10	1.05
12	Desember	1.50	1.20	1.35
Rata-Rata		1.21	1.13	1.12
	2016	1.00	1.02	1.01
	2015	1.03	11.00	12.18
	2014	1.00	1.02	1.01
	2013	1.03	1.02	1.02



Gambar 14.4. Rata-rata lama menginap pada akomodasi hotel menurut bulan di Hotel di Kabupaten Wonosobo,2017

14.2.3. Jumlah Pengunjung objek wisata menurut Wisatawan di kabupaten Wonosobo 2017

Jumlah Obyek Wisata Di kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 dan Pengunjung baik dari domestik dan Mancanegara. Jumlah kunjungan wisata terbesar di dataran Tinggi Dieng .



Sumber : BPS

Gambar 14.5. Jumlah kunjungan wisata tahun 2017

BAB 15

Keuangan Daerah

BAB XV

KEUANGAN DAERAH

15.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas:

- Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Setiap daerah pemerintahan memiliki kewajiban dan kebutuhan akan pembuatan APBD sebagai pedoman/dasar perencanaan, pengawasan, distribusi, dan stabilitas kegiatan selama satu tahun pemerintahan berjalan. Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu bagian dari pemerintah Indonesia, setiap tahunnya menyusun APBD agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Realisasi Kabupaten Wonosobo tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15.1. Realisasi APBD di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendapatan	1.277.145.669.965	1.432.159.651.029	1.575.601.833.680	1.829.290.334.360
1.1	Pendapatan Asli Daerah	175.319.364.867	182.607.628.797	199.894.767.510	228.017.473.938
1.2	Pendapatan Transfer	1.041.173.346.789	1.116.918.004.333	1.158.504.208.170	1.351.553.296.967
1.3	Pendapatan Lain yang Sah	60.652.958.309	132.634.017.899	217.202.858.000	249.719.563.455
2	Belanja	1.168.905.623.767	1.494.447.291.802	1.619.140.120.490	1.715.143.386.698
2.1	Belanja Operasional	960.336.642.616	1.084.642.434.145	1.091.103.428.817	1.112.689.182.776
2.2	Belanja Modal	206.098.010.151	257.421.064.912,8	276.909.650.835	311.015.809.922
2.3	Belanja Tak Terduga	2.470.971.000	2.266.803.000	7.448.607.458	3.989.218.000
2.4	Transfer	51.418.061.600	150.086.989.744	243.678.433.350	287.449.176.000
3	Pembiayaan	270.944.787.864	300.297.135.899	222.074.281.956	157.464.391.234
3.1	Pembiayaan Penerimaan	297.208.756.864	342.065.873.521	238.104.871.956	178.694.891.234
3.2	Pembiayaan Pengeluaran	26.263969.000	41.768.737.622	16.030.590.000	21.230.500.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo

Pada tabel di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo sebagian besar berasal dari dana transfer/dana perimbangan. Besarnya dana transfer pada tahun 2014 adalah 4,03 persen dari total pendapatan Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2015 sebesar 10,48 persen, dan pada tahun 2016 sebesar 15,47 persen. Pada tahun 2017 kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah relatif kecil yaitu 16,90 %. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat tergantung dari pemerintah pusat maupun Provinsi. Untuk itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan PAD.

Bagian dari belanja daerah yang terbesar adalah untuk belanja transfer. Besarnya belanja transfer dibandingkan total belanja, hampir 50 persen lebih belanja daerah Kabupaten Wonosobo adalah untuk belanja transfer. Besarnya persentase belanja transfer ini umumnya digunakan untuk keperluan Dana Bantuan dan Dana Cadangan.

15.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan-perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangannya, baik dari penerimaan maupun pembiayaan. Pemerintah daerah juga harus mampu menggali potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Dalam UU No.22 Tahun 1999 Bab VIII tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran.

Sumber pendapatan pemerintah daerah bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Pendapatan lain daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Contoh pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma. Ditetapkannya retribusi berhubungan dengan jasa timbale (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atau permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat penjualan pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa PAD Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 10 persen dari total pendapatan daerah. Berikut adalah pos-pos PAD Kabupaten Wonosobo.

Dari tabel 16.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar PAD Kabupaten Wonosobo tahun 2017 berasal dari lain-lain (PAD yang sah).

Tabel 15.2. PADS Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Daerah	23.309.000.000	25.905.000.000	27.612.500.000	38.328.722.023
Retribusi Daerah	21.313.572.198	8.157.730.500	9.918.981.500	10.302.666.650
Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.879.275.000	10.203.850.000	11.876.999.390	25.659.727.540
Lain-lain (PAD yang Sah)	75.235.385.604	1.10249.084.000	128.539.088.670	330.872.846.776
Jumlah	126.737.232.802	154.515.664.500	177.947.569.560	405.163.962.989

Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo

